



UNIVERSITAS INDONESIA

**RELEVANSI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU
SELATAN DENGAN KABUPATEN BURU BERDASARKAN
KONDISI FAKTUALNYA**

SKRIPSI

NDARU MUKTI LESTARI

1006817271

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

DEPOK

JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ndaru Mukti Lestari

NPM : 1006817271

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ndaru Mukti Lestari
NPM : 1006817271
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Relevansi Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan
Dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru
Berdasarkan Kondisi Faktualnya

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : (.....)
Defny Holidin. S.Sos MPM

Penguji : (.....)
Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si

Ketua Sidang : (.....)
Dra. Rainingsih Hardjo, MA

Sekretaris Sidang : (.....)
Dra. Sri Susilih, M.Si

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya lah skripsi dengan judul “Relevansi Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Dengan Kabupaten Buru Berdasarkan Kondisi Faktualnya” ini dapat penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia dalam satu dekade terakhir sebagai akibat pemberlakuan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berangkat dari kenyataan tersebut penulis ingin melihat tingkat ketergantungan suatu daerah otonom baru (hasil pemekaran) terhadap daerah induknya khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan daerah dengan mengambil contoh kasus pada Kabupaten Buru Selatan.

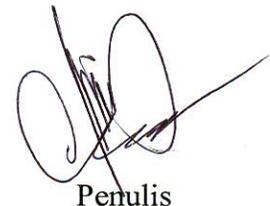
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, yakni :

- 1) Prof.Dr.Bambang Shergi Laksmono MSc, Selaku Dekan FISIP UI;
- 2) DR. Roy Valian Salomo M.Soc.Sc, Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 3) Drs. Asrori MS, Selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 4) Dra. Afiati Indri Wardani M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 5) Dra. Rainingsing Hardjo M.A, Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama jalannya perkuliahan;
- 6) Defny Holidayin S.Sos, MPM, selaku pembimbing skripsi, yang senantiasa memberikan masukan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini;
- 7) Dra. Afiati Indri Wardani M.Si, Selaku Dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna perbaikan skripsi ini;
- 8) Seluruh dosen pengajar di Departemen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

- 9) Ibunda tercinta, atas segala dukungan dan doanya yang selalu belau curahkan selama penulis mengikuti perkuliahan maupun pada saat penyusunan skripsi ini;
- 10) Suami tercinta Muhammad Thahir Saimima yang telah memberikan izin dan juga dukungannya selama penulis mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
- 11) Anak-anakku tercinta, atas segala keceriaan yang telah kalian berikan sehingga selalu memberikan inspirasi bagi penulis dalam menjalani perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini;
- 12) Ibunda Sri Mulatsih atas dukungan dan perhatiannya baik secara moril dan materil yang senantiasa diberikan kepada penulis;
- 13) Tagob Sudharsono Soulisha SH. MH, Bupati Kabupaten Buru Selatan atas kesempatan dan dukungan yang diberikan selama penulisan skripsi ini;
- 14) Nazarudin SE, atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini;
- 15) Staf Kantor Bappeda Kabupaten Buru Selatan, atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Buru Selatan;
- 16) Rekan-rekan Administrasi Negara Eksensi atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini;
- 17) Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap kepada seluruh pihak agar berkenan untuk memberikan masukan yang bermanfaat guna perbaikan penulisan ini pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amien.

Depok, 16 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ndaru Mukti Lestari
NPM : 1006817271
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

*“ Relevansi Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan
Dengan Kabupaten Buru Berdasarkan Kondisi Faktualnya ”*

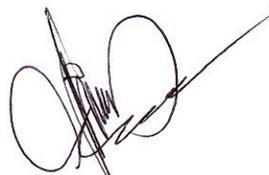
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Ndaru Mukti Lestari)

ABSTRAK

Nama : Ndaru Mukti Lestari
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Relevansi Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan
Dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru
Berdasarkan Kondisi Faktualnya

Pemekaran wilayah merupakan suatu fenomena baru yang sedang marak terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Fenomena ini lahir sebagai akibat dari diberlakukannya kembali sistem desentralisasi di Indonesia. Pemekaran wilayah tersebut kemudian menghasilkan sejumlah daerah otonom baru yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan prakarsanya sendiri, kecuali lima kepentingan yang berdasarkan undang-undang tersebut tetap dipegang oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya adalah wewenang dalam hal perencanaan pembangunan. Bagi daerah otonom baru, sebelum ia dapat menyusun rencana pembangunannya sendiri, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengacu pada Rencana pembangunan daerah induknya, setelah kepala daerah definitif terpilih maka ia wajib menyusun rencana pembangunan daerahnya sendiri.

Kata kunci : Pemekaran Wilayah, Perencanaan pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan

ABSTRACT

Name : Ndaru Mukti Lestari
Program : Public Administration
Title : The Relevance of South Buru Development Priorities with Buru Development Planning Based on Its Factual Condition.

Regional growth is a new phenomenon emerging in Indonesia in the past decade. This phenomenon was a result of the reintroduction of a decentralized system in Indonesia. Regional divisions are then produced a number of new autonomous regions that have the authority to regulate and manage the interests of their regions in accordance with his own initiative, but five of interests under law is still held by the central government, including the authority in terms of development planning. For new autonomous regions, before he could arrange its own development plan, the implementation of development plans in accordance to the regional development plan of its main region, after definitive local chief elected and he shall prepare its own development plans.

Keywords : *Agglomeration, Regional Development Planning, Development Priority*

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
2.2.1 Desentralisasi.....	19
2.2.2 Pemekaran Wilayah.....	22
2.2.3 Perencanaan Strategik.....	26
2.2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	43
III. METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Jenis-jenis Penelitian.....	46
3.3 Metode dan Teknik Penelitian.....	46
3.4 Lokasi Penelitian.....	48
3.5 Tahap Penelitian.....	49
3.6 Keterbatasan Penelitian.....	50

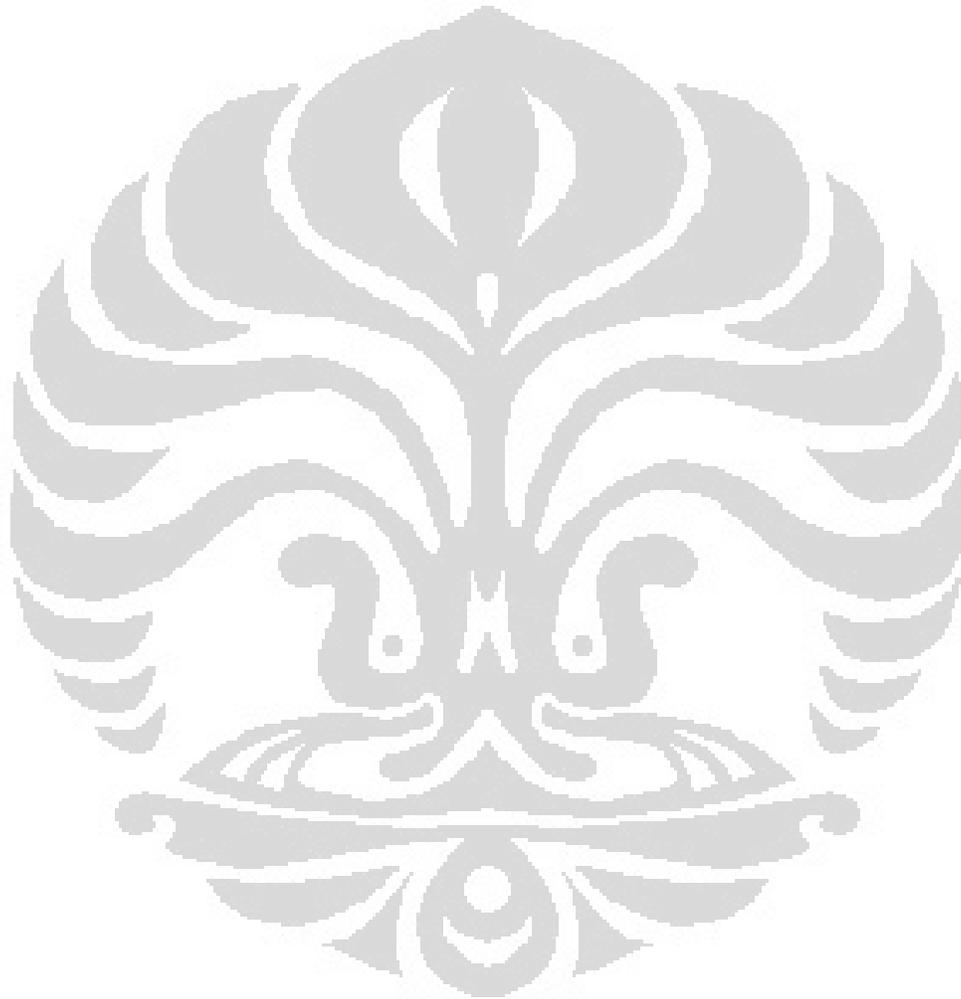
IV. RELEVANSI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU BERDASARKAN KONDISI FAKTUALNYA.....	51
4.1 Gambaran Wilayah.....	51
4.1.1 Kondisi Fisik Wilayah.....	51
4.1.2 Kondisi Sosial.....	53
4.1.3 Kondisi Ekonomi.....	55
4.1.4 Kondisi Pelayanan Umum.....	61
4.2 Analisis Relevansi Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru Berdasarkan Kondisi Faktualnya.....	68
4.2.1 Dasar Hukum.....	68
4.2.1.1 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.....	68
4.2.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	70
4.2.2 Proses Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.....	74
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan.....	55
4.2.4 Perbandingan Prioritas Pembangunan Buru Selatan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru.....	61
4.2.4.1 Visi/Tujuanmbangunan.....	68
4.2.4.2 Strategi Pembangunan.....	70
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	112
5.1 Simpulan.....	112
5.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah Kapupaten/Kota berdasarkan kelompok Pulau, 1996 -2007.....	3
Tabel 2	Tinjauan Pustaka	16
Tabel 3	Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas, Desa dan Dusun	52
Tabel 4	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 5	Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan di wilayah Laut Banda	56
Tabel 6	Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan berdasarkan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Buru Selatan.....	57
Tabel 7	Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011	59
Tabel 8	Potensi Wisata Buru Selatan Tahun 2011.....	59
Tabel 9	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Lulusan Ujian Nasional Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010	64
Tabel 10	Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Wilayah Buru Selatan 2007.....	78
Tabel 11	Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Wilayah Buru Selatan 2007.....	79
Tabel 12	Analisis SWOT Kabupaten Buru Selatan.....	90
Tabel 13	Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Buru.....	101
Tabel 14	Perbandingan Strategi Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan.....	104
Tabel 15	Analisis Kesesuaian Visi dengan Strategi Pembangunan Kabupaten Buru.....	106
Tabel 16	Analisis Kesesuaian Visi dengan Strategi Pembangunan Kabupaten Buru Selatan.....	107

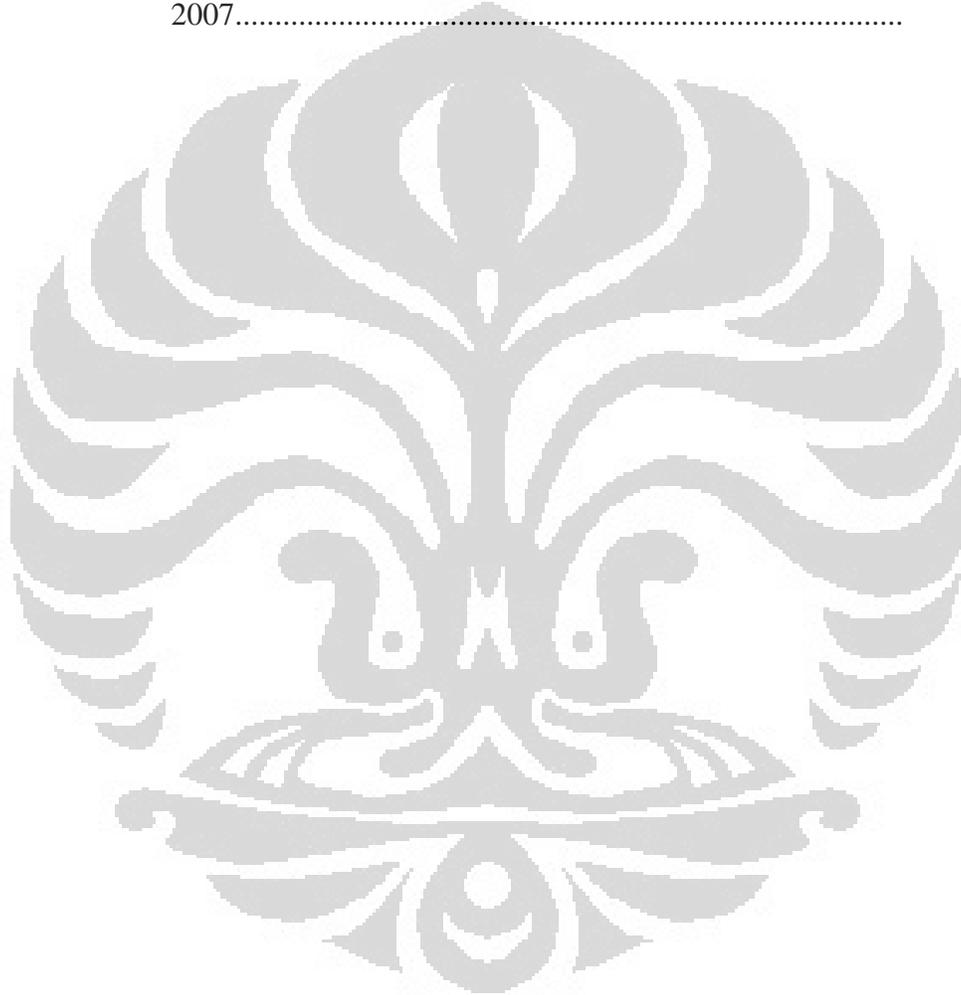
Daftar Gambar

Gambar 1	Proses Analisis Data Kualitatif.	48
----------	---------------------------------------	----



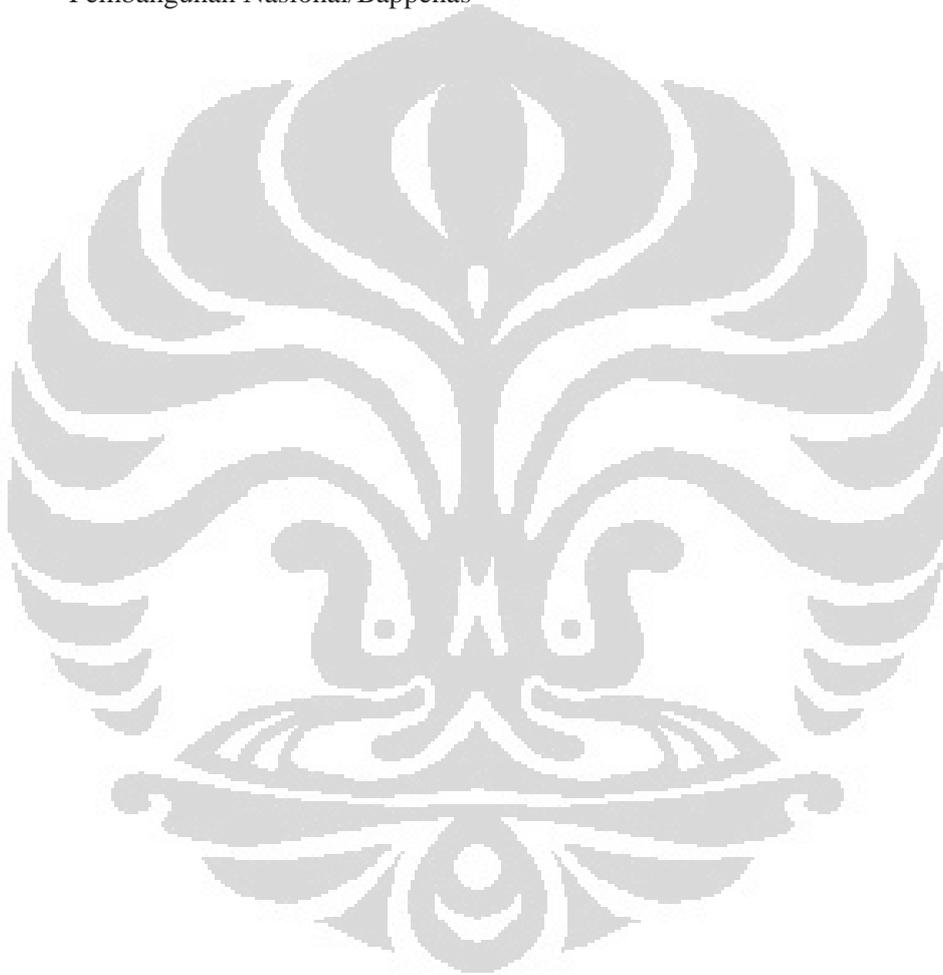
Daftar Diagram

Diagram 1	Angka Harapan Hidup Buru Selatan, 2008-2010.....	65
Diagram 2	IPM Buru Selatan, 2008-2010.....	66
Diagram 3	Laju pertumbuhan Ekonomi Wilayah Buru Selatan Berdasarkan sektor Primer, sekunder, dan Tersier tahun 2007.....	77



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Notulensi wawancara dengan Bupati Kabupaten Buru Selatan
- Lampiran 3 Notulensi wawancara dengan Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru Selatan
- Lampiran 4 Notulensi Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan
- Lampiran 5 Notulensi Wawancara dengan Perencana Madya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 memberikan dampak yang luas pada perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik, kini berubah menjadi desentralistik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu tidak hanya melahirkan pembagian kekuasaan di antara eksekutif dan legislatif namun juga pembangian urusan atau kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya desentralisasi, pemerintah daerah menerima otonomi yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, hampir semua urusan yang sebelumnya di laksanakan oleh pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah, kecuali untuk lima urusan khusus yakni (Agama, fiskal & Moneter, Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan) sedangkan sisanya di serahkan kepada pemerintah daerah.

Pemberlakuan kembali sistem desentralisasi di Indonesia ditandai dengan disahkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” yang kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 32 Tahun 2004 mengatur hal yang sama. Dalam undang-undang tersebut desentralisasi diartikan sebagai penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Jika dilihat dari tujuannya, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu

daerah. Diharapkan dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut dapat menjalin hubungan yang lebih dekat antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang ada, di sisi lain masyarakat pun dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan tersebut, desentralisasi kemudian dijadikan sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wacana politik lokal. Selain memberikan kewenangan pengelolaan pada bidang tertentu, desentralisasi telah memberikan ruang bagi suatu daerah untuk melakukan pembentukan wilayah/ daerah baru. Pembentukan daerah baru dapat dilakukan dengan tiga cara, cara yang pertama dengan penggabungan beberapa daerah, cara yang kedua adalah dengan penggabungan sebagian daerah yang berdampingan, dan cara yang ketiga adalah pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan wilayah di Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian revisi kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang “Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.”

Dalam praktiknya di Indonesia, pembentukan daerah baru dengan menggunakan cara pemekaran lebih dominan dari cara lainnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemekaran lebih digemari, namun alasan yang sangat mendasar adalah jangkauan wilayah pelayanan. Luas wilayah suatu daerah dirasa terlalu luas, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, pemekaran wilayah dinilai sebagai salah satu solusi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga mempermudah akses dan jangkauan layanan bagi masyarakat.

Fenomena pemekaran di Indonesia berkembang pesat sejak dimulainya era desentralisasi. Pembentukan daerah otonom baru yang sangat tinggi adalah kabupaten, setidaknya tercatat dalam kurun waktu 10 tahun ada 164 kabupaten yang terbentuk atau sekitar 70 persen, pada tahun 1999 jumlah kabupaten tercatat sebanyak 234, kemudian menjadi 398 kabupaten pada tahun 2009. Pertumbuhan

kota ada di peringkat kedua, mencapai 57,6 persen, jumlah kota bertambah sebanyak 34 kota. Tahun 1999 jumlah kota tercatat 59, kemudian bertambah menjadi 93 kota pada tahun 2009. Sedangkan pertumbuhan provinsi hanya sebesar 22 persen. Dari 27 provinsi, sekarang menjadi 33 provinsi. bertambahnya jumlah provinsi, kabupaten, dan kota juga mempengaruhi pertumbuhan jumlah kecamatan, kelurahan, dan juga desa. Kecamatan bertambah 18,9 persen, kelurahan 35 persen, desa 14,4 persen. (Tempo, 28 April 2011).

Pada umumnya DOB (daerah otonom baru) yang terbentuk berada di luar pulau Jawa, bahkan di daerah timur Indonesia jumlahnya mencapai dua kali lipat dari wilayah Indonesia lainnya, seperti di Maluku dan di Papua. Secara keseluruhan, penambahan kabupaten/kota di Indonesia sampai dengan tahun 2007 sebesar 54 %, sedangkan di wilayah Maluku dan Papua mencapai 150 %. Sampai dengan awal tahun 2008 jumlah daerah otonom baru yang terbentuk sebanyak 36 daerah, 9 daerah berada di wilayah Propinsi Papua Barat dan 27 daerah lagi berada di wilayah Propinsi Papua, padahal pada tahun 1996 Papua hanya terdiri dari 13 daerah saja. (Brata, 2008 :1) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota berdasarkan kelompok Pulau, 1996 -2007

Pulau	Jumlah Kabupaten/Kota				
	1996	1999	2002	2005	2007
Sumatera	74	96	110	132	136
Jawa/Bali	116	119	124	124	125
Nusa Tenggara	20	21	23	25	28
Kalimantan	29	38	48	52	53
Sulawesi	40	45	50	62	69
Maluku/Papua	18	22	36	45	45
Indonesia	297	341	391	440	456

Sumber : BPS Statistik Indonesia, beberapa tahun

Dengan terbentuknya suatu daerah otonom baru, banyak sekali permasalahan dan tantangan yang dihadapi baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang bersifat strategis, efisien dan efektif agar dapat menjawab tantangan dan permasalahan tersebut sehingga tujuan dari pembangunan dan pembentukan daerah otonom baru dapat tercapai.

Seperti diketahui bersama bahwa perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan, khususnya pada daerah otonom baru yang harus menyusun perencanaan pembangunannya dari awal sekali, karena pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi (dalam hal ini pemerintah daerah). Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian disusun alternatif pemecahan masalahnya, oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan suatu daerah, apabila pada tahap ini terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi masalah, ataupun pada penentuan alternatif pemecahan masalahnya, hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya sasaran atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan pada tahap perencanaan, oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Keberhasilan perencanaan suatu daerah tidak serta merta menjamin keberhasilan jika diterapkan pada daerah lain. Pada daerah pemekaran, pada awal terbentuknya daerah baru tersebut, perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah induknya sampai daerah tersebut bisa menyusun perencanaannya sendiri. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan dokumen perencanaan DOB adalah, penyusunan perencanaan pembangunan tersebut harus didasarkan atas kondisi dan kebutuhan DOB tersebut, karena walaupun mereka memiliki banyak kesamaan baik dilihat dari karakteristik wilayah maupun karakteristik masyarakatnya, namun bisa saja kondisi dan kebutuhan DOB tersebut berbeda dengan daerah induknya.

Pembangunan menurut Siagian (1994:1) dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*), sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah upaya terencana guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan juga dalam mengelola sumber daya, potensi yang ada di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berada pada daerah tersebut (Pembab Banyuwangi, 2012).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat permasalahan perencanaan pembangunan pada daerah otonom baru (DOB) yakni, Kabupaten Buru Selatan, yang berada di wilayah timur Indonesia yang telah banyak melahirkan daerah otonom baru. Kabupaten Buru Selatan semula merupakan bagian dari Kabupaten Buru yang kemudian dimekarkan menjadi daerah otonom baru pada tahun 2008.

Wacana pemekaran Kabupaten Buru berawal dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Buru itu sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerahnya. Aspirasi masyarakat Buru tersebut kemudian disambut baik oleh DPR RI dengan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Juni 2008 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalata, SH, MH. (Info Maluku : 07 Feb 2011)

Wilayah Buru Selatan berdasarkan hasil penilaian tim DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) telah memenuhi persyaratan baik secara teknis maupun administratif untuk menjadi sebuah daerah otonom. Selanjutnya Kabupaten Buru Selatan terdiri dari 5 buah kecamatan yakni, Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kepala Madan, dan Kecamatan Leksula. Namrole kemudian ditetapkan menjadi ibu kota dengan pertimbangan telah tersedianya infrastruktur penunjang pada daerah tersebut seperti, bandara dan pelabuhan , adanya akses berupa jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan kabupaten induknya yakni Kabupaten Buru, selain itu juga tersedianya jaringan listrik dan sumber air bersih,

sedangkan di kecamatan lain selain Namrole dan kecamatan Leksula fasilitas-fasilitas tersebut sangat minim sekali, bahkan hampir bisa dikatakan bahwa tiga kecamatan lainnya yakni Kecamatan Waesama, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kepala Madan masih sangat terbelakang dan terisolasi, hal ini lah yang menyebabkan adanya keinginan dari masyarakat setempat untuk melakukan pemekaran menjadi kabupaten baru.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kabupaten Buru sebagai kabupaten induk berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buru Selatan dalam jangka waktu tertentu (tiga tahun) guna mendukung persiapan pelaksanaan pembangunan pada daerah pemekarannya. Dalam jangka waktu itu juga pemilihan kepala daerah Kabupaten Buru Selatan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Gubernur Maluku setelah sebelumnya dimusyawarkan pada rapat baperjakat provinsi Maluku. Penunjukan langsung kepada daerah Buru Selatan tersebut kemudian di sahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dievaluasi setiap satu tahun sekali sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru melalui mekanisme (PEMILUKADA) Pemilihan Kepala Daerah. Pada periode 2008-2009 jabatan sementara kepala Daerah Buru selatan dijabat oleh AR Ulupatty, kemudian periode 2009-2010 dijabat oleh Jusuf Latuconsina, periode 2010-2011 dijabat oleh M Shaleh Thio.

Pada periode ini perencanaan pembangunan Kabupaten Buru Selatan dilaksanakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan yang telah disusun kedalam RPJMD milik Kabupaten Buru sebagai kabupaten induk, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD tersebut kemudian dijabarkah kedalam RKPD tahunan yang disesuaikan dengan permasalahan, tantangan dan potensi daerah Kabupaten Buru Selatan sampai disusunnya RPJMD yang baru setelah terpilihnya kepala daerah definitif berdasarkan mekanisme pemilukada. Setelah kepala daerah definitif terpilih, maka daerah otonom baru diharuskan memiliki perencanaan pembangunannya sendiri dan tidak lagi mangacu pada perencanaan pembangunan daerah induknya, walaupun bisa saja daerah otonom

baru tersebut mengadaptasikan beberapa aspek dari perencanaan pembangunan daerah induk apabila dinilai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah khususnya pada daerah otonom baru yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks, dibutuhkan suatu strategi perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Strategi apa yang digunakan Kabupaten Buru Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya, sektor-sektor apa saja yang dijadikan prioritas pembangunan dalam rangka mengembangkan sektor lainnya, sehingga pada akhirnya dapat terlihat sejauh mana tingkat ketergantungannya terhadap kabupaten induknya. Arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buru sebagai kabupaten induk bisa saja digunakan atau diadaptasi ke dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan, ataukah diperlukan adanya sebuah arah dan kebijakan baru yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah yang baru. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui “ bagaimana relevansi prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Buru berdasarkan kondisi faktualnya ”

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis relevansi antara prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Buru berdasarkan kondisi faktualnya, sehingga dapat diketahui format pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Buru Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak pembaca terkait dengan perencanaan pembangunan di daerah umumnya dan perencanaan pembangunan daerah otonomi baru sebagai hasil dari pemekaran wilayah khususnya. Dari segi praktis,

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kabupaten Buru Selatan dan daerah lain di Indonesia sebagai masukan dalam menyusun sebuah perencanaan daerah yang sesuai dengan potensi dan kondisi faktual yang ada di daerahnya.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memiliki batasan dan keterbatasan sebagai berikut :

- Fokus penelitian ini adalah perencanaan pembangunan daerah, khususnya daerah otonomi baru (hasil pemekaran). Sebuah daerah otonom baru biasanya dihadapkan dengan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak dapat dijawab dalam waktu bersamaan, oleh karena itu diperlukan suatu strategi/perencanaan terhadap prioritas pembangunan daerah, untuk menemukan potensi yang dapat diwujudkan daya ungkit sehingga dapat menumbuhkan perkembangan/peningkatan pada sektor lainnya dalam rangka mencapai tujuan –tujuan pembangunan.
- Lokus penelitian ini adalah Kabupaten Buru Selatan yang berada di wilayah Propinsi Maluku. Pemilihan lokus ini didasarkan pada banyaknya jumlah daerah otonom baru yang lahir diwilayah timur Indonesia khususnya di Papua dan Maluku, sehingga menarik untuk dibahas dalam skripsi ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab 1 Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang dan permasalahan yang diangkat, disertai dengan tujuan, manfaat, dan batasan penelitian yang dilakukan.
- Bab 2 Kerangka Pemikiran
Bab ini berisikan kerangka pemikiran yang dapat dijadikan masukan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini, selain itu bab ini juga memuat tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga sangat berharga dalam memberikan masukan bagi peneliti.

- Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan serta alasan pemilihan metode tersebut.

- Bab 4 Pembahasan

Pada bagian ini peneliti mengungkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Buru Selatan yang merupakan daerah otonom baru (hasil pemekaran), kemudian menghubungkannya dengan strategi-strategi pembangunan yang disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Milik Kabupaten Buru (sebagai kabupaten induk) sehingga dapat memberikan gambaran relevansi diantara keduanya.

- Bab 5 Simpulan dan Saran

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencoba menjawab permasalahan yang telah disampaikan pada bab I bagian pokok permasalahan. Peneliti juga memberikan masukan yang membangun guna penyelesaian permasalahan tersebut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan masukan yang sangat berharga dari beberapa penelitian lain terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Peneliti mengambil tiga penelitian terdahulu, yakni penelitian Iryanto yang berbentuk jurnal ilmiah, penelitian Harini Octiyarti dan penelitian Emie Yuliati yang berbentuk karya akademis (tesis).

Penelitian pertama adalah penelitian Iryanto berjudul “ Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota melalui pendekatan Wilayah” yang diterbitkan pada Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Sumatera Utara Volume 1, 3 April 2006. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kenyataan bahwa tiap daerah atau wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda baik ditinjau dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, letak geografis sosial budaya dan lainnya, sehingga diperlukannya suatu rencana pembangunan yang disusun dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimilikinya tersebut.

Dalam penelitian ini Iryanto mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pembangunan, pendekatan wilayah sangat diperlukan guna melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya. Perencanaan pembangunan juga memperhatikan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk diarahkan pada tercapainya kehidupan yang lebih efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi dapat terjadi karena adanya perbedaan menggunakan pendekatan wilayah guna melihat dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam suatu daerah kemudian memanfaatkannya dalam melakukan kerja sama antar daerah untuk bersinergi dan saling mendukung demi memperoleh kuantungan bersama. Dalam mewujudkan kerja sama antar daerah dengan menggunakan pendekatan wilayah, perencanaan pembangunan harus mampu melihat dan memanfaatkan potensi yang ada agar lebih berdayaguna dengan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk memanfaatkannya, demikian juga sebaliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif

dimana Iryanto berusaha membuktikan teori pendekatan kewilayahan dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan data-data sekunder (studi pustaka).

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pendekatan wilayah pada perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu keharusan dalam usaha meningkatkan efisiensi, dan perlunya mengenal potensi daerah sendiri dan daerah sekitarnya guna mendapatkan peluang kerjasama. Dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan, perencanaan pembangunan daerah sebaiknya disusun dengan memadukan pendekatan wilayah dengan pendekatan sektoral, hal ini yang menurut penulis merupakan kelemahan dari penelitian ini, penelitian ini menganggap pendekatan wilayah merupakan keharusan dalam menyusun rencana pembangunan dan merupakan satu-satunya cara dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penelitian yang kedua adalah penelitian Harini Octiyarti yang berbentuk Karya Akademis (tesis) dengan judul “Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan Sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini Octiyarti mengemukakan pentingnya faktor keuangan dalam pembangunan daerah. Keadaan keuangan daerah sangat mempengaruhi dan menentukan corak, bentuk, serta krgiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, terlebih lagi setelah diberlakukannya otonomi daerah. Tanpa dukungan dana yang memadai, akan sangat sulit bagi daerah otonom untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, mengharuskan daerah untuk mampu menggali sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun begitu tidak semua penerimaan dan sumber keuangan yang diperoleh daerah dapat mencukupi kebutuhan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu pemerintah pusat ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan dana perimbangan. Seharusnya ketika suatu daerah dijadikan daerah otonom, daerah tersebut diasumsikan memiliki kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri dari hasil pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Kenyataan yang terjadi di Indonesia tidak begitu, banyak sekali daerah-daerah otonom khususnya daerah otonom baru

masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap transfer dana dari pusat. Hal inilah yang berusaha diantisipasi oleh Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian ini membahas upaya Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya sehingga tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Palembang berupaya menjadikan Kota Palembang menjadi kota yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk dapat menuwujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kota Palembang menyusun sebuah rencana dan strategi pembangunan yang disusun dengan memperhatikan kondisi, potensi, masalah dan peluang yang dimiliki Kota Palembang.

Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi Kota Palembang digunakan model analisis ekonomi dengan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan sehingga alokasi sumber daya yang digunakan menjadi efisien dan efektif. Disamping itu, dengan menentukan prioritas pengembangan sektor-sektor unggulan yang tepat berdasarkan keunggulan komparatif daerah diharapkan dapat meningkatkan arus investasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi perekonomian Kota Palembang dengan mengidentifikasikan sektor-sektor basis atau unggulan yang dapat memberikan peluang bagi percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, dan juga memberikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik diseperti sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan secara tidak langsung akan meningkatkan PAD Kota Palembang dimasa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan instansi yang terkait, LSM, pengusaha dan akademisi di Kota Palembang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui publikasi dari kantor BPS, bagian keuangan Kota Palembang, dan juga sumber-sumber lainnya. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil perhitungan analisa LQ dan shift share, yang direkomendasikan menjadi sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai Sd (differential shift)

dan Sp (proporsional shift) positif yakni sektor – sektor yang secara agregat memiliki pertumbuhan cepat ditingkat provinsi, yakni sektor pengangkutan, komunikasi, perdagangan, perhotelan, dan restoran. Kritik terhadap penelitian ini adalah dalam proses pembangunan, walaupun dana merupakan unsur yang utama namun ada unsur-unsur lain yang juga memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan, yakni sumber daya manusia. Potensi-potensi daerah dapat dimanfaatkan dan digali dengan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Oleh karena itu faktor sumber daya manusia dengan faktor keuangan memiliki peran yang sama pentingnya dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Penelitian ketiga adalah penelitian Emie Yulianti yang berjudul “Evaluasi Pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kabupaten.” Latar belakang penelitian ini adalah maraknya pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah yang didukung oleh regulasi yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam pembentukan daerah baru. Selain itu ada beberapa hal yang mendorong suburnya pembentukan daerah di Indonesia diantaranya adalah 1) adanya desakan bagi daerah yang masih berstatus kotamadya, kota atau kabupaten administratif untuk dihapus apabila tidak ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom 2) adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, pemekaran daerah membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan oleh pemekaran di antaranya adalah berkembangnya demokratisasi, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif pemekaran adalah adanya usaha-usaha dari segelintir elit lokal guna mendapatkan posisi atau jabatan tertentu, munculnya primodialisme putra daerah, bengkaknya beban pemerintah dan lainnya.

Tujuan pemekaran daerah sejatinya diperuntukan bagi perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Namun begitu berdasarkan studi yang dilakukan Bappenas dan UNDP pada tahun 2005, keadaan daerah otonom baru hasil pemekaran tidak menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada daerah induknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam banyak kasus pemekaran wilayah di

Indonesia didorong oleh kepentingan segelintir elite politik untuk mendapatkan jabatan ketimbang pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

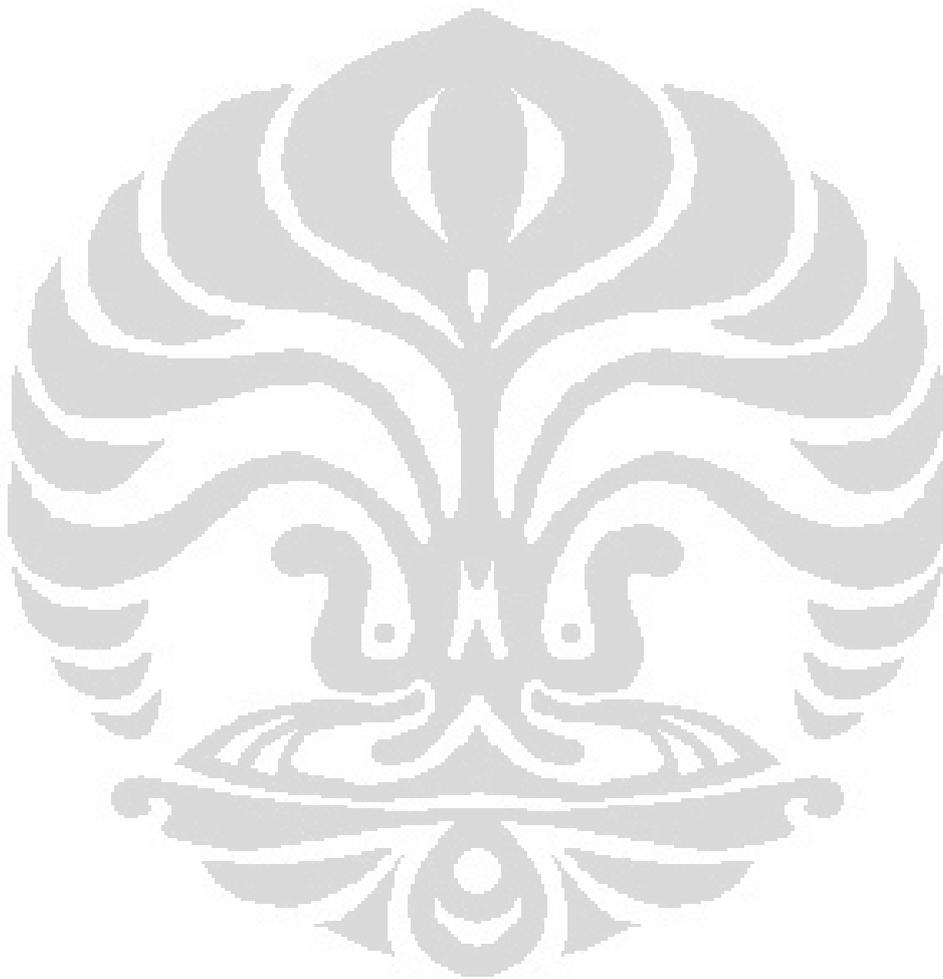
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap dampak pemekaran daerah pada kabupaten yang dimekarkan pada tahun 1999 dengan fokus pada perekonomian daerah dan pelayanan publik dengan menggunakan treatment kontrol dengan membandingkan daerah yang melakukan pemekaran dengan daerah yang tidak melakukan pemekaran. Dari hasil analisis dan evaluasi tersebut dapat disimpulkan dari aspek ekonomi, pertumbuhan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) daerah otonom baru berada diantara daerah kontrol (daerah yang tidak melakukan pemekaran) dan daerah induk dimana PRDB daerah kontrol sangat kecil dan pertumbuhan PDRB daerah induk sangat besar, begitupun halnya pada indeks pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru lebih tinggi dari daerah kontrol namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi daerah induknya. Pertumbuhan penduduk tidak miskin daerah otonom baru masih lebih tinggi dibandingkan daerah kontrol maupun daerah induk.

Dari aspek pelayanan publik, indeks pelayanan publik daerah otonom baru dari tahun 2002 sampai 2008 kinerja pelayanan publik daerah otonom baru masih di bawah daerah induknya, namun masih lebih baik dari daerah kontrol. Dari hasil analisis tersebut juga ditemukan beberapa permasalahan dalam kebijakan pemekaran daerah di Indonesia, di antaranya adalah 1) rendahnya pertumbuhan ekonomi DOB dibandingkan dengan daerah induk disebabkan karena masih dominannya peran sektor pertanian dan belum berkembangnya sektor industri pengolahan. 2) Kontribusi PDRB DOB masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain 3) menurunnya pertumbuhan PDRB DOB yang disebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang difokuskan pada evaluasi kinerja ekonomi dan layanan publik pada kabupaten di luar pulau jawa, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari instansi-instansi terkait. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari aspek layanan publik. Dari sisi sarana dan prasarana, pemekaran daerah terbukti mendorong peningkatan kualitas infrastruktur guna mobilitas

pembangunan daerah, dari sisi pelayanan pendidikan pemekaran terbukti mendorong peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, dari sisi pendidikan, daerah otonom baru terbukti memiliki trend atau reaksi positif terhadap pertumbuhan jumlah guru.

Apabila dirangkum, ketiga penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini dibawah ini :



Indikator	Iryanto	Harini Octiyarti	Emie Yulianti	Ndaru Mukti Lestari
Tujuan	Menganalisa pentingnya pendekatan wilayah dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan daerah	Untuk menganalisa kondisi perekonomian Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dengan mengidentifikasi sektor-sektor basis unggulan yang dapat memberikan peluang bagi percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, dan dapat juga memberikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik diseputar sektor-sektor unggulan sehingga dapat meningkatkan PAD.	Mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah Kabupaten di luar Pulau Jawa dalam aspek ekonomi dan pelayanan publik	Menganalisis relevansi prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Buru berdasarkan kondisi faktualnya.
Kerangka pemikiran/Teori yang digunakan	Pendekatan Wilayah	Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Struktur Ekonomi, Analisis SWOT dalam perencanaan strategis	Teori Ekonomi : Indeks Kinerja Eonomi Daerah (IKE) dan Teori Pelayanan :Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah, Konsep Pemekaran wilayah, Konsep Penentuan Prioritas dalam Perencanaan Strategis
Pendekatan	Kuantitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Teknik Pengumpulan Data	Studi Pustaka	Studi Pustaka dan Penelitian Lapangan	Data sekunder yang berasal dari instansi terkait	Studi Pustaka dan Penelitian Lapangan
<i>Object Site</i>		Kota Palembang	Kabupaten di Luar Pulau Jawa	Kabupaten Buru Selatan

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Dalam melakukan perencanaan daerah, harus mengenali potensi daerah itu sendiri dan juga daerah sekitarnya dengan cara memajukan pendekatan wilayah dan pendekatan Sektoral</p>	<p>Berdasarkan hasil perhitungan analisa LQ dan shift share, yang direkomendasikan menjadi sektor unggulan adalah sector yang memiliki nilai Sd (differential shift-pertumbuhan yang cepat) dan Sp(proporsional shift- secara agregat sector-sektor tumbuh cepat dibandingkan tingkat provinsi dan terkonsentrasi pada sector-sektor yang cepat ditingkat provinsi.) positif yakni sector pengangkutan, komunikasi, perdagangan, perhotelan, dan restoran.</p>	<p>Dari aspek perekonomian, dengan kapasitas produksi yang masih rendah, DOB menunjukkan proses yang lebih baik, dari aspek pelayanan, pemekaran daerah terbukti mendorong peningkatan/percepatan kualitas infrastuktur guna menunjang mobilitas pembangunan daerah.</p>	<p>2012</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2006</p>	<p>2002</p>	<p>2011</p>	<p>2012</p>

2.2 Kerangka Pemikiran

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana teori dijadikan dasar bagi suatu penelitian, penelitian kualitatif tidak mendasarkan penelitiannya pada teori yang ada, namun begitu teori tetap digunakan dalam penelitian ini sebagai masukan dan perbandingan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Ada tiga konsep pemikiran yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah konsep mengenai pemekaran wilayah, konsep penentuan prioritas dalam perencanaan strategik, dan konsep perencanaan pembangunan daerah.

Alasan mengapa peneliti menggunakan ketiga konsep pemikiran di atas adalah karena fokus penelitian ini adalah perencanaan pembangunan daerah khususnya pada daerah otonom baru (hasil pemekaran) sehingga peneliti menganggap penting untuk mengetahui dan mengerti tentang konsep pemekaran wilayah terlebih dahulu, sedangkan untuk dapat memahami alur, proses, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah diperlukan pemahaman terhadap perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Konsep terakhir yakni penentuan prioritas dalam perencanaan strategik nantinya akan sangat membantu dalam memahami bagaimana cara menentukan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Buru selatan.

2.2.1 Desentralisasi

Untuk dapat memahami konsep pemekaran wilayah, terlebih dahulu peneliti sampaikan konsep tentang desentralisasi yang merupakan dasar dari kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia. Konsep desentralisasi sering kali dibahas dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada masa sekarang, hampir setiap negara menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Alderfer dalam Muluk (2009:11) mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya kebawah. Pertama, dalam bentuk *deconcentration* yang semata-mata menyusun unit administrasi atau *field station*. Kedua, dalam bentuk *decentralization* dimana unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan

tertentu atas bidang tugas tertentu. Hal yang sama juga ditekankan oleh *United Nation* dibawah ini :

Decentralization refers to the transfer of authority away from the nation capital whether by deconcentration to local (i.e. delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies Herbert (1962:3).

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa desentralisasi mengacu pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proses pelimpahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni, *pertama* dengan cara mendelegasikan kewenangan kepada pejabat-pejabatnya di daerah (*deconcentration*), atau *kedua* dengan cara *devolution* kepada badan-badan otonom daerah. Dalam definisi tersebut tidak dijelaskan mengenai isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu kepada badan-badan / perangkat organisasi daerah. .

Ada dua prinsip dalam desentralisasi. Prinsip yang *pertama* adalah *deconcentration*, dekonsentrasi memiliki *area offices of administration*, yakni suatu perangkat pemerintah pusat yang berada di daerah (di luar kantor pusat). Kepada pejabat tersebut oleh instansi pusat dilimpahkan wewenang dan tanggung jawab bidang tertentu yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi bidang tertentu yang bersifat administratif tanpa menerima penyerahan penuh kekuasaan (*final authority*). Pertanggungjawaban akhir tetap berada pada pemerintah pusat “*the arrangement is administrative in nature and implies no transfer of final authority from the ministry, whose responsibility countries*” (United Nation, 1961).

Prinsip yang *kedua* adalah *devolution*, dimana hanya sebagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan politik (eksekutif) di daerah. Dalam prinsip ini daerah menerima kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan, baik secara politik maupun administrasi. Sifat dari devolusi adalah penyerahan nyata yang berupa fungsi dan kekuasaan dan bukan hanya sekedar pelimpahan kewenangan. Hal ini ditegaskan juga dalam buku tersebut : *this type of arangement has a political as well as an administrative character.*

Seperti halnya United Nations, Bryant dan White (1987:213-214), berpendapat bahwa dalam kenyataannya ada dua bentuk desentralisasi, yaitu :

1. Desentralisasi Administrasi

Suatu bentuk delegasi wewenang (pelaksanaan) yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan, namun juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat lokal. Kewenangan itu bervariasi, mulai dari penetapan peraturan-peraturan yang sifatnya proforma sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih substantif.

2. Desentralisasi politik

Wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal. Dengan begitu pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan yang dianggap baik bagi daerahnya dalam rangka pemberdayaan kapasitas lokal.

Sejalan dengan pendapat Bryant dan White, Rondinelli dan Cheema (1988:18) lebih luas memaparkan konsep-konsep desentralisasi dengan memberikan batasan sebagai berikut:

Decentralization in the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or non government organization.

Lebih lanjut dijelaskan:

. . . different forms of decentralization can be distinguished primary by the extent to which authority to plan, decide and manage is transferred from central government to other organization and the amount of autonomy the „decentralized organizations“ achieved in carrying out their tasks.

Menurut Rondinelli & Cheema, desentralisasi dalam bentuk *deconcentration*, pada hakekatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara instansi pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Pendapat ini tidak berbeda dengan pendapat Bryant. Selanjutnya Rondinelli dan Cheema (1988:18-19) menyebutkan bahwa kewenangan dan

tanggung jawab yang diberikan lebih banyak berupa pergeseran beban kerja dari Pemerintah Pusat kepada pegawainya yang ada di daerah

shifting of workload from a central government ministry or agency headquarters to its own field staff located in offices outside of the national capital, without transferring to them the authority to make decisions or to exercise discretion in carrying them out .

Jadi, dekonsentrasi tidak diikuti dengan penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Desentralisasi dalam bentuk *devolution* memiliki kewenangan yang lebih nyata, dimana suatu daerah diberikan otonomi yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pengambilan keputusan, karena pada sistem ini terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu bentuk pelimpahan kekuasaan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintah yang berada dibawahnya untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Desentralisasi dibagi ke dalam dua bentuk yakni desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, perbedaan kedua bentuk desentralisasi tersebut adalah pada batasan kewenangan yang diberikan. Dalam desentralisasi politik, daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur (terjadi pelimpahan kewenangan dari Pusat kepada daerah), sedangkan dalam desentralisasi administrasi wewenang yang diberikan hanya sebatas mengurus saja (kewenangan tetap berada di tingkat pusat).

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu *pertama* peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/*structural efficiency model*) dan *kedua* peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/*participatory model*). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan dicapai melalui desentralisasi . (Mahkamah Konstitusi, September 2009)

Dari konsep desentralisasi kemudian lahirlah konsep otonomi daerah. Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat didaerahnya sesuai dengan prakarsanya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Hoessein, 2011 :6).

2.2.2 Pemekaran Wilayah

Semangat otonomi daerah tersebut kemudian melahirkan suatu fenomena baru yakni “Pemekaran Wilayah”. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa daerah merasa perlu untuk melakukan pemekaran, hal ini dikarenakan luasnya wilayah tidak sebanding dengan jangkauan pelayanan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah menjadi dua atau lebih, dengan begitu akan memperpendek rentang kendali dan jangkauan layanan kepada masyarakat.

Dari data dan informasi yang berhasil kumpulkan melalui studi literatur, ditemukan beberapa pandangan tentang konsep pemekaran wilayah, seperti yang peneliti kemukakan di bawah ini :

Pemekaran wilayah di Indonesia merupakan hasil dari pelaksanaan desentralisasi yang dikenal dengan istilah “*Big Bang Decentralization*”. Praktek desentralisasi di Indonesia periode 1999 sampai dengan 2003 dianggap sangat liberal, dimana daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya oleh pemerintah pusat, sehingga menyebabkan posisi pemerintah sangat kuat (Fitria Fitriani, Bert Hofman dan Kai Kaiser,2005:60).

Jika dilihat dari tujuannya, pemekaran daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya, dengan begitu diharapkan mereka dapat mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat yang

berada dalam wilayah tersebut sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan aspirasi masyarakat.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam proses pembentukan wilayah :

1. Cara Administratif : dengan cara ini, pembentukan daerah baru dapat dilakukan dengan persetujuan dari daerah induknya dengan melewati serangkaian uji kelayakan baik secara teknis, dan administratif oleh suatu badan pemerintah yang khusus mengurus pembentukan wilayah baru.
2. Insiatif legislatif : sebuah daerah otonom baru, dapat dibentuk atas usulan atau inisiatif dari badan legislatif. Ini merupakan proses pembentukan yang memotong jalur kewenangan eksekutif dan daerah induk, dimana juga diketahui bahwa setelah 30 hari berlalu keputusan tersebut menjadi sah, walaupun tanpa persetujuan Presiden sebagai eksekutif negara.

Selanjutnya Fitria Fitriani, Bert Hofman dan Kai Kaiser (2005:66) menjelaskan setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakangi terjadinya pemekaran wilayah, yakni :

1. Dispersi administratif yang disebabkan oleh wilayah yang terlalu luas dengan populasi yang tersebar menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
2. Preferensi terhadap homogenitas. Dimana masyarakat cenderung lebih nyaman berada dilingkungan yang homogen baik dilihat dari segi agama, etnis, bahasa, dan sebagainya
3. Pemberian Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil, hal ini juga merupakan salah satu alasan daerah untuk melakukan pemekaran. Mereka mengharapkan mendapatkan dana yang dapat dikelola secara mandiri untuk kepentingan daerahnya.
4. Birokratik dan *Political Rent Seeking*, akibat dari ketidak jelasan suatu kebijakan administratif ataupun peraturan perundang-undangan sehingga cenderung disalah gunakan.

Menurut Effendi (2008:2), Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan

pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah melalui:

1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan cakupan wilayah yang lebih kecil diharapkan dapat memperpendek rentang kendali sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi. Pemberian otonomi kepada daerah telah membuka ruang partisipasi masyarakat, hal ini dapat terlihat dengan dilaksanakannya pemilu pada dilakukan secara langsung oleh masyarakat, diikutsertakannya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan lain-lain ;
3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Pembentukan daerah otonom baru diharapkan dapat mengungkap potensi yang dimiliki daerah yang sebelumnya belum terungkap sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah;
4. percepatan pengelolaan potensi daerah. Dengan rentang kendali yang lebih kecil diharapkan dapat mengoptimalkan pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif.
5. peningkatan keamanan dan ketertiban. Dengan cakupan wilayah yang lebih kecil, memungkinkan suatu daerah untuk mengendalikan dan mengawasi potensi terjadinya pemberontakan maupun pergolakan yang ada di wilayahnya.

Apabila dirangkum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah menjadi populer saat ini dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :

1. Adanya keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih kecil, pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi

lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan pembentukan daerah otonom diharapkan dapat memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Hal mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Upaya pemekaran wilayah dinilai sebagai suatu jalan baru dalam mempercepat proses pembangunan daerah dengan cara peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan pemekaran wilayah tersebut sejalan dengan hasil kajian percepatan pembangunan daerah otonom baru yang dilakukan Bappenas (2005), dalam penelitian tersebut dijelaskan tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan berdemokrasi;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa, ada dua hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang *pertama* bagaimana pemerintah melaksanakannya, sejauhmana 'input' yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan masyarakat (terkait keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah). *Kedua* bagaimana dampaknya di masyarakat setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun. Hal ini mengacu pada hasil yang langsung diterima oleh daerah dan masyarakat sebagai dampak langsung

dari pemekaran daerah (terkait dengan perekonomian daerah dan pelayanan publik).

2.2.3 Perencanaan Strategik

2.2.3.1 Pengertian Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kegagalan perencanaan dalam sektor publik umumnya disebabkan karena adanya kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga yang terjadi justru malah bergeser dari tujuan yang ingin dicapai.

“Planning involves setting goals to address problems and issues, identifying alternatives courses that best address the goals, and monitoring the chosen course of action to ensure that the goals are met. Put simply, to plan is to apply foresight to action” (Meck, 2002 :7-9).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses penetapan langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses ini dilakukan identifikasi masalah dan juga alternatif penyelesaiannya. Pada intinya, perencanaan adalah menerapkan apa yang ingin dicapai ke dalam suatu tindakan.

Untuk dapat memahami pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa prinsip yang biasa digunakan dalam menjelaskan makna yang terkandung didalamnya, prinsip-prinsip tersebut adalah : (IICA, 1996 : 4)

a. *Planning is a continuous process*

perencanaan merupakan proses yang terus menerus. Hal ini bertentangan dengan persepsi yang selama ini ada, bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas yang pasti yakni berupa agenda kegiatan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran untuk kemudian disimpan dan baru akan dibuka kembali pada saat penyusunan agenda pada tahun berikutnya. Dalam sebuah kerangka operasionalisasi, proses perencanaan bersifat dinamis yang terdiri atas : 1) tinjauan berkala atas tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, 2) pemeriksaan rutin terhadap kegiatan agar sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 3) mengevaluasi dan memantau proses implementasi dari waktu ke waktu.

b. Socio economics and political influence

Proses perencanaan sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan juga ideologi politik suatu negara. Perencanaan yang baik disusun berdasarkan sebuah analisa sosial ekonomi agar sesuai dengan kebutuhan maupun sasaran organisasi. Selain itu Perencanaan harus dapat mengintegrasikan kepentingan kelompok yang dituju karena, kelayakan dan efisiensi perencanaan sangat bergantung pada posisi politik dan usahanya dalam mendukung perencanaan.

c. Defining clear planning goals/objectives

Keberhasilan perencanaan juga sangat ditentukan oleh integrasi dan koordinasi antara organisasi pusat dan sektor, oleh karena itu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tingkatan perencanaan haruslah jelas, nyata dan terukur.

d. Policy analysis and priority setting for the planning process

Penentuan prioritas merupakan bagian integral dari proses perencanaan, hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi sehingga diperlukan pembagian prioritas kegiatan.

e. A systematic and sequential process

Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan, perencanaan haruslah disusun secara sistematis dan berurutan kedalam suatu siklus perencanaan, hal ini dilakukan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

f. The need of data and Information

Untuk dapat menjamin keberhasilan perencanaan, maka dibutuhkan data-data yang relevan dan akurat terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Data tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan.

Pada dasarnya perencanaan adalah proses menetapkan urutan tindakan dalam rangka memecahkan masalah di masa yang akan datang. Proses penyusunan rencana terdiri dari beberapa tahapan (Glasson, 1974 : 5), yakni : Mengidentifikasi masalah berdasarkan data – data yang relevan dan akurat, memformulasikan tujuan dan sasaran berdasarkan permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi organisasi pada masa yang akan datang, membuat proyeksi terhadap situasi pada masa yang akan datang, lalu kemudian membuat suatu rencana utama dan rencana definitif.

2.2.3.2 Perencanaan Strategik

Perencanaan strategik awalnya digunakan oleh organisasi bisnis yang memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan. Perencanaan strategik baru diterapkan pada sektor publik pada awal abad ke-20. Penyusunan perencanaan di lakukan dengan strategi yang diterapkan pada sektor privat, kemudian disusul dengan lahirnya teori manajemen baru setelah perang dunia ke-2 yang kemudian jmelahirkan suatu paradigma baru yang dikenal dengan sebutan “ Strategic Planning”.

Strategi adalah arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Johnson,Scholes, and Whittington,2005:9). Strategi dapat juga diartikan sebagai perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi (Miner dan Steiner, 1986 :18).

Secara khusus mereka mengemukakan bahwa strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi dengan memperhatikan kekuatan eksternal dan internal, sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan eksternal adalah potensi sumberdaya yang dimiliki, berapa jumlahnya, dan bagaimana mutu atau kualitasnya, sedangkan kekuatan eksternal meliputi lingkungan politik, sosial, ekonomi (1986 :19).

- Lingkungan Politik : dengan adanya otonomi daerah dapat mendukung daerah dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi yang dimilikinya.

- Lingkungan Ekonomi: adanya globalisasi ekonomi dan pasar bebas dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memasarkan komoditas daerahnya sampai ke mancanegara.
- Lingkungan Sosial : kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan daerah dalam meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan langkah utama dalam menyelenggarakan manajemen strategis, sedangkan manajemen strategis merupakan pendekatan yang sistematis dan menekankan partisipasi dari semua stakeholders dalam menetapkan tujuan, prioritas, dalam mendefinisikan sasaran yang terukur dan *benchmarks*, mematangkan strategi dan memobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menyelesaikan aktivitas, dan memonitoring kinerja dan revisi dan menyesuaikan atas tujuan, sasaran dan aktifitas strategis (Wilopo,2006 :1). Keterlibatan semua stakeholders dalam proses perencanaan strategis sangat diperlukan dalam rangka memahami aspirasi yang berkembang dimasyarakat, khususnya perencanaan strategis bagi sektor publik.

Perencanaan dapat digunakan untuk menguji dan mendukung strategi tetapi bukanlah merupakan strategi. Strategi merupakan upaya dalam memposisikan organisasi di masa depan dengan memberikan daya ungkit melalui pemberdayaan aset-aset yang dimiliki untuk menciptakan aset baru yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Wilopo,2006 :4).

Perencanaan strategis adalah suatu upaya dalam menghasilkan keputusan dan tindakan yang menjadi dasar dalam membentuk dan mengarahkan suatu organisasi terhadap apa yang harus dilakukannya, dan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Perencanaan strategik berdasarkan fokusnya terbagi menjadi dua, yakni fokus kepada organisasi dan fokus kepada fungsi. Pada perencanaan strategik yang berfokus pada organisasi, sebagian besar keputusan ditentukan oleh anggota organisasi atau biasa disebut dengan “orang dalam”, dengan begitu lebih mudah bagi organisasi untuk mencapai konsesnsus dalam menentukan dan menetapkan hal-hal penting, walaupun sebagian informasi yang berhasil dikumpulkan diperoleh dari luar organisasi. Pada perencanaan strategik yang berfokus pada fungsi, biasanya pihak pengambil keputusan atau *key decision makers* adalah pihak luar, dengan begitu fokus perhatiannya lebih ditekankan

pada bagaimana sebuah organisasi memperoleh pikiran dan tindakan dalam sebuah jaringan antar-organisasi di mana tidak ada satu orang, kelompok, organisasi, institusi yang memiliki wewenang lebih besar dari lainnya (Bryson,1995 :5).

Peran perencanaan strategik menjadi sangat penting oleh karena adanya perubahan lingkungan seperti perubahan demografis, perubahan nilai-nilai dan berkembangnya aktivis kelompok kepentingan di masyarakat, privatisasi, pergantian pemerintahan dan faktor lainnya, oleh karena itu, organisasi dituntut untuk dapat beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut dengan mulai berfikir secara strategis, dan menggunakan segenap pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemudian mengembangkan pemikiran yang diperlukan sebagai dasar bagi penerapan strategi yang akan digunakan. Selain itu perencanaan strategik juga memberikan manfaat bagi organisasi, yakni yang *pertama* adalah promosi pemikiran dan tindakan strategik dengan mengumpulkan data-data sehubungan dengan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sebagai dasar penyusunan arah dan tujuan organisasi dan prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Manfaat yang *kedua* adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Perencanaan strategis memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang genting dan mengancam keberlangsungan organisasi, dan membantu organisasi dalam menghadapi dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Manfaat yang *ketiga* adalah meningkatkan kinerja organisasi. Dengan berfikir dan bertindak strategik maka organisasi telah memperhitungkan apa yang harus dilakukan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif.

Perencanaan strategis mengacu pada perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan. Proses perencanaan strategis setidaknya mencakup tiga tahap (David,2004) yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler, 2000).

Tahap perumusan mencakup kegiatan yang mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan, membuat alternatif strategi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan menetapkan sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Tahap pelaksanaan disebut tahap tindakan. Melaksanakan strategi berarti mendorong atau memobilisasi segenap sumber daya manusia untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Tahap ini menuntut disiplin, komitmen, dan pengorbanan setiap personil yang terlibat.

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam rencana strategis. Pengambil kebijakan harus mengetahui alasan strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pokok dalam tahap evaluasi adalah :

- Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan; apakah faktor-faktor tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan ataupun justru menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- Mengukur kinerja, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dengan hasil yang dicapai;
- Melakukan tindakan korektif. Hal ini dapat dilakukan setelah mengukur kinerja organisasi, jika hasil yang ditunjukkan dalam evaluasi kinerja tidak sesuai dengan harapan yang ingin dicapai maka perlu diambil tindakan korektif, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sama dimasa yang akan datang sekaligus guna memperbaiki kinerja organisasi.

2.2.3.2 Penentuan Prioritas dalam Perencanaan Strategis

Setiap organisasi umumnya memiliki pernyataan yang jelas mengenai prioritas program yang ingin dicapai dan diperbarui setiap jangka waktu tertentu.

Prioritas tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan yang juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak organisasi yang tidak memiliki prioritas yang jelas hingga organisasi tersebut mengalami masalah dan krisis. Penentuan prioritas merupakan proses mengidentifikasi dan menentukan aktivitas yang sangat penting dalam sebuah organisasi.

Penentuan prioritas perlu dilakukan dengan memahami sumber- sumber daya yang bermanfaat untuk mencapai hasil (*outcomes*) dan pengaruh (*impact*) yang diharapkan (Dutweiler,2005). Ketersediaan sumber daya dapat menjadi faktor utama dalam penentuan prioritas. Prioritas disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya, penyusunan prioritas akan memperhatikan masalah-masalah dasar yang dihadapi maupun faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akar permasalahan yang dihadapi menjadi modal utama bagi pengambil keputusan, khususnya yang terkait dengan masalah fundamental. Selain itu, penyusunan prioritas suatu program perlu dibuat dengan bekal pemahaman mengenai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai hasil dan dampak yang diinginkan. Sumber daya dapat diperoleh dari dalam daerah, di luar daerah, nasional, atau bahkan internasional. Ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dapat menjadi faktor utama dalam memilih prioritas program yang akan dikembangkan. Tanpa pemahaman mengenai potensi dan kondisi sumber daya yang dimiliki, prioritas tidak akan dilakukan dengan tepat. Efektifitas penentuan prioritas terkait erat dengan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang

Penentuan prioritas dipandang penting dalam rangka menjaga fokus perencanaan pada hal-hal yang menjadi prioritas utama selain itu prioritas juga diperlukan untuk mengawasi agar penggunaan sumber daya langka dapat lebih efektif dan juga untuk membangun komunikasi mengenai aktivitas antar *stakeholder* dalam rangka menghubungkan kebijakan dan tujuan ekonomi sosial pemerintah.

Prioritas berfungsi untuk memudahkan pengambilan keputusan, hal ini merupakan suatu proses yang kompleks. Seseorang tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sesuai untuk semua kebutuhan. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam penetapan prioritas perlu mengetahui beberapa pendekatan utama dan kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penetapan prioritas, sekaligus bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut (Dutweiler, 2005). Pendekatan yang tepat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : perlunya mengetahui seberapa eksplisit identifikasi prioritas dalam mempersiapkan rencana kerja (*work plan*), sampai seberapa jauh prioritas yang telah disusun merepresentasikan prioritas organisasi secara menyeluruh, dan apakah prioritas organisasi mencakup prioritas proyek atau program atau keduanya. Seringkali penyusunan prioritas hanya memperhatikan program internal dan mengabaikan prioritas antar program. Selain itu dalam menyusun prioritas juga perlu diketahui seberapa jauh setiap pihak mampu memahami dan menghargai proses yang telah dilakukan untuk menetapkan prioritas, bagaimana kajian dan pembaruan (*up date*) prioritas, sampai seberapa jauh penerapan pendekatan rasional dalam penyusunan prioritas, dan apakah terdapat fokus pada kebutuhan masyarakat yang utama sebagai penentu kunci dalam penyusunan prioritas, Dalam menentukan prioritas.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga perlu ditentukan prioritas terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya pada daerah baru yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks dan banyak keterbatasannya. Untuk dapat menyusun prioritas pembangunan yang efektif dan efisien, terlebih dahulu harus dikenali faktor-faktor internal dan eksternal dari lingkungan instansi tersebut. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus meliputi: 1) pernyataan visi, misi strategik, dan faktor-faktor

keberhasilan organisasi, 2) rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000: 44)

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh karyawan dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan, mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Analisis Strength, Weaknesses, Opportunity and Threats (SWOT) merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran situasi strategis dari sebuah Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) . Analisis ini didasarkan

pada prinsip strategi yang menghasilkan keserasian antara kemampuan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan dengan situasi eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Kekuatan (Strength) UKE merupakan segala sesuatu yang menjadikan UKE memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya dengan baik sehingga tujuan UKE tersebut tercapai. Sedangkan kelemahan (Weaknesses) UKE adalah segala sesuatu yang menyebabkan UKE “pincang” dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tujuan UKE tidak tercapai.

2.2.3.2.1 Proses Penyusunan Prioritas yang Efektif

Karakter organisasi (struktur, budaya, dan sejarah) sangat berpengaruh terhadap penyusunan prioritas. Selain itu, proses dokumentasi prioritas program dan kondisi pada saat penyusunan prioritas juga akan mempengaruhi penyusunan prioritas yang efektif. Adapun beberapa ciri proses penyusunan prioritas yang efektif adalah (Duttweiler, 2004):

1. Mulai dari program yang dibutuhkan, bukan dari berapa jumlah dana yang dimiliki. Jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah “apa yang perlu kita lakukan” bukan “kegiatan apa yang dapat kita biayai”. Hal ini penting sekali dilakukan dalam rangka memutuskan prioritas kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif.
2. mengkomunikasikan perlunya penetapan prioritas dan berfokus pada masa depan organisasi;
3. klarifikasi peranan (*role*) dan aturan (*rule*);
4. mulai dari apa yang telah ada dan sumber daya yang telah dimiliki, dalam rangka mencapai tujuan, suatu organisasi harus dapat mengenali potensi yang dimilikinya, sehingga dapat dipergunakan seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
5. mendorong kreatifitas;
6. mencari tahu apa yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat;
7. melibatkan sumber daya manusia dari luar/eksternal;
8. mengidentifikasi persetujuan (*agreement*) dan ketidaksetujuan (*disagreement*) mengenai prioritas yang ditetapkan. Dalam suatu proses perencanaan yang demokratis, pendapat semua pihak harus dihargai, agar

tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditinggalkan. Untuk itu diperlukan adanya suatu konsensus diantara para anggota organisasi;

9. identifikasi program-program yang berkaitan dengan organisasi lain;
10. penggunaan kriteria yang kredibel dalam penentuan prioritas akhir. penentuan kriteria terhadap prioritas kegiatan harus dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi;
11. memastikan bahwa organisasi secara formal mengadopsi pernyataan prioritas yang telah diputuskan;
12. diperlukan kompetensi sumber daya manusia (namun jangan sampai kompetensi tersebut yang mengarahkan prioritas);
13. adanya alokasi waktu yang cukup antara penyusunan prioritas dan penetapan prioritas tersebut sehingga memungkinkan penyusunan skenario alternatif.

2.2.3.2.2 Kendala dalam Penyusunan Prioritas

Terdapat beberapa alasan mengapa organisasi pada umumnya mengalami kesulitan dalam menetapkan prioritas. Menurut Drucker (1973), hal ini utamanya banyak terjadi publik, karena melibatkan kepentingan banyak pihak. Bryson (1988) menyebutkan empat masalah utama yang menjadi hambatan dalam mencapai perencanaan strategik yang efektif. Keempatnya memiliki kaitan erat dengan penentuan prioritas program. Keempat masalah itu adalah:

1. *Human Problem*, kesulitan untuk memusatkan perhatian personil kunci (*key people*) terhadap masalah, keputusan, konflik, dan kebijakan utama. Tantangan yang dihadapi untuk mengatasi masalah ini adalah bagaimana menentukan prioritas organisasi secara imperatif dan meminta setiap individu untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing hingga kerangka yang lebih luas selesai disusun. Untuk mengatasi *human problem*, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:
 - Menciptakan konsensus mengenai apa yang akan dicapai melalui penetapan prioritas dan alasannya;

- Melibatkan para pengambil keputusan dalam menentukan proses dan kriteria prioritas untuk memastikan rasionalitas dan kejelasan prioritas tersebut;
 - Mengidentifikasi kekuatan dari berbagai sudut berbeda
 - Memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mencerna informasi yang diberikan dan memberi masukan sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap keputusan yang akan diambil;
 - Berhati-hati dalam mempekerjakan staf yang akan mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi. Sediakan pelatihan apabila diperlukan;
 - Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan peran mereka secara berkesinambungan.
2. *Process Problem*, kesulitan dalam mengelola informasi dan ide dalam proses penentuan prioritas. Untuk mengatasi *process problem* dapat dilakukan beberapa hal, antara lain :
- Penentuan prioritas harus sangat spesifik untuk mengurangi multi-interpretasi;
 - Adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengekspresikan dan memberikan sejumlah alternatif yang masuk akal;
 - Informasi kunci harus disediakan sebelum penentuan keputusan;
 - Hati-hati agar tidak membuang terlalu banyak waktu dalam melakukan analisis maupun terlalu terburu-buru mengejar tenggat waktu;
 - Secara aktif menciptakan suasana yang membantu orang untuk memiliki pandangan luas dan memiliki paradigma masing-masing karena informasi eksternal mungkin sangat berguna.
3. *Structural Problem*, kesulitan dalam mengelola sebagian atau keseluruhan hubungan yang ada dalam organisasi. Tantangan yang harus dihadapi dalam mengatasi masalah ini adalah bagaimana untuk menentukan prioritas sesuai dengan prioritas organisasi atau asosiasi secara lebih luas. Hal ini merepresentasikan interpretasi konsisten terhadap visi dan misi. Dengan demikian, suatu organisasi dapat melakukan penentuan prioritas dengan sangat baik dalam lingkup program maupun antar program.

4. *Institutional Problem*, kesulitan dalam menerjemahkan prioritas ke dalam aksi atau aktivitas yang riil :
- Adanya komitmen dalam mengimplementasikan hal yang telah disepakati maupun penyesuaian atau perubahan yang dilakukan.
 - Perlu adanya proses pencocokan (*fitting*) antara pengetahuan dan keahlian dengan tugas yang diberikan ke setiap individu.
 - Implementasi program disesuaikan dengan kekuatan yang dimiliki.
 - Rencana implementasi didefinisikan secara jelas.
 - Prioritas dilengkapi dengan deskripsi posisi, alokasi waktu, rencana implementasi, dan penghargaan terhadap prestasi kerja

2.2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional (Nuraini, 2010). Jika pembangunan daerah gagal maka pembangunan nasional juga dapat dikatakan tidak berhasil. Demi tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah, maka pembangunan daerah harus memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan corak pembangunan yang berbeda pula, kebijakan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah tidak menjamin membawa keberhasilan untuk diterapkan di daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan dibutuhkan suatu perencanaan yang sesuai dan tepat dengan kondisi, potensi dan tantangan yang ada di suatu daerah.

Hakekat perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat orientasi ke masa depan dalam proses memecahkan masalah. Perencanaan daerah walaupun secara umum dapat diartikan sama dengan definisi di atas, namun memiliki bentuk yang berbeda dari perencanaan-perencanaan lainnya karena dalam perencanaan daerah secara spesifik dibentuk dengan memperhatikan kedudukan daerah diantara hubungannya dengan pemerintah pusat.

Untuk dapat memahami konsep perencanaan pembangunan daerah, terlebih dulu peneliti akan membahas konsep tentang daerah. Ada dua pandangan tentang daerah, yang pertama pengertian daerah secara *objective* dan yang kedua secara *subjective*. Secara *subjective* daerah dipandang sebagai suatu metoda untuk

menklasifikasikan atau membagi suatu wilayah, sedangkan secara objective melihat daerah sebagai suatu organisme yang dapat diidentifikasi atau dipetakan (Glasson,1975 :19). Pandangan *subjective* pada praktiknya lebih dapat diterima oleh masyarakat, daerah dilihat sebagai suatu alat untuk mendeskripsikan suatu wilayah, dan membaginya kedalam criteria tertentu, untuk tujuan tertentu pula. Pandangan *objective* biasanya hanya digunakan oleh para akademisi. Dimana secara alami daerah terbentuk dengan empat kriteria yakni – konfigurasi lahan, iklim, tanaman, dan populasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sukirno (1976:2) Daerah ditinjau dari sudut penyebarannya dapat dibedakan dalam tiga pengertian :

1. *Daerah homogenous*, dalam pengertian ini daerah dilihat sebagai suatu ruang (*space*) dimana kegiatan ekonomi yang berlaku diberbagai pelosok ruang tersebut memiliki sifat yang sama (dapat dilihat dari suku bangsa, agama, atau struktur ekonominya. Batasannya ditentukan oleh titik-titik dimana kesamaan sifat-sifat tersebut sudah mengalami perubahan.
2. *Daerah nodal*, pengertian daerah ini sekali digunakan dalam analisa ekonomi ruang, dimana daerah diartikan sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
3. *Daerah administrasi atau daerah perencanaan*, pembagian daerah dalam pengertian ini dibagi berdasarkan pembagian administrative bagi suatu Negara. Daerah diartikan sebagai suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu (propinsi, kota, kabupaten, desa dan sebagainya).

Dalam konteks pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, pengertian ketiga merupakan pengertian yang sangat tepat digunakan dengan alasan bahwa dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan, akan lebih mudah bila suatu negara dibagi kedalam beberapa daerah kedalam satuan administratif yang lebih kecil, sehingga mempermudah proses analisis dan pengumpulan data guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengertian pembangunan dapat diartikan sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (dinamis). Proses pembangunan adalah

merupakan suatu perubahan sosial budaya, yang sangat tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya agar dapat terus bergerak kearah yang lebih baik (Tjokroamidjojo, Mustopadidjaja, 1991:1). Pada intinya pembangunan adalah suatu usaha atau perubahan dari suatu keadaan kearah kondisi yang dianggap lebih baik (diinginkan). Dalam rangka usaha menuju keadaan yang lebih baik (pembangunan) tersebut, pemerintah harus menyusun sebuah rencana pembangunan yang strategis dan komprehensif, yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembangunan ekonomi, perencanaan juga dilakukan di dalam suatu pola pembangunan dimana arah dan kegiatan pembangunan diserahkan terutama pada kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dengan mekanisme pasar dan mekanisme harga.

Pembangunan daerah dapat juga mengacu pada kapasitas sebuah daerah dalam memproduksi barang dan jasa, dan kapasitas masyarakatnya dalam menghasilkan pemasukan. Sementara itu disparitas pembangunan daerah mengacu pada perbedaan kapasitas antar daerah dalam menyediakan peluang terhadap pendapatan penduduknya. Sebuah kebijakan pembangunan daerah biasanya diupayakan untuk mengurangi disparitas tersebut (Polese dalam Button, 2006 : 33).

Peran pemerintah melalui perencanaan lebih bersifat pengarahannya pertumbuhan dan pembangunan, sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan sektor swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Peran pemerintah pada dasarnya adalah sebagai fasilitator dalam hal-hal yang tidak dapat dilangsungkan oleh masyarakat. Namun begitu peran pemerintah sangatlah penting guna mengatur penggunaan sumber-sumber pembangunan secara efisien dan efektif, dan mengarahkan pembangunan bagi kepentingan dan keadilan sosial bagi masyarakat, selain tu peran pemerintah sangat penting dalam rangka mendobrak kearah perubahan struktural ekonomi dan sosial masyarakat (Tjokoroamidjojo,1993:8).

Dalam suatu proses pembangunan, akan lebih lengkap bila mempertimbangkan corak kegiatan ekonomi ditinjau secara sektoral dan makro yang meliputi analisa faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, peran berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi daerah,

masalah-masalah perekonomian daerah, dan corak strategi dasar maupun kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan daerah Sukirno (1976:4). Lebih lanjut Sukirno mengemukakan, sesuai dengan corak dari analisa ekonomi regional maka pengertian pembangunan daerah dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, (1976 :5) pengertian *pertama*, pembangunan daerah dimaksudkan untuk menyatakan tentang pembangunan dalam suatu daerah, pengertian yang *kedua* pembangunan daerah merupakan pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayah atau yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan wilayah. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara pengertian wilayah dan daerah. Pengertian wilayah yang dianut dan dipahami dalam sistem pemerintahan di Indonesia menunjuk pada area dalam lingkungan suatu negara yang merupakan bagian integral tidak terpisahkan secara administratif dari negara tersebut, karenanya wilayah disebut juga wilayah administratif yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sedangkan pengertian daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas tertentu dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsanya sendiri.

Pembangunan berencana merupakan suatu usaha yang rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang, sedangkan dalam penyusunan strategi perencanaan pembangunan tersebut perlu memperhatikan kondisi masyarakat, terutama faktor-faktor keterbelakangan dan hambatan-hambatan dalam pembangunan. Dalam rangka menanggapi hambatan tersebut, perlu dilakukan pengenalan masalah-masalah secara menyeluruh dari semua bidang kehidupan (sosial,ekonomi, politik,budaya), lalu kemudian dirumuskan berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan. Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan didasarkan pada alasan-alasan di bawah ini (Tjokroamidjojo, 1993:9).

1. Perencanaan dapat dijadikan arah kegiatan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan;
2. Melalui perencanaan diperoleh suatu perkiraan/prediksi terhadap hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi, sehingga ketidakpastian dapat dibatasi sekecil mungkin;

3. Melalui perencanaan, dapat disusun alternatif pemecahan masalah, atau cara yang terbaik dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.
4. Dalam perencanaan, disusun skala prioritas, yakni memilih urutan-urutan pemecahan masalah dari segi pentingnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
5. Dengan adanya perencanaan maka diperoleh suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi.

Dari konsep di atas, maka dapat disimpulkan arti dan fungsi perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu;
2. Perencanaan adalah suatu cara bagi mana mencapai *maximum output* dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif;
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa?;
4. Albert watson dalam Tjokroamidjojo (1993) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terarah, agar pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan”;
5. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas” Riyadi dan Bratakusumah (2004:7).

“regional planning is the process of formulating and clarifying social objectives in the ordering of activities in supra-urban space.” (Glasson, 1974 :8)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan daerah merupakan suatu proses merumuskan dan memperjelas tujuan-tujuan pembangunan yang berkembang didalam masyarakat lalu diurutkan sesuai dengan urgensinya. Dalam penyusunan perencanaan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut :

- Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencanapembangunan daerah.
- Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Macam-macam Perencanaan Daerah dilihat dari Segi Waktu :

- **Perencanaan Jangka Panjang (long Term Planning)**
Perencanaan jangka panjang merupakan arah pembangunan, yang berisi Visi, Misi dan Kebijakan pembangunan suatu daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Visi : Cita-cita yang akan menjadi arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang, yang disesuaikan dengan kemampuan suatu daerah. Visi bukan semata-mata cita-cita yang tidak mungkin dicapai, oleh karena itu visi harus bersifat logis, rasional dan dapat dicapai.
Misi : Upaya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi haruslah disusun atau dirumuskan dengan memperhatikan visi. Rumusan

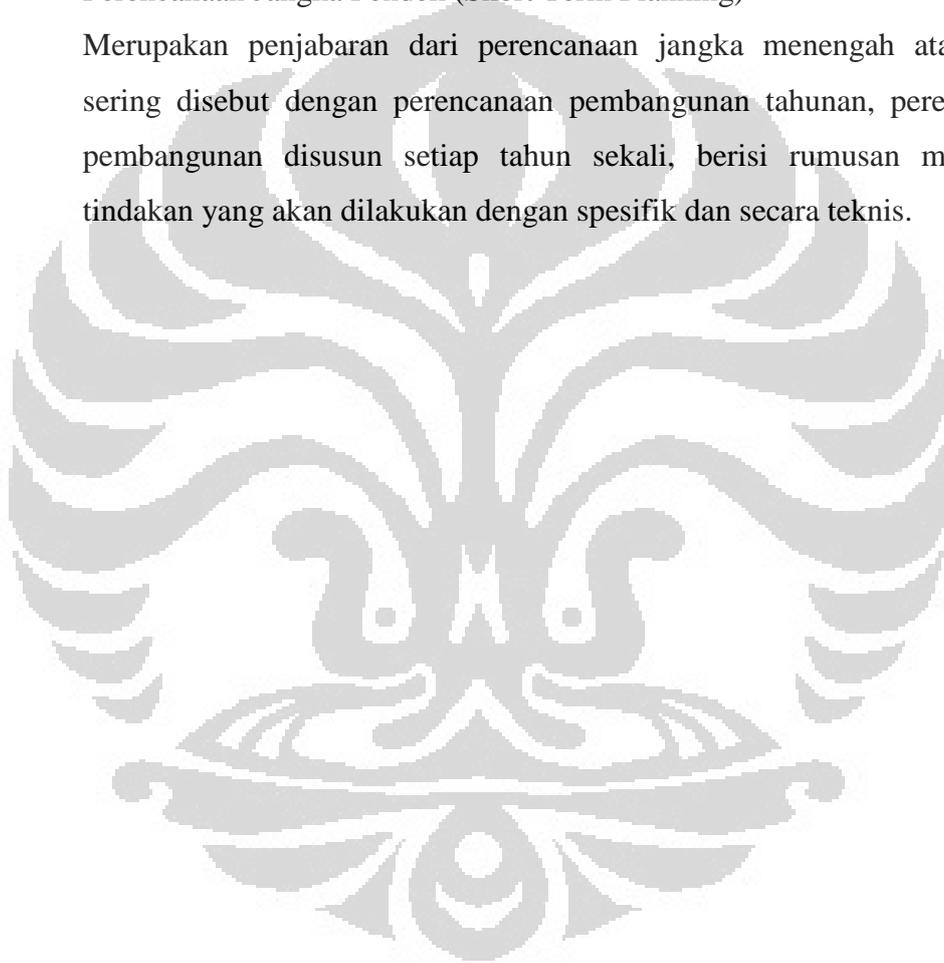
misi hendaknya berupa strategi atau tindakan yang akan dilakukan, namun bersifat general (umum).

- **Perencanaan Jangka Menengah (Medium Term Planning)**

Merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan kurun waktu (biasanya 4-6 tahun), berisi rumusan misi atau tindakan yang akan dilakukan dengan lebih detail dari perencanaan jangka panjang.

- **Perencanaan Jangka Pendek (Short Term Planning)**

Merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah atau lebih sering disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan pembangunan disusun setiap tahun sekali, berisi rumusan misi atau tindakan yang akan dilakukan dengan spesifik dan secara teknis.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan hal penting yang menjadi landasan dalam melakukan suatu penelitian. Pemilihan metode yang benar akan sangat bermanfaat dalam menentukan hasil penelitian itu sendiri. Untuk itu, dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini, serta alasan yang mendasari pemilihan metode tersebut dan juga keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, hal ini sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif yang disampaikan oleh Prasetya Irawan dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-Ilmu Sosial” , yakni : “merekonstruks realistas makna sosial budaya”, peneliti berusaha untuk mendapatkan makna terhadap suatu realitas sosial yang dalam hal ini adalah mengenai relevansi atau keterkaitan program pembangunan suatu daerah induk dalam kerangka pemekaran wilayah dengan kondisi faktual daerah otonom baru yang dihasilkannya. Pendekatan kualitatif bersifat induktif dan idiografik. Induktif berarti bergerak dari “bawah” dengan mencari data-data yang lengkap guna mendapatkan pola, prinsip, hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini didasarkan pada pola yang bersifat khusus kemudian mengarah pada pola yang bersifat umum (*general*) guna mencari kesamaan-kesamaan dengan penelitian lain yang sejenis. Idiografik berarti dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperhatikan semua faktor-faktor atau gejala-gejala yang ada karena semua hal akan sangat bermanfaat dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel purposif, dimana sampel dipilih secara sengaja (purposif) yakni Kabupaten Buru Selatan yang letaknya di wilayah Timur Indonesia dimana banyak ditemukan daerah otonom baru.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, Creswell (1974:71) membagi penelitian kualitatif menjadi empat, yakni *grounded research* (mengungkap sesuatu) , *etnografi* (memahami suatu gejala) , *case study* (memahami proses yang terjadi pada suatu lembaga/kelompok/individu), dan *fenomolog* (mendeskripsikan atau memaparkan pengamalaman). Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian *case study* dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses perencanaan pembangunan pada Kabupaten Buru Selatan yang merupakan daerah otonom baru (hasil pemekaran) dan bagaimana relevansinya terhadap prioritas pembangunan yang Kabupaten Buru sebagai kabupaten induknya.

Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross-sectional* karena penelitian ini hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni pada kurun waktu 2008 sejak disahkannya Kabupaten Buru Selatan sebagai daerah otonom baru melalui penetapan undang-undang No.32 Tahun 2008, sampai dengan tahun 2011.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana peneliti menggunakan obeservasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan berdasarkan manfaat penelitiannya, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian murni yang diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara, serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada guna menemukan konsep atau teori baru.

3.3 Metode dan Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam menentukan ketepatan hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara langsung dengan sumber-sumber yang peneliti anggap dapat memberikan banyak informasi kepada peneliti, sedangkan data sekunder yang peneliti butuhkan adalah dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Data Statistik, Peta Wilayah Pulau Buru, dan dokumen lain yang

dapat memberikan informasi berharga bagi penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara mendalam dan studi pustaka, seperti yang akan peneliti jelaskan di bawah ini :

3.3.1 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang juga tidak mudah digunakan. Tetapi jika dilakukan dengan baik, maka teknik ini dapat memberikan data-data yang kita butuhkan secara menyeluruh atau mendalam. Pihak-pihak yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Kepala Biro Perencanaan pada Kantor Bappeda Kabupaten Buru Selatan;
3. Direktur Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Anggota Dewan (DPRD) Kabupaten Buru Selatan;
5. Staf Bappeda Kabupaten Buru Selatan;
6. Masyarakat Buru Selatan;

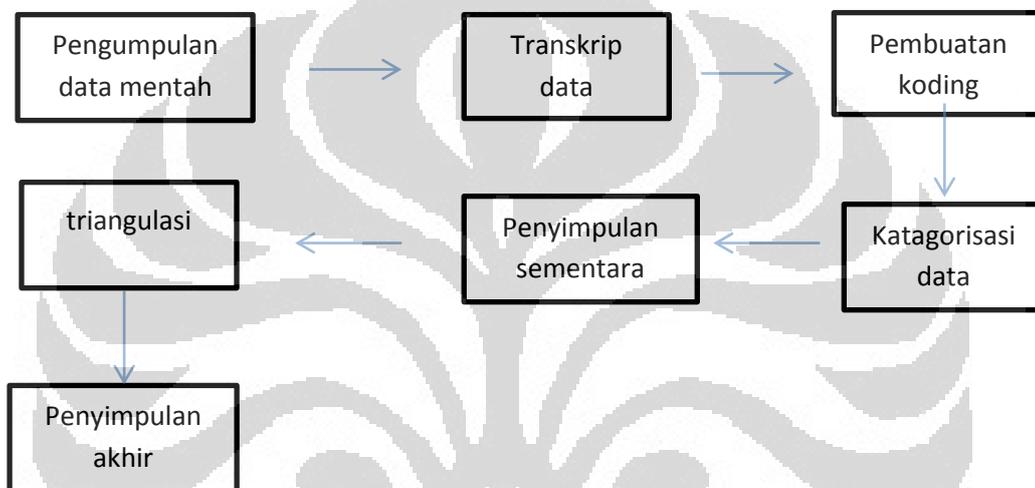
Adapun informasi yang berusaha digali dari wawancara tersebut nantinya adalah, apa strategi yang dimiliki kabupaten Buru Selatan sebagai DOB dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, apa saja indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan, permasalahan apa saja yang dihadapi Kabupaten Buru Selatan Saat ini, Apa saja perubahan (ke arah yang lebih baik) yang sudah dirasakan oleh masyarakat Buru Selatan setelah dimekarkan, dan bagaimana keterkaitan program pembangunan kabupaten Buru Selatan dengan kabupaten induknya yakni Kabupaten Buru Selatan, dan lain-lain.

3.3.2 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data-data sekunder. Studi dokumen ini peneliti lakukan dengan cara membaca literatur atau artikel terkait dengan penelitian, baik melalui media massa, buku, dan internet.

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Irawan, 2007 :70), analisis data adalah proses mencari dan mengatur sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang berhasil dikumpulkan. Di bawah ini adalah proses atau prosedur analisis data pada penelitian kualitatif :

Gambar 1. Proses analisis data kualitatif



3.3.4 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Buru Selatan, di Wilayah Maluku dengan alasan sebagai berikut :

1. Kasus pemekaran wilayah banyak terjadi di luar Pulau Jawa khususnya di wilayah timur Indonesia yakni wilayah Maluku dan Papua;
2. Kabupaten buru merupakan salah satu daerah tertinggal, yang memiliki permasalahan pembangunan yang sangat kompleks;
3. Luas Pulau Buru sangat besar sehingga memang tepat untuk dilakukan pemekaran;
4. Pada saat ini Kabupaten Buru Selatan sedang menyusun RPJM Daerahnya sehingga tepat untuk dijadikan objek penelitian.

3.3.5 Tahap Penelitian

Sedangkan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemkan oleh Tjetjep Reheni R. yang berjudul Analisis Data Kualitatif (1992), tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

1. Merumuskan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan didasarkan pada adanya fenomena menarik yang muncul sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah, yakni fenomena pemekaran wilayah yang marak terjadi belakangan ini, sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai fenomena tersebut terutama mengenai perencanaan pembangunan daerah otonom baru (hasil pemekaran);
2. membangun kerangka konseptual. Sebagai tahap awal penelitian, peneliti berusaha memahami realitas sosial “fenomena pemekaran wilayah “ tersebut melalui konsep-konsep yang sudah ada yakni konsep pemekaran wilayah, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategik. Ketiga konsep tersebut sangat bermanfaat bagi peneliti dalam memahami objek yang ingin diteliti;
3. pemilihan sampel dan pembatasan penelitian. Sampel ditentukan secara purposif, sesuai dengan ketentuan pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif, sedangkan batasan penelitian ditentukan sesuai fokus penelitian ini yakni perencanaan pembangunan daerah, khususnya daerah otonomi baru (hasil pemekaran). Sebuah daerah otonom baru biasanya dihadapkan dengan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak dapat dijawab dalam waktu bersamaan, oleh karena itu diperlukan suatu strategi/perencanaan terhadap prioritas pembangunan daerah, untuk menemukan potensi yang dapat dijakadkan daya ungkit sehingga dapat menumbuhkan perkembangan/peningkatan pada sektor lainnya dalam rangka mencapai tujuan –tujuan pembangunan;
4. instrumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti merupakan intrumen utama dalam penelitian ini, oleh karena itu Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

5. mengumpulkan Data. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data : observasi, wawancara mendalan, dan studi pustaka;
6. menganalisis data;
7. membuat matriks dan pengujian kesimpulan;

3.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis dihadapkan dengan beberapa keterbatasan, yang pertama jauhnya lokasi Kabupaten Buru Selatan yang sangat jauh dan terisolasi, dan cuaca yang sangat buruk menyebabkan transportasi menjadi sangat terbatas, sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data-data primer.



BAB 4

RELEVANSI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU BERDASARKAN KONDISI FAKTUALNYA

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Buru Selatan merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Buru yang terbentuk pada tahun 2008 lalu berdasarkan Undang – undang No. 32 Tahun 2008. Secara geografis Buru Selatan terletak pada 2°30' dan 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' dan 127°00' Bujur Timur. Kabupaten Buru Selatan dibatasi oleh Kabupaten Buru di sebelah utara, Laut Banda disebelah selatan, Laut Buru di sebelah barat dan Selat Manipa di sebelah Timur. Secara geografis, letaknya sangat strategis karena berada diantara tiga kota penting di Indonesia Timur yakni Makasar, Manado dan Ambon, selain itu juga Buru Selatan berada pada lintasan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) III A, B, C, yakni diantara Laut Sewu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Timor, dan Laut Arafuru, hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pengembangan Kabupaten Buru Selatan kedepannya.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan, oleh karena dikelilingi oleh Laut Seram dan Laut Banda pada bagian utara dan selatan, Buru Selatan berada pada posisi arfura dimana energi gelombang sangat tinggi terjadi pada musim barat maupun musim timur, dengan arus laut dari selatan yang sangat kuat pada musim timur yang berlangsung Juni sampai September, kondisi tersebut merupakan suatu tantangan bagi Buru Selatan dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut karena pada saat musim timur curah hujan sangat tinggi, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan pembangunan dan perawatan infrastruktur .

Luas keseluruhan Kabupaten Buru selatan adalah 6.663 km² dengan luas daratan sebesar 5.060 km² dan luas perairan sebesar 1.603 km². Pada perairan Buru Selatan terdapat daratan kepulauan yang berjumlah sebelas pulau dengan

tiga pulau berpenghuni dan delapan pulau tidak berpenghuni yang berada di gugus Kepulauan Ambalau. Kabupaten Buru Selatan secara administratif terbagi kedalam 5 kecamatan yang terbagi lagi dalam 55 desa dan 25 dusun, dengan kecamatan Namrole sebagai Ibu kotanya.

Tabel.3
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas, Desa dan Dusun

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Desa	Dusun
1	Namrole	Elfule	326,00	10	7
2	Leksula	Leksula	2.428,00	20	11
3	Waisama	Wamsisi	724,00	8	3
4	Kepala Madan	Biloro	1.276,00	10	4
5	Ambalau	Wailua	306,00	7	0
Buru Selatan			5.060,00	55	25

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka, 2011

Kabupaten Buru selatan termasuk kedalam daerah dengan katagori kepadatan penduduknya sangat rendah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah 10,46 jiwa/Km². Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun yakni dari 43.036 jiwa pada tahun 2007 menjadi 73.520 jiwa pada tahun 2011, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan angka kelahiran bayi dan banyaknya pendatang dari luar daerah sejalan dengan mulai terbukanya peluang investasi di Buru Selatan. Berdasar hasil registrasi penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan berdasar jenis kelamin terdiri dari 37.871 laki-laki dan 35.795 perempuan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Buru Selatan sampai saat ini masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Leksula, sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Ambalau, hal ini disebabkan karena Kecamatan Leksula secara historis merupakan daerah tertua diantara kecamatan lainnya dan daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan sebelum Namrole ditetapkan jadi Ibu Kota Kabupaten, selain itu juga Kecamatan Leksula memiliki luas yang sangat besar dan desa yang lebih banyak dari kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Ambalau selain karena luas

wilayahnya merupakan yang terkecil dari kecamatan lainnya, Ambalau merupakan pulau kecil yang berada terpisah dari Pulau Buru yang menyebabkan minimnya jangkauan pelayanan dan fasilitas umum bagi masyarakat, hal ini yang menjadi alasan rendahnya jumlah penduduk pada kecamatan ini.

Tabel. 4
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2007	22,206	20,83	43,036
2	2008	26,946	24,808	51754
3	2009	27,559	25,39	52,949
4	2010	31,034	29,251	60,285
5	2011	37,871	35,795	73,666

Sumber : Buru Selatan Dalam Angka, 2011

4.1.2 Kondisi Sosial

Masyarakat Buru Selatan pada umumnya memiliki budaya keterbukaan, dalam arti masyarakat mudah berinteraksi dengan beragam budaya yang masuk dan mudah menerima informasi dari luar. Hal ini merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan guna mencapai kemajuan diberbagai bidang dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat guna menciptakan kesejahteraan.

Masyarakat Buru Selatan terdiri dari penduduk asli Pulau Buru dan kaum pendatang. Penduduk asli Pulau Buru terbagi kedalam 24 mata marga yang sebagian besar menempati dataran tinggi / pegunungan. Sedangkan kaum pendatang umumnya berasal dari daerah lain di Kepulauan Maluku dan Sulawesi Berbeda dengan Kabupaten Buru, masyarakat Buru kebanyakan merupakan penduduk asli Pulau Buru yang jumlahnya mencapai 60% dari total penduduk, sedangkan sisanya merupakan kaum pendatang. Satu hal yang sangat penulis sayangkan, penduduk Buru Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah daerah, mereka sangat berharap banyak kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup, hal ini

sangat dipengaruhi oleh pola pikir mereka yang lebih suka “diberi ikan dari pada di beri kail”.

Penduduk Buru selatan juga memiliki keragaman dalam kepercayaan. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku pada tahun 2010, mayoritas penduduk Buru Selatan beragama Islam, terbesar kedua adalah Kristen Protestan sedangkan agama lainnya hanya sedikit sekali dianut oleh para penduduk pada daerah tersebut. Penduduk yang beragama Kiristen umumnya tinggal di wilayah kecamatan Leksula, sedangkan empat kecamatan lainnya sebagian besar menganut agama Islam.

Dalam hal mata pencaharian, mayoritas masyarakat Kabupaten Buru Selatan memiliki mata pencarian bertani padahal sebagian besar dari penduduk tersebut tinggal di daerah pesisir. Penduduk di Kecamatan Leksula, Kecamatan Namrole, Kecamatan Waisama, Kecamatan Ambalau, mata pencaharian utamanya adalah berkebun coklat, cengkeh, pala dan sayuran, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Buru Selatan Bapak Tagob Solissa:

Penduduk kita kebanyakan bermata pencaharian bertani ya...sedangkan nelayan disini hanya sedikit sekali, paling-paling hanya ada di Kecamatan Kepala Madan saja....ditempat lainnya hampir tidak ada...kalaupun ada paling hanya sekitar 30 – 40 orang per kecamatankalau di Kepala Madan jumlahnya bisa mencapai 200 – 260 oranghampir semua orang disana pergi ke laut...karena dari nenek moyang mereka pergi melaut...orang-orang di Kepala madan umumnya berasal dari Buton . orang buton khan terkenal sebagai pelaut toh..kita di Pulau Buru ini memiliki masalah cuaca....kalau datang musim timur dari Juni sampai September...malah kadang-kadang sampai Oktober ombak sangat besar, akibatnya tidak ada nelayan yang bisa ke laut....makanya penduduk disini tidak suka jadi nelayan karena banyak kendalanya khususnya cuaca, belum lagi kurangnya peralatan menangkap ikan. Ikan –ikan yang ada diperairan Buru Selatan ini termasuk jenis ikan laut dalam, sulit untuk ditangkap dengan peralatan yang sederhana.

Selain melakukan wawancara dengan Bupati Buru Selatan, penulis juga melakukan wawancara dengan para penduduk Buru Selatan guna mengkonfirmasi alasan yang menyebabkan mereka lebih senang menjadi petani daripada menjadi nelayan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa alasan yang

menyebabkan penduduk lebih suka bertani dari pada menjadi nelayan adalah : 1) Kondisi cuaca di Buru Selatan menentu pada saat terjadi angin musim timur, yang berlangsung dari bulan Juni sampai september, menyebabkan mereka tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak bisa menyandarkan perekonomian mereka kepada hasil laut. 2) keterbatasan peralatan untuk menangkap ikan. Ikan yang berada di wilayah laut Buru Selatan merupakan jenis ikan laut dalam, sehingga memerlukan peralatan yang lebih modern. 3) kondisi tanah di wilayah Buru Selatan sangat subur sehingga memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Pengelolaan pertanian di Buru Selatan dihadapkan oleh keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola pertanian basah. Untuk menjawab tantangan tersebut para petani di Buru Selatan menggani jenis tanaman padi dengan jenis tanaman kering, yakni padi gogo. Dari sektor perkebunan, para petani kebun umumnya menanam cengkeh, kelapa, kakao, pala, dan jambu mete yang merupakan tanaman khas dan komoditas unggulan Pulau Buru.

Sampai saat ini pengelolaan hasil produksi dari perkebunan masih belum maksimal, karena belum ada pengusaha baik lokal maupun asing yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengelolaan industri perkebunan di Buru Selatan. Hasil dari perkebunan pada umumnya dijual langsung ke Kota Ambon, dan beberapa daerah di Sulawesi, dan sebagian kecil digunakan bagi konsumsi masyarakat lokal.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

Sebagai daerah otonom baru, secara ekonomi Buru selatan tidak tertinggal dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Buru, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan Bapak Abdurrahman Solissa,

“Kondisi perekonomian Buru Selatan saat ini walaupun belum bisa dibilang bagus namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tidak tertinggal dengan kondisi perekonomian kabupaten induk.”

Berdasarkan data dari Kantor BPS Provinsi Maluku , laju pertumbuhan ekonomi Buru Selatan pada tahun 2010 yang ditunjukkan oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan dari 4 persen menjadi 4.61 persen, sedangkan PDRB Kabupaten Buru pada tahun yang sama adalah 5.20 persen. Selain itu Buru Selatan juga

memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar , yang dapat dijadikan modal bagi pembangunan Buru Selatan, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Buru Selatan Bapak Tagob Solissa

“Ada banyak sekali potensi yang dimiliki Buru Selatan tergantung dilihat dari sektor apa. Di Sektor perikanan kita memiliki ikan tuna, ikan laut dalam yakni ikan kelabus kecil dan kelabus besar. Dari Sektor pertambangan kita punya potensi emas, nikel, tembaga, bauksit, dan batu bara. Sedangkan dari sektor kehutanan kita memiliki hutan yang sangat luas, dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Hal ini yang dicari oleh para pengusaha atau para pengguna HPH karena dengan tingkat kesuburan yang tinggi menjamin tersedianya kayu dalam jangka waktu yang lama, dan masih banyak lagi”

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Bupati Buru Selatan, Buru Selatan memiliki kekayaan alam yang cukup besar diantaranya adalah potensi perikanan, perkebunan, kehutanan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Dari sektor perikanan, selain memiliki potensi ikan laut dalam yang sangat besar, Buru Selatan juga memiliki potensi mangrove di wilayah pesisir, namun sayangnya pengelolaan kedua potensi tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan peralatan dan biaya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah potensi perikanan tersebut lebih banyak di manfaatkan oleh nelayan dari luar daerah Buru Selatan, sedangkan pemanfaatan oleh nelayan lokal masih rendah. Dibawah ini dapat dilihat potensi perikanan yang berada di laut banda yang berhadapan langsung dengan perairan Buru Selatan.

Tabel.5
Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan
Diwilayah Laut Banda

No.	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi Ikan	JTB (Ton)
1	Pelagis Besar	104.120	83.300
	Tuna	21.200	17.000
	Cakalang	38.400	30.700
	Paruh Panjang	4.500	3.600
	Tongkol	22.200	17.800
	Tenggiri	17.800	14.200
2	Pelagis Kecil	132.000	105.600
3	Demersal	9.300	7.400
4	Ikan Karang	2.500	2.000

Sumber : Buku Potensi Buru Selatan, 2010

Potensi ikan di wilayah perairan Buru Selatan diestimasikan sebesar 1.311,57 ton dengan potensi lestari (MSY) sebesar 655,79 ton dan potensi yang dapat dimanfaatkan (JTB) sebesar 524,63 ton/tahun. Jenis ikan pelagis kecil yang sering ditangkap di wilayah perairan tersebut adalah ikan layang, tongkol, tembang, teri, kembung, selar kuning. Potensi sumberdaya ikan demersal di perairan wilayah Buru Selatan sebesar 656,59 ton, dengan MSY sebesar 328,3 ton dan yang dapat ditangkap (JTB) sebesar 262,64 ton/tahun. Jenis ikan demersal terdiri dari biji angka, kerapu, kapas-kapas, serta jenis-jenis lainnya.

Dari Sektor Pertanian dan Perkebunan, wilayah daratan Buru Selatan merupakan daerah yang subur, kondisi ini merupakan suatu keunggulan dalam pengembangan produk-produk pertanian dan perkebunan. Dibawah ini dapat dilihat jenis-jenis tanaman unggulan berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel. 6
Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan berdasarkan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Buru Selatan

No	Kecamatan	Komoditas				
		Pangan	Sayuran	Buah-buahan	perkebunan	peternakan
1	Kepala Madan	Ubi Kayu	Bw. Merah	Mangga	Cengkeh	Ayam Buras
		Ubi Jalar	Sawi	Nangka	Pala	
		Kacang Tanah	Kangkung	Durian		
2	Leksula	Ubi Kayu	Tomat	Alpokot	Kelapa	Kambing
			Bayam	Durian	Kopi	Babi
			Sawi		Pala	
3	Namrole	Jagung	Cabe	Durian	Kelapa	Sapi
		Kacang Tanah	Terong	Pisang	Cengkeh	Kambing
		Kacang Hijau	Kc. Panjang			
		Buncis				
4	Waisama	Jagung	Cabe	Alpokot	Pala	Kambing
		Ubi Jalar	Bw. Merah	Pepaya		Itik
			Kc. Panjang	Durian		
5	Ambalau	Jagung	Cabe	Mangga	Cengkeh	Kambing
		Ubi Jalar	Bayam	Alpokot	Pala	Ayam Buras
			Kc. Panjang	Jeruk		

Sumber : Buku Potensi Buru Selatan, 2011

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Buru Selatan karena memiliki andil besar dalam perekonomian daerah, namun sektor ini terus

memperlihatkan kecenderungan penurunan pada lima tahun terakhir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Buru Selatan saat ini melakukan revitalisasi pertanian melalui pengembangan agro industri seperti, pengembangan industri minyak kelapa, minyak siri, minyak cengkeh dan minyak kayu putih.

Dari Sektor Kehutanan, Buru Selatan memiliki areal hutan primer yang sangat luas yakni sebesar 292.596.97 Ha, hutan sekunder sebesar 5.807.83 Ha, hutan mangrove sebesar 5.152 Ha, dan hutan gambut sebesar 169.3 Ha. Dari seluruh wilayah hutan tersebut, 155.396.30 Ha merupakan hutan lindung dan 8.817.70 Ha merupakan hutan suaka. Hutan kayu yang terdapat di wilayah Buru Selatan memiliki potensi kayu kelas satu yang terdiri dari Kayu Meranti Merah, Kayu Matoa, Kayu Merbau, dan Kayu Eboni dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Sektor ini juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD buru Selatan yakni sebesar sekitar 67 % jika disatukan dalam sektor pertanian.

Dari sektor pertambangan, hampir di semua kecamatan di Buru Selatan memiliki kandungan tambang yang berupa sekis, marmer, minyak, geotermal, pirit dan sirtu. Selain itu terdapat potensi batu gamping sebagai bahan baku semen namun belum dikelola secara maksimal. Sesuai dengan hasil sesmit dan survei yang dilaksanakan oleh badan Geologi Nasional maka terlihat adanya potensi minyak bumi dan geotermal, dimana minyak bumi terindikasi di perairan Namrole, Leksula sedangkan geotermal berada pada daerah Sekat, Biloru dan Waitawa. Potensi pertambangan dan energi yang terdapat di Wilayah Buru Selatan dapat di lihat pada tabel 7.

Dari Sektor Pariwisata, Kabupaten Buru Selatan mempunyai potensi kepariwisataan yang sangat lengkap dengan memiliki keindahan alam dan panorama yang tidak kalah saing dengan lain. Sampai saat ini potensi tersebut belum dikelola dengan baik karena keterbatasan dana dan prasarana daerah. Apabila ditangani secara maksimal, sektor ini akan mampu menjadi salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena sektor pariwisata mempunyai sifat *multi player effect* terhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya.

Daftar obyek wisata yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel. 7
Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2011

No	Kecamatan	Potensi Pertambangan dan Energi	Lokasi
1	Leksula	Batu Gamping	Ds. Nalbesi hingga Ds. Tifu, Ds. Fakal
		Air	Muara Air Babunyi
		Biotit	Ds. Mepa, Ds. Tifu, Ds. Waemulang
		Geothermal	Ds. Sekat
2	Namrole	Nikel	Pantai antara Ds. Lektama hingga
		Indikasi Minyak	
		Batu Gamping	Ds. Batu Tulis, Ds. Waenalut, Ds. Waefusi,
		Emas	
3	Kepala Madan	Batu Gamping	Ds. Waepandan, Ds. Air , Ds. Pasir Putih, Air Jin
		Air	Ds. Air , Air Jin
		Nikel	
4	Waesama	Pirit	Tanjung Fatbana
		Emas	Waetawa

Sumber : Buku Potensi Buru Selatan, 2011

Tabel. 8 Potensi Wisata Buru Selatan
Tahun 2011

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan	Desa
1	Hutan dan Gunung Kapala Madan	Alam	Kepala Madan	Kepala Madan
2	Air Jin	Alam	Kepala Madan	Nanali
3	Pantai Pasir Putih	Bahari	Kepala Madan	Fogi
4	Air Babunyi	Alam	Leksula	Mafa
5	Taman Banulalet	Alam	Leksula	Leksula
6	Tifu	Sejarah	Leksula	Leksula
7	Pantai Namrole	Bahari	Namrole	Namrole
8	Pantai Oki	Bahari	Namrole	Oki Lama
9	Tugu Portugis	Sejarah	Ambalau	Ambalau
10	Air Panas	Alam	Ambalau	Ambalau
11	Kapal Karam	Alam dan Sejarah	Ambalau	Ambalau

Sumber : Buku Potensi Buru Selatan, 2011

Berdasarkan gambaran potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan, seharusnya kondisi perekonomian Buru Selatan sudah jauh lebih

tinggi dari keadaannya sekarang, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan biaya untuk mengelola sumber daya alam tersebut maka kondisi perekonomian Buru Selatan masih rendah diantara semua kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Jika dilihat berdasarkan sektor, struktur ekonomi Buru Selatan terbagi menjadi tiga bagian yakni sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer mencakup sektor pertanian, pertambangan dan sektor penggalian, sektor sekunder mencakup sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih dan sektor bangunan. Sektor tersier termasuk didalamnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, Sektor keuangan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa. Dibawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan berdasarkan sektor primer, sekunder dan tersier dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dalam persen.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abdurrahman Solissa, didapat gambaran mengenai struktur perekonomian Buru Selatan saat ini

“Secara keseluruhan struktur perekonomian Buru Selatan pada saat ini masih didominasi oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan. Sektor pertanian dimana menyumbang hampir 70 persen terhadap PDRB Buru Selatan pada beberapa tahun terakhir...salah satu penyebabnya karena kebanyakan masyarakat Buru Selatan hidup sebagai petani, dan Buru Selatan memiliki komoditas unggulan yang tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia seperti cengkeh, pala, dan minyak kayu putih. Nah....dengan begitu sektor pertanian sangat maju....apalagi dari sektor kehutanan..yang memang sudah ada beberapa investor lokal yang mengembangkan usaha di Buru Selatan. Sektor tersier berada pada posisi kedua penyumbang terbesar , dimana pada tahun 2010 lalu menyumbang 29.96 persen. Terakhir adalah sektor sekunder yang menyumbang 1.90 persen pada tahun yang sama”.

Struktur ekonomi Buru Selatan sejak tahun 2000 masih didominasi oleh tiga sektor yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Besarnya sumbangan ketiga sektor tersebut terhadap perekonomian Buru Selatan pada tahun 2010 lalu sebesar 93.97 persen sedangkan enam sektor lainnya hanya menyumbang sebesar 6.03 persen. Sektor pertanian pada tahun tersebut menyumbang 67.59 persen, sektor perdagangan menyumbang 17.05 persen, sedangkan sektor jasa menyumbang 9.33 persen

4.1.4 Pelayanan Umum

Hal yang sangat mendasar dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adalah ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung bagi penyediaan layanan kepada masyarakat dan juga sebagai faktor penggerak bagi sektor lain. Tersedianya sarana transportasi, listrik, telekomunikasi, irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sektor produksi dan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah otonom baru kondisi infrastruktur Buru Selatan masih sangat terbelakang, baik sarana dan prasarana transportasi, listrik, air bersih, maupun fasilitas publik lainnya seperti pelayanan administrasi, kesehatan dan pendidikan. Sampai saat ini ketersediaan jalan yang dapat di akses oleh masyarakat masih terbatas di dua kecamatan yakni Kecamatan Namrole dan Kecamatan Leksula, sedangkan di tiga kecamatan lainnya akses jalan masih sangat minim, begitu pula terhadap pelayanan publik juga masih minim sekali. Keterbatasan akses jalan dan pelayanan inilah yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah Buru, karena sebelum pemekaran, banyak daerah-daerah di Kabupaten buru yang belum terhubung dengan jalan darat, akibatnya mereka harus menempuh jalan laut. Hal ini disampaikan juga oleh Staf Kantor Bappeda Buru Selatan, Bapak Melky Solissa

“salah satu yang menghambat pembangunan Buru Selatan saat ini adalah minimnya infrastruktur seperti jalan dan listrik, sehingga mempersulit ..apa..namanya...hmmm distribusi barang dan jasa dan juga menyebabkan para investor pikir-pikir panjang toh..buat kasih dia punya modal di Buru Selatan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah...sudah banyak perkembangan yang significant setelah pemekaran wilayah...kalau dulu sama sekali tidak ada jalan darat ..kita-kita kalau mau pergi ke Kepala Madan atau ke Waesama misalnya ...harus lewat laut...susah sekali...semua hutan...”

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, sampai pada akhir tahun 2010 panjang jalan di daerah Buru Selatan baru mencapai 454,60 kilometer dimana 406,90 kilometer diantaranya merupakan jalan tanah. Keterbatasan ruas jalan ini menyebabkan

rendahnya aksesibilitas dan mobilitas penduduk antar-wilayah, yang kemudian berdampak pada lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi dan sosial antar-wilayah kecamatan dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah di Buru Selatan.

Oleh karena Buru Selatan merupakan wilayah kepulauan yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan, maka untuk dapat mempermudah mobilisasi penduduk dan distribusi barang dan jasa, diperlukan fasilitas atau sarana transportasi yang cukup bagi kelancaran kegiatan tersebut. Infrastruktur perhubungan laut dan udara Buru Selatan saat ini baru tersedia dua dermaga laut yang terletak di Kecamatan Leksula dan Kecamatan Namrole dan satu bandar udara yang berlokasi di Kecamatan Namrole. Keberadaan infrastruktur perhubungan tersebut di dukung pula oleh sejumlah armada angkutan laut dan udara, serta armada penyeberangan. Saat ini, armada angkutan laut yang tersedia terdiri dari 2 (armada) dengan rute Ambon-Namrole-Leksula yang dalam pengoperasiannya juga menyinggahi sebagian besar desa pantai di Kecamatan Waisama, Namrole, dan Leksula. Keberadaan armada angkutan laut ini didukung pula oleh 1 armada kapal cepat yang melayani rute Ambon-Namlea dengan frekuensi pelayanan 3 kali seminggu, serta 1 unit armada penyeberangan laut yang melayani rute Namlea-Namrola dengan frekuensi penyeberangan 1 kali dalam seminggu. Sementara itu, untuk aktivitas perhubungan udara, saat ini telah dilayani oleh Maskapai Penerbangan Merpati Nusantara Air Lines dan Nusantara Buana Airlines (NBA). Pelayanan transportasi tersebut dirasakan belum mencukupi kebutuhan dari masyarakat Buru Selatan baik dari aspek mobilitas maupun dari aspek distribusi barang dan jasa.

Hal yang sama juga terjadi dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Sampai saat ini listrik sepanjang hari hanya tersedia di dua kecamatan yakni di Kecamatan Waesama dan Kecamatan Leksula sedangkan di tiga kecamatan lainnya ketersediaan listrik hanya terbatas malam hari saja. Pada umumnya masyarakat masih menggunakan lampu pelita (tradisional) ataupun genset. Keterbatasan penyediaan listrik ini disebabkan karena pembakaran kantor PLN oleh masyarakat pada saat kerusuhan tahun 1999 lalu. Pembangunan Kantor PLN yang baru saat ini masih dalam proses, sehingga untuk sementara aliran listrik

dibeberapa kecamatan masih ditopang oleh Gardu PLN yang berlokasi di Kecamatan Waesama. Pelayanan air bersih dari PDAM hanya tersedia di Kecamatan Leksula sedangkan empat kecamatan lainnya masih mengkonsumsi air sumur.

4.1.4.1 Pendidikan

Kondisi mutu pendidikan Buru Selatan masih masih belum tergolong baik.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Tagob Solissa, Bupati Buru Selatan

“Mutu Pendidikan di Buru Selatan masih belum baik, itu sebabnya kita masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Buru Selatan ini....salah satunya karena kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kita masih rendah....secara kualitas maupun kuantitas..kita tidak hanya kekurangan sekolah...kita juga kekurangan guru..belum lagi wilayah Buru Selatan sangat luas dan terpencil...jadi guru-guru tidak tersebar dengan merata sampai kepedalaman.....ini yang mau kita perbaiki.... “

Pernyataan Bupati Buru Selatan diatas diperkuat dengan data yang berhasil penulis dapatkan dari Kantor Bupati Buru Selatan, bahwa ketersediaan layanan pendidikan khususnya bagi anak usia dini masih sangat kurang, terutama diwilayah-wilayah pedalaman yang lokasinya terisolasi. Selain itu jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Buru Selatan juga masih kurang dan tidak tersebar keseluruhan wilayah, sebagian besar tenaga pengajar masih terkonsentrasi di Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan.

Dalam tiga tahun terakhir rata-rata lama sekolah Kabupaten Buru Selatan merupakan yang terendah di Provinsi Maluku. Angka melek huruf Buru Selatan dalam periode yang sama yakni 2008 sampai dengan 2010 cenderung *stagnan* yakni 89.54 pada tahun 2008 dan naik 0.2 persen menjadi 89.74 pada tahun 2009 dan tetap pada angka yang sama pada 2010. (BPS Maluku :2010)

Tabel. 9
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Lulusan Ujian Nasional
Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010

Tingkat/Keju- ruan Sekolah	Sekol- ah	Gu- ru	Mu- rid	Lulus an
TK	26	58	609	595
SD	80	633	10.807	1.393
SD Ibtidayah	78	600	10.565	1.370
Madrasah Ibtidayah	2	21	242	23
SLTA	29	220	3.877	976
SMP	27	193	3.671	922
Madrasah Tsanawiyah	2	27	206	56
SLTA	14	170	2.208	639
SMU / SMK	14	170	2.208	639
Madrasah Aliayah	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Buru 2010

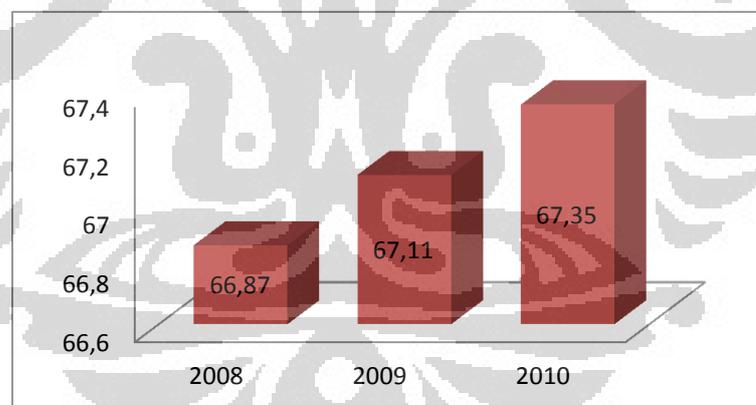
4.1.4.2 Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, penyediaan layanan kesehatan di Buru Selatan masih sangat kurang dan memiliki keterbatasan, baik dalam aspek prasarana kesehatan, tenaga medis, maupun obat-obatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Tagob Solissa

“Begitu pun dengan kondisi kesehatan di Buru Selatan...kita masih sangat kekurangan tenaga medis, peralatan kesehatan, obat-obatan..... bahkan penyediaan imunisasi bagi balita belum tersediadan lagi jumlah puskesmas di Buru Selatan sangat terbatas sekali dan penyebarannya tidak merata keseluruh daerah sampai dengan kepedalaman...suku Buru asli banyak tinggal dipegunungan yang jauh dan sangat terpencil...umumnya mereka lebih suka berobat ke tabib dengan ramuan tradisional...kecuali kalau sudah parah sekali mereka baru turun ke bawah....begitu juga dengan masyarakat yang ada diBuru Selatan...karena fasilitas kesehatan kita sangat minim dan tidak lengkap ...umumnya mereka lebih suka berobat ke kota Ambon...karena disana peralatan dan obatnya lebih lengkap”

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu di Buru Selatan masih sangat minim dan belum tersebar secara merata sehingga pada umumnya masyarakat di daerah tersebut masih menggunakan obat tradisional bahkan pertolongan kepada ibu melahirkan masih banyak yang ditangani oleh dukun/bidan kampung. Sampai dengan tahun 2010 jumlah puskesmas yang tersedia di Buru Selatan hanya 8 unit, dan jumlah puskesmas pembantu adalah 25 unit yang semuanya tersebar secara tidak merata di lima kecamatan. Buru selatan juga memiliki keterbatasan jumlah tenaga medis, pada tahun 2010 berdasarkan data dari dinas kesehatan Buru Selatan, jumlah dokter umum, dokter ahli, dan dokter gigi hanya 14 orang, jumlah bidan 21 orang dan jumlah perawat 64 orang. Angka harapan hidup di Buru Selatan adalah 67 tahun masih di bawah harapan hidup provinsi Maluku yang mencapai 68.7 tahun seperti yang terlihat pada Diagram 1

Diagram. 1
Angka Harapan Hidup Buru Selatan, 2008-2010

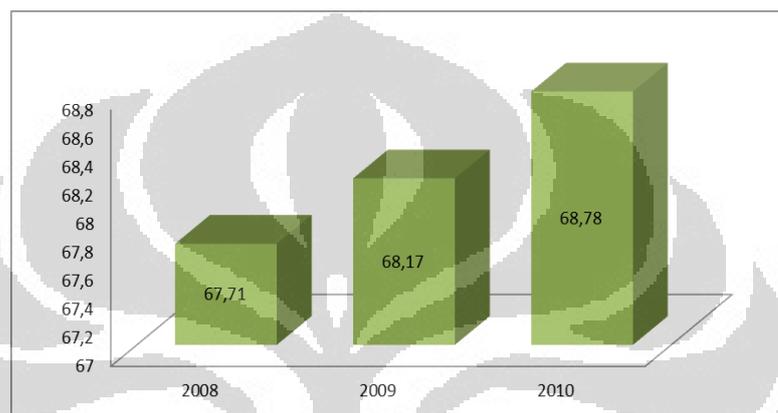


Sumber : Kabupaten Buru Selatan, 2010

Secara umum, kondisi pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Buru Selatan belum berada pada taraf yang relatif baik, sehingga menyebabkan kualitas pembangunan manusianya juga masih rendah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor BPS Provinsi Maluku, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru (termasuk 5 kecamatan di wilayah Buru Selatan), yang pada tahun 2007 sebesar 67,49 atau menempati urutan 349 dari total Kabupaten/Kota

seluruh Indonesia. Prestasi pembangunan manusia di daerah ini juga masih berada di bawah rata-rata IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Maluku yang pada tahun yang sama mencatat angka 69,96. Pada tahun 2008 67,71, tahun 2009 berada pada 68,17 dan tahun 2010 IPM Kabupaten Buru Selatan adalah 68,78. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 3.

Diagram. 2
IPM Buru Selatan, 2008-2010



Sumber : BPS Provinsi Maluku

4.1.4.3 Layanan Administrasi

Berdasarkan wawancara dengan staf Bappeda Buru Selatan Bapak Ophan, dapat penulis sampaikan bahwa ketersediaan pelayanan administrasi di Buru Selatan juga masih kurang.

“untuk masyarakat yang mau mengurus KTP, Surat nikah, akte kelahiran mereka bisa pergi ke Kantor catatan Sipil, sampai saat ini kami belum punya UPTD (Unit Pelaksana Tugas Dinas) di masing-masing kecamatan jadi masyarakat harus pergi ke ibu kota kabupaten untuk mengurus keperluan tersebut.....kalau buat urus STNK, BPKP, IMB bisa diurus di kantor Dinas pendapatan Daerah yang ada di Ibukota kabupaten juga”

berdasarkan wawancara dengan Bapak Ophan, dapat penulis simpulkan bahwa Penyediaan layanan administrasi ditangani oleh dua instansi yakni Dinas Catatan Sipil dan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Catatan sipil mengurus dokumen-dokumen seperti kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah mengurus dokumen-dokumen yang secara langsung memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah

seperti, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.

4.1.5 Kondisi Politik

Secara politik masyarakat Buru Selatan selatan pada umumnya masih sangat awam dengan dinamika politik yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Buru Selatan dari Fraksi Kerakyatan, Bapak Gerson Eliazer Selsily

“Masyarakat Buru Selatan sepertinya tidak terlalu paham mengenai dinamika politik yang ada di daerah... Menurut saya dinamika politik di Buru Selatan tidak terlalu resisten, dan masyarakat disana belum siap dengan perubahan politik yang terjadi dengan sangat cepat. Seperti misalnya pembentukan Namrole menjadi kecamatan baru terjadi pada tahun 2004/2005, kemudian disusul dengan pembentukan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2008, jarak tersebut terlalu singkat, sedangkan masyarakat yang umumnya merupakan petani belum siap menerima perubahan tersebut. Masyarakat belum “aware” terhadap kedudukan mereka dalam pemerintahan, seharusnya mereka dapat turut serta dalam proses pembangunan dan politik sebagai pengawas berjalannya pembangunan, namun pada saat itu fungsi kontrolnya hanya ada pada DPRD dan belum ada lembaga-lembaga lain seperti LSM...itu belum ada, fungsi kontrol hanya dijalankan oleh DPRD saja”

Berdasarkan data yang berhasil penulis dapatkan dari Kantor Bupati Buru Selatan, setelah pemekaran ada satu lembaga yang sebelumnya berfungsi sebagai penggerak pemekaran yakni LPBS (Lembaga Pengembangan Buru Selatan) yang menampung segala aspirasi masyarakat. Melalui lembaga ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Peran serta masyarakat juga lebih dikuatkan melalui pelaksanaan pemilukada dan proses musrenbangda.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat penulis sampaikan bahwa ada beberapa aspek yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Buru Selatan, yang *pertama* terkait dengan masalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan faktor utama penggerak perekonomian daerah, sedangkan infrastruktur yang tersedia di Buru Selatan masih sangat minim, yang *kedua* terkait masalah potensi yang dimiliki Buru Selatan, potensi sumber daya

alam Buru Selatan sangat besar, apabila dikelola dengan baik potensi tersebut dapat memberikan sumbangan besar terhadap PAD, oleh karena itu Pemerintah Daerah Buru Selatan perlu mengupayakan agar potensi itu dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal namun tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, *ketiga* terkait dengan permasalahan disparitas antar daerah, sejak sebelum pemekaran Buru Selatan telah terjadi disparitas ekonomi dan pembangunan antar daerah di wilayah tersebut, oleh karena itu pemerintah perlu mencari jalan keluar agar pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat di wilayah Buru Selatan. *Keempat* terkait dengan penyediaan fasilitas dan layanan umum bagi masyarakat yang masih sangat minim. Apabila keempat aspek tersebut mendapatkan penanganan yang baik, hal tersebut akan menguatkan perekonomian daerah sehingga mengurangi ketergantungan Pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

4.2 Analisis Relevansi Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru

4.2.1 Dasar Hukum

4.2.1.1 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di sahkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan. Undang-undang ini merupakan dasar pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai sebuah daerah otonom. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pembentukan Kabupaten Buru Selatan dilatarbelakangi oleh aspirasi yang berkembang di masyarakat Buru Selatan yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan rentang kendali, dan bahwa pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Di Kabupaten Buru, sehingga perlu dilakukan pemekaran wilayah Buru menjadi dua, dibagian utara adalah Kabupaten Buru dan bagian selatan menjadi Kabupaten Baru yakni Kabupaten Buru Selatan. Hal ini juga disampaikan oleh Bupati Buru Selatan, Bapak Tagob Solissa:

” Ada dua alasan Utama yakni alasan ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat (spin of control). Kedua alasan tersebut yang menyebabkan tumbuhnya keinginan dari masyarakat untuk membentuk kabupaten baru. Dengan adanya pemekaran diharapkan akan ada perubahan-perubahan kearah yang lebih baik bagi berbagai aspek kehidupan di masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang/jauh guna mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Dari sisi ekonomi pembentukan kabupaten baru dapat mempermudah distribusi barang dan jasa, yang sebelumnya dilakukan melalui Buru sekarang dapat dilakukan secara langsung. Hal tersebut juga membawa peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur dalam rangka mendukung distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Buru Selatan.”

Secara ekonomi, daerah Buru Selatan memiliki potensi sumber daya yang besar, atas dasar tersebut maka Buru Selatan dinilai memenuhi syarat untuk menjadi sebuah DOB (Daerah Otonom Baru), karena potensi sumberdaya tersebut merupakan modal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Buru Selatan ke depannya. Dari aspek sosial politik, masyarakat Buru Selatan merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Secara Sosial Budaya, penduduk Buru Selatan kebanyakan adalah penduduk asli Pulau Buru, berbeda dengan penduduk di Kabupaten Buru yang umumnya merupakan pendatang dan transmigran. Penduduk asli Pulau Buru sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, agama, dan adat mereka, sehingga walaupun mereka sangat terbuka dengan informasi, teknologi, dan masyarakat luar namun nilai-nilai budaya masih menghiasai kehidupan mereka sehari-hari.

Penduduk asli Buru Selatan adalah Suku Buru yang terbagi ke dalam 24 mata marga sedangkan sisanya merupakan pendatang yang kebanyakan berasal dari daerah lain di Kepulauan Maluku dan Sulawesi. Jika dilihat berdasarkan agama dan kepercayaannya, masyarakat Buru Selatan mayoritas beragama Islam, terbesar kedua beragama Kristen Protestan, sedangkan sisanya hanya merupakan minoritas saja. Kemajemukan daerah ini merupakan suatu kekayaan budaya, namun juga memiliki potensi terjadinya konflik, apalagi dengan adanya kesenjangan/disparitas ekonomi dan pembangunan yang terjadi antar daerah. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan masalah rentang kendali, sehingga masyarakat di semua wilayah bisa mendapatkan fasilitas dan

pelayanan yang sama sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan NKRI (negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam rangka memelihara pertahanan dan keamanan tersebut, pemerintah pusat mempertimbangkan pelaksanaan pemekaran wilayah Buru menjadi dua kabupaten.

Dalam undang-undang mengenai pembentukan Kabupaten Buru Selatan ini juga dijelaskan batas dan cakupan wilayah Buru Selatan agar dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah Buru Selatan dalam membuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayahnya). Selain itu undang-undang ini juga menjelaskan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Buru selatan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Buru Selatan sendiri. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah , wakil Kepala daerah, organisasi perangkat daerah, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan dan juga sumber pendapatan daerah tersebut.

4.2.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam rangka menjaga keseimbangan/sinergitas perencanaan di tingkat pusat dan daerah, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun undang – undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hubungan perencanaan di tingkat pusat dan daerah juga tercermin dalam hubungan antar berbagai dokumen perencanaan antara pusat dan daerah.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa dalam penyusunan RPJM Daerah (Kabupaten/Kota) harus berpedoman pada RPJPD daerah tersebut dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Tiga Dokumen Perencanaan yakni , RPJMD Provinsi Buru Selatan, RPJPD Kabupaten Buru Selatan Dan RPJMD Kabupaten Buru Selatan dapat

disimpulkan bahwa proses penyusunan (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Buru Selatan telah memperhatikan (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Buru Selatan dan (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku. Begitu Pula dengan penyusunan RPJPD Buru Selatan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada PRJPN.

Berdasarkan Visi yang ingin dicapai Buru Selatan dalam jangka menengah adalah “ Terwujudnya Persaudaraan yang Rukun, Mandiri, Adil, Berkualitas dan Sejahtera” sedangkan visi yang ingin dicapai dalam jangka panjang adalah “Terwujudnya Kabupaten Buru Selatan Yang Maju, Mandiri, Berkeadilan dan Berdaya Saing” . penetapan visi jangka panjang Kabupaten Buru Selatan dilakukan dengan memperhatikan Visi yang tercantum dalam RPJPN yakni “Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, adil, dan Makmur” Dari ketiga misi tersebut dapat dilihat keharmonisan yang terjalin diantara ketiga dokumen tersebut, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan memperkuat persaudaraan dan kerukunan dimasyarakat, dan mulai menciptakan kemandirian, keadilan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Begitupun halnya jika disandingkan dengan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah “Membangun Maluku Yang Sejahtera, Rukun, Religius Dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”.

Dalam rangka mewujudkan visi / tujuan pembangunan jangka panjang, maka dibuat tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Setiap tahapan dan skala prioritas harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang. Dalam Dokumen RPJPD Buru Selatan dijelaskan bahwa sebagai tahap pertama RPJM ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Buru Selatan di segala bidang yang ditujukan untuk

menciptakan Kabupaten Buru Selatan yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kabupaten Buru Selatan yang aman dan damai ditandai dengan penciptaan kondisi kehidupan sosial yang aman dan damai melalui upaya-upaya pencegahan konflik sosial; penciptaan kesiapan sosial masyarakat dalam merespons ide dan kebijakan pembangunan; peningkatan sarana dan prasarana peribadatan dan pembinaan mental keagamaan guna meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat; pengaktifan fungsi lembaga-lembaga adat daerah dalam penyelesaian berbagai persoalan pembangunan yang bersentuhan dengan adat istiadat daerah. Hal ini sangat sesuai dengan visi yang ingin dicapai Buru Selatan pada periode pertama yakni 2011-2016 yakni “Terwujudnya Persaudaraan yang Rukun, Mandiri, Adil, Berkualitas dan Sejahtera”.

Dalam Rangka mewujudkan visi jangka menengah pertama Kabupaten Buru Selatan, maka pemerintah Buru Selatan menyusun misi sebagai berikut : 1) Dalam rangka mewujudkan Persaudaraan yang rukun, yang harus dilakukan adalah membina, memelihara dan mengembangkan semangat “Satu Hati Membangun Negeri” sebagai wujud entitas persaudaraan yang rukun, dan adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat, lintas agama, suku atau golongan dan ras demi peningkatan hidup masyarakat yang hidup bersama dalam perbedaan; 2) Dalam Rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara optimal untuk mendayagunakan potensi lokal berbasis keunggulan spasial; 3) Dalam Rangka mewujudkan keadilan, dilakukan dengan cara menegakkan Supremasi Hukum, dan Penghargaan terhadap HAM demi mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis, toleran, adil dan damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, disiplin, dan transparan ; 4) dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang berkualitas, dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM secara proporsional dan profesional sebagai pelaku utama ; 5) Untuk mewujudkan Buru Selatan yang sejahtera, dilakukan dengan memperkuat basis ekonomi kerakyatan dengan orientasi memberdayakan kapasitas lokal baik SDM maupun SDA maupun kapasitas kelembagaan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan visi/tujuan pembangunan, maka pembangunan Buru Selatan harus di arahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi pembangunan, begitu pula yang terjadi dalam penyusunan arah dan sasaran pembangunan di tingkat provinsi dan Nasional. Jika dilihat berdasarkan misi/ tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Buru Selatan, dapat penulis sampaikan bahwa pembangunan Buru Selatan tahap pertama diprioritaskan pada pengembangan nilai budaya dan nilai kebangsaan, pengembangan potensi daerah, menegakan supremasi hukum dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara proposional dan professional, dan pemberdayaan kapasitas lokal, hal ini selaras dengan prioritas pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Buru Selatan dalam RPJPD tahap pertama yakni pembangunan Kabupaten Buru Selatan di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Buru Selatan yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Provinsi Maluku Tahun 2008-2013 yakni 1) Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; 2) Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; 3) Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi, keamanan dan kualitas perdamaian.

Berdasarkan analisis penulis terhadap ketiga dokumen diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah Buru Selatan telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan daerah buru selatan telah sinergis dengan pembangunan Provinsi Maluku dan Pembangunan Nasional.

4.2.2 Proses Pembentukan Kabupaten Buru Selatan

Pembentukan Buru Selatan berawal dari adanya aspirasi masyarakat yang disebabkan karena adanya permasalahan rentang kendali (*spant of control*) baik dalam pelayanan publik maupun pelayanan masyarakat dan kondisi ekonomi, hal ini disampaikan oleh Bapak Tagob Solissa, Bupati Buru Selatan.

“Ada dua alasan Utama yakni alasan ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat (spin of control). Kedua alasan tersebut yang menyebabkan tumbuhnya keinginan dari masyarakat untuk membentuk kabupaten baru. Dengan adanya pemekaran diharapkan akan ada perubahan-perubahan kearah yang lebih baik bagi berbagai aspek kehidupan di masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang/jauh guna mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Dari sisi ekonomi pembentukan kabupaten baru dapat mempermudah distribusi barang dan jasa, yang sebelumnya dilakukan melalui Buru sekarang dapat dilakukan secara langsung. Hal tersebut juga membawa peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur dalam rangka mendukung distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Buru Selatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis sampaikan bahwa hal yang mendasari pembentukan Buru Selatan ada dua yaitu: *Pertama*, kondisi perekonomian Buru Selatan yang buruk dikarenakan keterbatasan infrastruktur sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi barang dan jasa an yang *kedua*, masalah rentang kendali yang sangat luas sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan alasan utama Yang menyebabkan terjadinya pemekaran Buru Selatan. Namun terdapat juga alasan lain yang juga memicu terjadinya pemekaran Buru Selatan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdurrahman Solissa selaku Kadis Ekonomi dan Pembangunan

“ selain itu pemekaran Buru Selatan juga dimaksudkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah di Buru Selatan. Biasanya dalam pelaksanaan pembangunan daerah.....pembangunan terkonsentrasi hanya di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan sehingga manfaatnya tidak bisa di nikmati oleh semua masyarakat... nah dengan adanya pemekaran diharapkan disparitas tersebut dapat dikurangi dengan cara meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur agar bisa menunjang pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah. ...jadi otomatis dengan menguatnya perekonomian daerah kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pun dapat ditingkatkan.”

Dari hasil wawancara dengan kedua pejabat Buru Selatan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Buru Selatan diprakarsai oleh masyarakat Buru Selatan yang dilatar belakangi oleh masalah rentang kendali yang sangat luas, kondisi ekonomi yang buruk disebabkan karena minimnya infrastruktur daerah, dan adanya keinginan untuk mengurangi disparitas antar daerah sehingga hasil pembangunan dapat di nikmati oleh semua masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan.

Aspirasi masyarakat tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Buru. Setelah melalui proses penilaian Tim DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang beranggotakan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, dan beranggotakan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Perwakilan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Pakar Otonomi Daerah (tiga orang), pembentukan Buru Selatan disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Juni 2008 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalata, SH, MH dengan agenda utama pengesahan 13 RUU pemekaran Kabupaten/Kota tahun 2008. Buru Selatan dinilai telah memenuhi persyaratan baik secara administratif, teknis, dan fisik wilayah untuk menjadi sebuah daerah otonom baru (Info Maluku, 7 Feb 2011).

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Tim DPOD, terkait dengan kondisi Buru Selatan saat sebelum pemekaran. Berdasarkan data yang berhasil penulis kumpulkan di lapangan, sebelum terjadinya pemekaran kondisi Buru Selatan sangat memprihatinkan. Hal ini disampaikan oleh staf Bappeda Buru Selatan, Bapak Melky Solissa

“ Bisa dibilang kondisi Buru Selatan sebelum terjadinya pemekaran sangat buruk sekali...sewaktu masih jadi bagian dari Kabupaten Buru.....pembangunan terkonsentrasi di wilayah utara saja, sedangkan di selatan bisa dibilang hampir tidak ada.....kita tidak punya jalan, dan pusat pelayanan umum juga sangat kurang,

ekonomi kita ditunjang dari sektor pertanian..itupun kebanyakan berada di utara yang penduduknya banyak pendatang dari Jawa.”

Berdasarkan data dari Kantor Bappeda Kabupaten Buru Selatan, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah hanya sebesar 4 %, dan berdasarkan hasil wawancara penulis beberapa dengan penduduk Buru Selatan, mereka membenarkan pernyataan staf Bappeda Buru Selatan, Bapak Melky Solissa, bahwa pembangunan hampir tidak menyentuh wilayah Buru bagian Selatan, dan hanya terbatas pada ibu kota kecamatan saja. Setelah penulis konfirmasi kembali dengan Staf Kantor Bappeda Kabupaten Buru, alasan yang menyebabkan pembangunan terkonsentrasi pada wilayah utara adalah rentang kendali yang terlalu luas dan juga pandangan Pemerintah Kabupaten Buru yang melihat Buru Selatan hanya sebagai sebuah pusat pelayanan sektoral dan bukan pusat pelayanan regional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, sehingga pembangunan infrastruktur daerah tidak dilaksanakan secara merata melainkan terkonsentrasi di wilayah utara yang sudah banyak penduduknya yang umumnya merupakan pendatang dan transmigran.

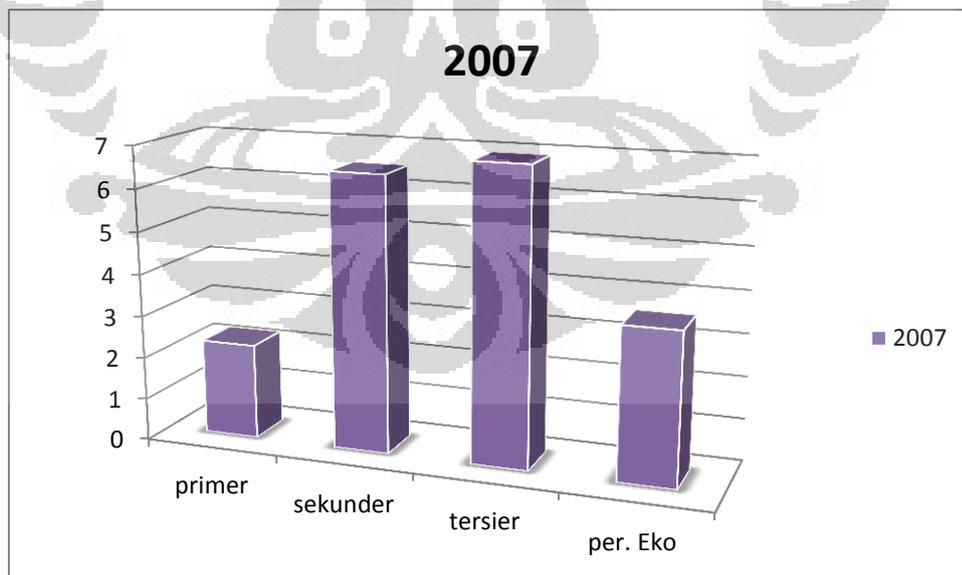
Terbatasnya fasilitas jalan di Buru Selatan menyebabkan distribusi barang dan jasa terhambat, letak pasar yang jauh dari para pelaku ekonomi menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk biaya angkut barang, dan masih minimnya nilai investasi pada daerah tersebut. Investasi yang ada hanya berasal dari sektor kehutanan karena sebagian besar wilayah Buru Selatan merupakan hutan primer yang memiliki luas sebesar 292,596,97 Ha yang tersebar di semua kecamatan. Hutan di wilayah Buru Selatan memiliki potensi industri kayu yang sangat besar karena merupakan kayu kelas satu, seperti kayu besi, kayu eboni hitam, dan kayu meranti merah dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi sehingga banyak menarik investor lokal, sedangkan di sektor lainnya belum ada investor lokal maupun asing yang tertarik melakukan investasi di Buru Selatan. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan Buru Selatan berjalan dengan sangat lambat.

Apabila digolongkan kedalam sektor lapangan usaha, maka perekonomian Buru Selatan pada saat itu banyak di ditunjang oleh sektor sekunder yang mencakup industri pengolahan, angkutan dan komunikasi, dan

sektor tersier yang mencakup perdagangan, jasa, dan bangunan. Sektor pertanian yang merupakan sektor primer dan banyak sumbangannya terhadap PDRB Buru, kebanyakan berada di wilayah utara, sedangkan pertanian di wilayah selatan belum berkembang dengan baik. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dilihat pada diagram 4.

Dari aspek layanan publik, pada saat Buru Selatan masih menjadi bagian dari Kabupaten Buru kondisinya sangat minim sekali dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum di wilayah selatan Pulau Buru ini sangat sangat sedikit sangat tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Jumlah penduduk Buru Selatan pada tahun 2007 berjumlah 43.036 jiwa sedangkan fasilitas kesehatan yang tersedia hanya tiga puskesmas inap, empat puskesmas utama, dan 24 Puskesmas pembantu, bahkan masih ada wilayah Buru Selatan yang tidak memiliki puskesmas inap dan puskesmas pembantu, seperti yang terjadi di kecamatan Kepala Madan.

Diagram. 3
Laju pertumbuhan Ekonomi Wilayah Buru Selatan
Berdasarkan sektor Primer, sekunder, dan Tersier tahun 2007



Sumber : RPJMD Kabupaten Buru 2008-2012

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap satu puskesmas melayani 1388 jiwa dan buruknya lagi masyarakat tersebut tersebar di wilayah-wilayah terpencil bahkan terisolasi, seperti misalnya penduduk asli Pulau Buru yang umumnya hidup di daerah pegunungan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Buru Selatan saat sebelum pemekaran dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel. 10 Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Wilayah Buru Selatan 2007

Kecamatan	Puskesmas		
	Dengan Fasilitas menginap	Tanpa Fasilitas Menginap	Puskesmas Pembantu
Kapala Madan	0	-	4
Leksula	1	1	8
Namrole	1	1	3
Waesama	1	-	6
Ambalau	0	2	3
2007	3	4	24

Sumber : Kabupaten Buru Dalam Angka, 2007

Ketersediaan pelayanan pendidikan khususnya bagi anak usia dini masih sangat kurang terutama pada wilayah-wilayah pedalaman, masih terdapat kekurangan tenaga guru pada semua jenjang pendidikan serta masih kurangnya prasarana dan sarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama maupun pendidikan menengah atas.

Tabel 11. Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Wilayah Buru Selatan 2007

Kecamatan	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Kapala Madan	10	5	4	0	1	0
Leksula	14	13	3	4	2	1
Namrole	9	5	3	2	2	0
Waesama	5	4	2	1	2	0
Ambalau	5	3	2	0	2	0
	43	30	14	7	9	1

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Angka, 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat kurangnya fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Buru Selatan, hal ini kemudian diperburuk dengan kurangnya tenaga guru. Hal ini disebabkan karena penyebaran guru yang tidak merata, sebagian besar guru masih terkonsentrasi pada Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan. Khusus untuk guru bidang studi, Buru Selatan masih kekurangan guru bidang studi matematika, fisika dan bahasa.

Penyediaan layanan administratif yakni layanan pengurusan dokumen-dokumen seperti kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, dapat dilakukan secara langsung di Dinas Catatan Sipil yang berlokasi di Ibukota Kabupaten yakni Namlea atau melalui UPTD (Unit Pelaksana Tugas Dinas) di yang tersedia dimasing-masing kecamatan. Sedangkan untuk pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya dapat dilakukan pada Dinas Pendapatan yang juga memiliki UPTD dimasing-masing kecamatan.

Ketersediaan fasilitas listrik di wilayah Buru Selatan saat sebelum pemekaran masih dibatasi malam hari saja kecuali di Wasama, hal ini karena pada waktu terjadi kerusuhan pada tahun 1999 yang lalu terjadi pembakaran kantor PLN beserta infrastrukturnya dibakar massa sedangkan untuk jaringan PAM dan

telepon masih belum tersedia. Ketersediaan fasilitas jalan raya di wilayah Buru Selatan juga sangat minim sekali, akses yang menghubungkan antar kecamatan dilakukan lewat jalan laut, sedangkan jalan darat hampir tidak ada akses sama sekali, seperti yang disampaikan oleh staf Bappeda Kabupaten Buru Selatan, Bapak Melky Solissa

“.....jalan yang tersedia di Kabupaten Buru Selatan sangat terbatas....bahkan hampir tidak ada...seluruh wilayah Buru Selatan ini hutan...tidak ada jalan yang menghubungkan antar daerah-daerah di Buru Selatan, bahkan jalan ke Ibu kota kabupaten, Namlea saja tidak ada...jadi kita harus naik speed (istilah untuk perahu motor kecil) untuk bisa kesana....kalau sekarang udang mendingan.....selain jalan yang terbatas...listrik kita juga terbatas...hanya terbatas malam hari saja....ini gara-gara kerusuhan tahun 1999 kemarin...kantor PLN sama gardu kita dibakar masa....”

Dari segi politik, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Husein Sanaky, Staf Bappeda Kabupaten Buru, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buru sebelum pemekaran

“ kalau dilihat dari aspek poliik, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Buru ketika bekum pemekaran...yang pertama...tidak ada keterbukaan dalam kehidupan berpolitik...masing-masing orang memiliki kepentingan dan main kuat-kuatan ..bisa dibilang budaya politik di Buru belum sehat dan terbuka, kedua...belum ada kesadaran dari para aparat daerah untuk bekerja melayani masyarakat, dan masih kuatnya budaya KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme)..khususnya nepotisme....kebanyakan PNS yang ada di Buru direkrut tidak berdasarkan kebutuhan instansi namun faktor-faktor seperti kekeluargaan, atau dengan bayar, ketiga, kontrol masyarakat terhadap pembangunan dan pemerintah daerah masih minim sekali ...sudah gitu peran media juga ngak ada . Selain itu juga masyarakat Buru bagian selatan Selatan yang kebanyakan adalah penduduk asli setempat dan wilayahnya sangat terisolasi, mereka masih sangat awam dengan dinamika politik yang terjadi di daerah tersebut. Perubahan politik di Buru pada saat itu sangat cepat sekali, dan tidak dibarengi dengan kesiapan penduduk lokal. Makanya masyarakat kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi.....jika dilihat kebelakang, pemekaran Buru dari Kabupaten Maluku Tengah baru terjadi pada tahun 1999, sebelumnya Buru Selatan hanya sebuah kecamatan, terus Namrole yang saat ini menjadi ibukota kabupaten ...juga baru resmi menjadi sebuah kecamatan. “

Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* dalam pembangunan yang seharusnya memiliki fungsi kontrol terhadap proses pembangunan namun belum

dapat menjalankan fungsinya tersebut. Fungsi kontrol saat itu hanya dijalankan oleh DPRD saja.

Dari aspek sosial, masyarakat Buru selatan sangat terbuka terhadap segala hal yang memiliki dampak positif bagi daerahnya. Hal ini terlihat dari kemajemukannya, penduduk Buru Selatan asli hanya berjumlah sekitar 40% dari total populasi sedangkan sisanya merupakan pendatang. mayoritas penduduk Buru Selatan memiliki mata pencaharian sebagai petani ladang, diwilayah tersebut hampir tidak ditemukan sawah basah, walaupun Buru Selatan juga menghasilkan padi namun padi yang dihasilkan berjenis padi gogo. Hal tersebut disebabkan karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk membuat sistem pengairannya dan dalam mengelola sawah basah.

Satu hal yang menarik dari masyarakat Buru Selatan adalah walaupun mereka tinggal di pesisir namun mereka tidak berprofesi sebagai nelayan. Ada dua hal yang menyebabkan mereka enggan menjadi nelayan. *Pertama*, mereka memiliki keterbatasan dalam peralatan, peralatan yang mereka gunakan hanya sebatas peralatan tradisional sedangkan ikan yang ada di laut seram dan laut banda merupakan ikan laut dalam, sehingga membutuhkan peralatan modern untuk mencapainya. *Kedua*, ada juga keterbatasan yang disebabkan karena cuaca, pada saat musim timur yang berlangsung dari Juni hingga September, curah hujan sangat tinggi dan ombak sangat besar sehingga menyebabkan kesulitan bagi para nelayan untuk menangkap ikan, hal ini lah yang menyebabkan penduduk Buru Selatan lebih senang menjadi petani dari pada menjadi nelayan.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan gambaran kondisi faktual Buru Selatan diatas, penulis mencoba menganalisis, prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga tujuan pembangunan dan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam melakukan analisis terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan, penulis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT biasanya digunakan dalam penyusunan perencanaan strategik. Perencanaan strategik pada instansi pemerintah

memerlukan dukungan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Lingkungan internal organisasi mencakup *Strenght* (Kekuatan) dan *Waeknesses* (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari *Oppurtunities* (Peluang) dan *Threats* (tantangan). Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kedua lingkungan tersebut, penulis kemudian melakukan analisis secara silang terhadap keempat faktor lingkungan tersebut sehingga dapat dirumuskan empat strategi utama ; *Pertama*, adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. *Kedua*, adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. *Ketiga*, adalah strategi S – T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. *Keempat*, strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis ini, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik di dalam perumusan strategi pembangunan bagi daerah Kabupaten Buru Selatan.

4.2.3.1 Identifikasi lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan (*Strenght*)

Berdasarkan wawancara dengan bupati Buru Selatan dan Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan, dapat penulis sampaikan bahwa ada beberapa faktor

yang dapat dijadikan kekuatan (strengths) bagi Buru Selatan yakni Potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar, letak geografis Buru Selatan, dan juga sifat masyarakatnya yang terbuka

“Ada banyak sekali potensi yang dimiliki Buru Selatan tergantung dilihat dari sektor Apa. Di Sektor perikanan kita memiliki ikan tuna, ikan laut dalam yakni ikan kelabus kecil dan kelabus besar, Dari Sektor pertambangan kita punya potensi emas, nikel, tembaga, bauksit, dan batu bara. Sedangkan dari sektor kehutanan kita memiliki hutan yang sangat luas, dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan hasil kayu kita merupakan hasil kayu kelas satu seperti Meranti Merah, Kayu Besi... selain itu lokasi Buru Selatan berada pada jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 3 yang berada di tiga kota besar di Indonesia yakni Makassar, Manado dan Ambon ...kenyataan ini bisa sangat menguntungkan buat Buru Selatan...” (Bupati Buru Selatan)

Buru Selatan ini adalah daerah yang kaya dan subur...baik di laut maupun di darat...di darat kita punya tanah yang subur...hutan yang luas..kita juga punya tanaman-tanaman unggulan daerah seperti cengkeh, kelapa, cacao, pala dan sebagainya..di laut kita punya potensi ikan yang sangat besar..karna kita dikelilingi Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku yang memiliki kandungan ikan yang sangat besar seperti tuna, cakalang, dan banyak lagi.masyarakat kita memiliki rasa persaudaraan yang tinggi namun sangat terbuka bagi pendatang..hal ini bisa sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan..bisa dijadikan modal toh?...(Kadis Ekbang Buru Selatan)

Berdasarkan wawancara diatas dan data yang penulis peroleh dari kantor Bupati dan Kantor Bappeda Buru Selatan, dan juga kondisi faktual yang penulis lihat dilapangan, Buru Selatan memiliki beberapa aspek yang dapat dijadikan kekuatan yakni :

- Letak geografis Buru Selatan sangat strategis yakni berada di wilayah ALKI 3. Buru Selatan juga berada di antara 3 kota penting di Indonesia Timur : Makassar, Ambon; dan Manado. Hal ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam bidang perdagangan, dan juga dapat mendatangkan investasi yang besar apabila dikelola dan di manfaatkan dengan baik;
- Buru selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya :
 - potensi hutan yang luas dengan kayu jenis kelas satu dan tingkat kesuburan yang tinggi, Potensi pariwisata;

- Kabupaten Buru Selatan merupakan produsen produk-produk primer sektor basis pertanian dengan hasil utama; cengkih, pala, coklat, kelapa, atau komoditi rempah-rempah. Luas Areal kelapa 9.435(Ha) produksi 7.686 (Ton), Luas Arealpala 1.491(Ha) produksi 241 (Ton), Luas Arealcengkeh 5.502 (Ha) produksi 1.489 (Ton). Potensi perikanan Buru Selatan yang berhadapan langsung dengan laut Banda dengan potensi perikanan laut Banda potensi proiduksi 240.948 Ton/Tahun;
- potensi di bidang Pariwisata seperti Wisata Hutan dan Gunung Kepala Madan, Wisata Air Jin di Fogi, Wisata Pantai Pasir Putih di Fogi, Wisata Sejarah di Tifu, Taman Banulet, Air Babunyi, Pantai Oki, Pantai Namrole, Tugu Portugis dan Air Panas Ambalau,Wisata Kapal Karam Ambalau;
- Kabupaten Buru Selatan juga memiliki potensi pertambangan seperti; Batu Gamping di Desa Nalbesi hingga Desa Tifu, Desa Fakal, Desa Batu Tulis, Desa Waenalut, Desa Lektama, Desa Fatmite, Desa Elfule, Desa Labuang, Desa Wali, Desa Waepandan, Desa Air Ternate, Desa Pasir Putih, Air Jin. Biotit di Desa Mepa, Desa Tifu, dan Desa Waemulang. Geothermal di Desa Sekat. Minyak di Pantai antara Desa Lektama hingga Desa Waefusi, dan Pirit di Tanjung Fatbana;
- Buru Selatan memiliki potensi besar dalam bidang kelautan dan perikanan karena wilayahnya dikelilingi oleh tiga laut yang memiliki potensi ikan laut dalam yang terbesar di Indonesia, yakni Laut Seram, Laut Banda dan Laut Maluku.
- Masyarakat Buru Selatan sangat terbuka terhadap masuknya teknologi dan para pendatang juga investor investor, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor kelemahan Kabupaten Buru Selatan, penulis memulai dari mengenali permasalahan yang dihadapi oleh Buru

Selatan saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan, dan Staf Kantor Bappeda Kabupaten Buru Selatan, penulis dapat melihat ada beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Buru Selatan

“.....Kendala yang dihadapi diseluruh wilayah pemekaran adalah kurangnya pembiayaan. Makanya pemerintah daerah sangat memerlukan dana-dana hibah maupun dana-dana transfer langsung dari pemerintah pusat. Dana tersebut dapat APBD yang sudah ditetapkan dengan DAU dan DAK dalam rangka penguatan pembangunan. Masalah yang kedua adalah masih terbatasnya potensi SDM, dengan jumlah penduduk yang masih sangat terbatas dan dengan cakupan wilayah yang sangat luas, kualitas penduduk yang masih jauh dari yang diharapkan, tentunya menjadi salah satu kendala utama, masalah ketiga (yang paling penting) adalah masalah geografis dimana tingkat curah hujan di Buru Selatan sangat tinggi, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan pembangunan dan perawatan infrastruktur. Kontur wilayah Buru juga sangat variatif (bergelombang) tidak seperti daerah lain seperti Jawa dan Bali, dan pulau-pulau lain yang datar....terdiri dari pegunungan, bukit. Dan permasalahan yang keempat adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh sebuah wilayah baru yakni “Hak penggunaan lahan”. Dimana lahan-lahan yang tersedia sudah dikuasai oleh masyarakat secara adat, hal tersebut mengakibatkan penambahan cost atau beban pemerintah guna melakukan pembebasan lahan...belum lagi infrastruktur Buru Selatan yang terbatas...hal ini menjadi penghambat bagi pengembangan Buru Selatan itu sendiri khususnya dibidang ekonomi dan pelayanan umum.....kita juga memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, mutu pendidikan di Buru Selatan masih belum baik, itu sebabnya kita masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Buru Selatan ini....salah satunya karena kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kita masih rendah....secara kualitas maupun kuantitas, begitupun dengan kondisi kesehatan” (Bupati Buru Selatan)

“.....kesenjangan ekonomi di Buru Selatan juga harus diperbaiki....karena bisa menjadi masalah dikemudian hari...kesenjangan ekonomi menandakan bahwa pembangunan belum dilaksanakan secara merata...oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar yang serius, disamping itu karena keterbatasan infrastruktur..maka layanan umum yang tersedia di Buru Selatan juga terbatas...fasilitas kesehatan dan pendidikan, juga administrasi juga masih sedikit sekali ...ngak sesuai sama jumlah masyarakat disini.” (Kadis Ekbang Kabupaten Buru Selatan)

“ Kalau masalah yang paling mendasar di Buru Selatan ini menurut saya adalah infrastruktur dan iklim mbak.....infrastruktur

kita masih sangat minim dan belum menunjang kehidupan sehari-hari...tapi sekarang sudah lebih baik..setelah pemekaran..sudah ada jalan...tadinyasemua akses lewat laut...listrik juga masih digilir ketersediaan transportasi baik darat maupun laut masih kurang...trus iklim disini juga susah ditebak, dan kalau lagi ada angin timur..dari Juni sampai Agustus..kadang sepeتمبر..kadang bisa juga sampai Oktober, Buru Selatan pas saat angin timur datang jadi sangat terisolasi...kita ga bisa keluar, dan yang diluar ga bisa masuk...karena ombak besar sekali...hanya kapal besar saja yang bisa lewat itupun lewat Namlea Ibu kota Kabupatem Buru, kalau langsung ke Namrole ga bisa, kita ga punya kapal besar...lewat udara juga ga bisa karena anginnya juga besar...curah hujan kita sangat besar jadi pertanian harus disesuaikan dengan iklim disini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan juga data-data yang berhasil penulis kumpulkan, penulis mendapati bahwa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupeten Buru Selatan saat ini dapat dikatakan sebagai faktor kelemahan Buru Selatan, sebagai berikut :

- Infrastruktur atau sarana dan prasarana Buru Selatan masih sangat minim sehingga menghambat distribusi barang dan jasa. Hal ini njuga berdampak pada rendahnya tingkat perekonomian daerah Buru Selatan.
- Kualitas SDM yang masih rendah hal ini terlihat dari indeks IPM Kabupaten Buru Selatan yang mang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku. Pada 2010, IPM Buru Selatan mencapai 68.78 Dilihat dari angka partisipasi kasar SMU/SMK/MA, Kabupaten Buru Selatan berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Maluku. Pada 2010 di Buru Selatan mencapai 6.64, dan Angka Melek Huruf 89.74 pada tahun 2010. Rata-rata lama Sekolah dan Melek Huruf Buru Selatan merupakan yang terendah di Provisi Maluku
- Adanya Kesenjangan ekonomi dan pembangunan di wilayah Buru Selatan, khususnya antara wilayah pedesaan baik daerah peisir maupun daerah pegunungan dan daerah-daerah tertinggal. Di tingkat kecamatan, pembangunan juga masih belum merata. Ada kecamatan-kecamatan tertentu yang memiliki dinamika perkembangan ekonomi lebih baik, sedangkan daerah lain memiliki kelambatan di dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan.

- Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009 sebanyak 17.477 atau 33,02 % dari jumlah penduduk 51.393, turun menjadi 11.700 Jiwa atau 21,83 % dari jumlah penduduk 53.671 pada tahun 2010. Kategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Rumah tangga miskin adalah 2887 jiwa atau 27,99 %, kategori sangat miskin 2204 jiwa, 21,37 %, kategori hampir miskin 833 atau 8,08 % dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 73.666 jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran di Kabupaten Buru Selatan tergolong tinggi juga. Pada 2010, penduduk yang terkategori menganggur mencapai 1.383 orang;
- Masih rendahnya kualitas layanan umum bagi masyarakat, baik dibidang kesehatan, pendidikan, administratif maupun layanan dasar seperti listrik, jaringan telepon, dan PAM;
- Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buru Selatan tergolong rendah. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Buru Selatan masih belum bisa maksimal didalam membiayai program-program pembangunan yang direncanakan. Selain itu, realitas demikian juga menunjukkan bahwa di dalam masalah sumber keuangan, Kabupaten Buru Selatan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, baik melalui DAU maupun DAK.
- Iklim di Pulau Buru yang pada angin musim timur datang pada bulan Juni sampai September menyebabkan Buru Selatan terisolasi dari dunia luar.
- Sifat masyarakat Buru yang keras dan mudah emosi sehingga mudah diadu domba dan memiliki potensi konflik yang tinggi.

Peluang (*Opportunity*)

Untuk mengenali peluang yang dimiliki oleh Buru Selatan yang merupakan faktor eksternal yang datang dari luar, penulis mencoba mengidentifikasi segala bentuk kebijakan pemerintah pusat maupun kondisi yang sedang berkembang saat ini yang memiliki pengaruh baik secara langsung

maupun tidak langsung dan juga dengan melakukan wawancara dengan Bupati Buru Selatan dan Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan.

“.....Alhamdulillah kondisi perekonomian di tingkat nasional dan tingkat provinsi terus mengalami perbaikan, akibatnya investasi juga meningkat...ini bisa jadi angin segar buat Buru Selatan...kita sedang berupaya agar keadaan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk perbaikan Buru Selatan” (Bupati Buru Selatan)

“.....saat iniperdagangan antar pulau sedang “booming” ya....ini bisa jadi peluang buat Buru Selatan...tapi bisa juga jadi ancaman...itu berarti kita harus punya daya saing tinggi dengan daerah lain...jangan sampe kalah di pasar...makanya...kita harus mengambangkan potensi yang kita miliki dengan maksimal dan arif...ga boleh jor..joran juga....maksud saya..kita harus punya produk unggulan yang memiliki daya saing kuat seperti cengkeh dan pala dari sektor pertanian...hasil kita lebih baik dari daerah lain..dan hanya sedikit sekali daerah di Indonesia yang menghasilkan komoditi tersebut” (Kadis Ekbang Kabupaten Buru Selatan”

Hasil yang penulis adalah sebagai berikut :

- Iklim investasi di Indonesia yang cenderung membaik di dalam tahun-tahun terakhir. Iklim demikian telah membuat minat investor, baik domestik maupun asing, mulai melirik kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketertarikan ini tidak lepas dari realitas bahwa berinvestasi di Indonesia termasuk menguntungkan. Karena itu, dalam tahun-tahun belakangan, arus investasi itu semakin meningkat;
- Perkembangan perdagangan antar pulau sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi;
- Terbukanya kesempatan kerja melalui percepatan pembangunan ekonomi daerah dengan jalan memperkuat sektor riil;
- Adanya globalisasi, perdagangan bebas dan perluasan pasar barang dan jasa;
- Adanya perhatian pemerintah terhadap keuangan daerah dengan pemberian dana perimbangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, baik berupa DAU maupun DAK. Selain itu, Kabupaten Buru Selatan juga memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari berbagai instansi di pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan program-program yang dilakukan di daerah;

- Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi yang positif. Pasar makin responsive;
- Perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga menaikkan porsi anggaran terhadap dua sektor tersebut.

Tantangan (*Threats*)

- Persaingan dalam pasar kerja makin ketat. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi global semakin menguat dan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi Buru Selatan. Manakala kekuatan ekonomi pasar global tidak diatur secara baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung yang memadai, kehadiran kekuatan pasar global itu akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Buru Selatan;
- Perubahan Iklim yang Tidak Menentu. Kita tidak mengetahui secara pasti mana bulan-bulan yang terkatagori musim hujan dan manabulan-bulan yang terkatagori musim kemarau. Kecenderungan demikian mengganggu pola tanam yang dilakukan oleh petani. Para nelayan juga terganggu karena pola iklim yang tidak menentu itu juga berpengaruh terhadap naik turunnya ombak di laut. Konsekuensinya, para petani dan nelayan itu mengalami kerugian akibat iklim yang tidak menentu tersebut;
- Persaingan antar daerah dalam merebut investor dan persaingan ekonomi antar daerah. Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi setelah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Kabupaten Buru Selatan, harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya untuk memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat.

4.2.3.2 Analisis SWOT

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kabupaten Buru Selatan juga memiliki kelemahan-

kelemahan, dan juga ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan. Untuk mengatasi hal itu, perlu disusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi itu mencakup empat strategi utama. *Pertama* adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. *Kedua* adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. *Ketiga* adalah strategi S – T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. *Keempat*, strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan.

Tabel.12 Analisis SWOT Kabupaten Buru Selatan

Strategi I S – O Menggunakan kekuatan (S = *Strenght*) untuk meraih peluang (O = *Opportunity*)

Kekuatan	Peluang	Strategi
<ul style="list-style-type: none"> - Letak Buru Selatan yang strategis - Sumber Daya Alam yang Besar - Sifat Masyarakat Buru selatan Yang Terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim Investasi Yang cenderung membaik - Perkembangan perdagangan antar pulau - Terbukanya kesempatan kerja melalui percepatan pembangunan ekonomi - Adanya Globalisasi dan pasar bebas - Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang positif 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan investasi melalui kebijakan investasi yang mudah - Melakukan revitalisasi dibebberapa sektor-sektor penting guna meningkatkan perekonomian daerah - Pemanfaatan potensi SDA berupa komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi dalam perdagangan international

Strategi II W – O : Menekan kelemahan (W = *Weakness*) untuk meraih peluang (O = *Opportunities*)

Peluang	Kelemahan	Strategi
<ul style="list-style-type: none"> - Iklim Investasi Yang cenderung membaik 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Infrastruktur dan tata ruang

- Perkembangan perdagangan antar pulau	- Kualitas SDM yang masih rendah	- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan kesehatan
- Terbukanya kesempatan kerja melalui percepatan pembangunan ekonomi	- Disparitas antar daerah	- Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Adanya Globalisasi dan pasar bebas	- Tingginya angka Kemiskinan dan pengangguran	- Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok
- Adanya Globalisasi dan pasar bebas	- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
- Dukungan pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan	- Sifat keras penduduk berpotensi Konflik	

Strategi III S – T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T=*threat*)

Kekuatan	Tantangan	Strategi
- Letak Buru Selatan yang strategis	- Persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat	- Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan PAD
- Sumber Daya Alam yang Besar	- Iklim yang tidak menentu	- Pemanfaatan potensi daerah secara maksimal dengan memperhatikan kondisi lingkungan
- Sifat Masyarakat Buru selatan Yang Terbuka	- Persaingan antar daerah	-

Strategi III W – T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

Kelemahan	Tantangan	Strategi
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana	- Persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat	- Regulasi penguatan ekonomi kerakyatan
- Kualitas SDM yang masih rendah	- Iklim yang tidak menentu	-
- Disparitas antar daerah	- Persaingan antar daerah	
- Tingginya angka Kemiskinan dan pengangguran		
- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
- Sifat keras penduduk berpotensi Konflik		

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, dapat dirumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Buru Selatan, maka apabila dirangkum strategi pembangunan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- **Meningkatkan investasi melalui kebijakan investasi yang mudah.** Strategi ini didasarkan adanya iklim investasi yang cenderung membaik, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, kondisi tersebut merupakan suatu peluang bagi Buru Selatan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Buru Selatan secara maksimal namun tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, hal ini tentunya ditunjang dengan sifat masyarakat buru selatan yang terbuka terhadap pendatang dan investor baik nasional maupun internasional;
- **Melakukan Revitalisasi di beberapa sektor penting guna meningkatkan perekonomian daerah.** Dengan terbukanya perdagangan antar pulau dan maraknya arus globalisasi dan pasar bebas, Buru Selatan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara revitalisasi sektor-sektor penting, seperti misalnya Sektor kehutanan, Sektor pertanian, Sektor Perikanan;
- **Pemanfaatan potensi sumber daya alam berupa komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi dalam perdagangan internasional.** Buru Selatan kaya akan sumber daya alam yang potensial untuk dijadikan komoditas unggulan daerah, contohnya dari Sektor Pertanian dan Pekebunan, Buru selatan memiliki produk hasil pertanian dan perkebunan yang potensial seperti Hotong yang merupakan tanaman unggulan lokal, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kentang, dan jambu mete. Dari sektor perikanan, wilayah laut Buru Selatan kaya akan ikan jenis pelagis besar dan pelagis kecil yang banyak diminati pasar. Dari sector kehutanan, Hutan Buru Selatan kaya akan jenis kayu kelas satu yang memiliki daya saing tinggi. Dengan meningkatnya arus globalisasi dan perdagangan bebas, komoditas unggulan tersebut tentunya akan dapat mendatangkan PAD yang sangat besar, apabila dikelola dengan baik.

- **Pengembangan infrastruktur dan tata ruang.** Salah satu masalah pembangunan yang dihadapi Buru Selatan saat ini adalah kurangnya infrastruktur yang merupakan faktor dominan dalam pembangunan daerah sehingga menghambat distribusi barang dan jasa. Hal ini tentunya melemahkan perekonomian daerah. Selain itu keterbatasan infrastruktur juga mengakibatkan Buru Selatan kehilangan peluang-peluang baik bagi pengembangan daerahnya, contohnya dengan berkembangnya perdagangan antar daerah dan antar pulau dapat dimanfaatkan oleh Buru Selatan untuk memasarkan produk unggulannya, namun karena sarana dan prasarana berupa jalan, transportasi, dan pasar membuat proses distribusi dan transaksi menjadi terhambat.
- **Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.** Kondisi kesehatan dan pendidikan Buru Selatan saat ini masih belum memadai, baik dilihat dari sarana dan prasarana maupun dari tenaga medis dan tenaga pengajar. Kualitas sumber daya manusia Buru Selatan juga masih rendah, hal ini menyebabkan potensi sumber daya alam Buru Selatan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Dengan adanya dukungan pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan dengan meningkatkan anggaran bagi kedua sektor tersebut, kesempatan ini dapat dijadikan jalan keluar dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan di Buru Selatan;
- **Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial.** Angka kemiskinan dan pengangguran Buru Selatan masih cukup tinggi, berdasarkan data BPS Maluku Tingkat Kemiskinan Masyarakat Buru Selatan adalah 27 % dan tingkat pengangguran sebesar 10 % pada tahun 2011. Untuk itu Pemerintah Daerah Buru Selatan dapat membuat satu kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui program-program pro-rakyat;
- **Meningkatkan daya saing koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelompok.** Koperasi terbukti merupakan suatu unit usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Oleh karena masyarakat buru selatan rata-rata merupakan petani yang memiliki

penghasilan yang rendah, maka pemerintah Buru Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menguatkan peran koperasi, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan membentuk kelompok-kelompok usaha kecil dengan memberikan pinjaman lunak dan kemudahan pembayaran;

- **Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan PAD.** Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Buru Selatan harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Buru Selatan, salah satunya dengan melakukan kerjasama antar daerah, hal ini dilakukan guna meredam arus persaingan antar daerah. Dengan melakukan kerjasama antar daerah, masing-masing daerah yang bekerja sama akan memiliki hubungan mutualisme yang baik.
- **Memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dengan memperhatikan kondisi lingkungan.** Buru Selatan merupakan daerah yang subur dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun begitu iklim di wilayah buru selatan ketika angin musim timur tiba sangat buruk sekali, dimana curah hujan sangat tinggi. umumnya angin musim timur tiba pada bulan juni sampai September, namun terkadang datang lebih cepat ataupun lebih lambat dari biasanya. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi para petani, nelayan dan juga pada pelaku ekonomi, karena pada saat angin musim timur, Buru Selatan menjadi terisolasi dari dunia luar karena dalam rangka menjaga keselamatan, banyak jadwal penerbangan dan pelayaran ditunda karena kondisi cuaca. Oleh karena itu pemerintah Buru Selatan harus dapat mengantisipasi permasalahan tersebut, misalnya dalam sector pertanian, dengan mengembangkan sistem pertanian yang dapat menanggulangi besarnya curah hujan, atau dengan mengembangkan tanaman-tanaman yang cocok dengan kondisi iklim Buru Selatan.
- **Membuat regulasi mengenai penguatan ekonomi kerakyatan.** Sebagai daerah baru ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh Buru Selatan, diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM yang rendah,

tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya pendapatan asli daerah, dan ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Permasalahan tersebut menjadi lebih rumit dengan adanya tantangan dari luar seperti persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat, persaingan antar daerah, iklim yang tidak menentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Buru Selatan harus dapat menekan kelemahan yang dimiliki agar dapat menghadapi tantangan, salah satu caranya dengan membuat regulasi penguatan ekonomi rakyat dengan memperkuat sector riil, dan membuat program-program yang pro rakyat.

Dari keseluruhan analisis strategi yang penulis sampaikan diatas, ada beberapa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Buru Selatan, diantaranya ;

- **Revitalisasi sektor-sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah**, dengan merevitalisasi sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata. Revitalisasi sektor kehutanan dilakukan dengan dengan mengupayakan peningkatan produk bukan kayu (*non-timber forest product*), mengoptimalisasi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi, , memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 15.000Ha. Revitalisasi sektor pertanian dilakukan dengan mengembangkan agroindustri oleh masyarakat sehingga dapat memperkuat pendapatan dari sektor riil dan dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor Perikanan dengan pengembangan program perikanan tangkap skala kecil di desa-desa nelayan, pengembangan teknologi penangkapan produktif dan ramah lingkungan, pengembangan kemitraan usaha perikanan tangkap, dan merevitalisasi unit pelaksana teknis daerah bidang penangkapan ikan.
- **Pemanfaatan potensi sumber daya alam berupa komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi dalam perdagangan international**. Sektor pertanian merupakan sector yang sangat mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Buru Selatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bupati Buru Selatan diketahui bahwa salah satu cara mewujudkan pembangunan daerah adalah dengan melakukan revitalisasi pertanian,

karena pertanian merupakan penggerak perekonomian daerah. Oleh karena itu saat ini Buru Selatan melakukan revitalisasi bidang pertanian dengan cara mengembangkan produk unggulan daerah seperti Kelapa, Hotong, cengkeh, pala, dan jambu mete. Umumnya komoditas tersebut di jual ke Ambon dan Sulawesi, dan sebagian kecil dikonsumsi oleh masyarakat lokal.

- **Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.** Kondisi layanan pendidikan dan kesehatan di Buru Selatan masih sangat kurang, namun setelah terjadinya pemekaran wilayah, terlihat perkembangan yang signifikan atas layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah ini. Dengan dukungan dari pemerintah pusat yang berbentuk DAK (Dana Alokasi Khusus), saat ini Pemerintah Buru Selatan tengah melaksanakan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di lima kecamatan berupa gedung sekolah dan puskesmas. Selain itu, Pemerintah Buru Selatan juga menambah tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, serta memberikan insentif tambahan kepada mereka sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- **Pengembangan infrastruktur dan tata ruang.** Di beberapa wilayah di Buru Selatan saat ini sedang dilakukan pembangunan prasarana, seperti jalan, gardu listrik, pelabuhan gedung sekolah, puskesmas, dan beberapa kantor pemerintahan yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan telah terlihat peningkatan infrastruktur di wilayah Buru Selatan, diantaranya telah tersedianya akses jalan yang menghubungkan Namrole (ibu kota kabupaten) dengan Namlea (Ibu kota Kabupaten Buru), sehingga arus informasi, barang, dan jasa menjadi lebih mudah, Pemerintah Buru Selatan sedang mengupayakan pembangunan akses jalan yang menghubungkan lima kecamatan, namun sampai saat ini masih dalam proses, karena kurangnya dana. Pembangunan gardu listrik juga sedang dalam proses, nantinya gardu listrik yang dibangun di ibukota Kabupaten akan menyuplai listrik untuk tiga kecamatan yakni kecamatan Namrole sendiri, Kepala Madan dan kecamatan Ambalau. Sedangkan untuk kecamatan Leksula dan Waesama

telah di suplai oleh gardu listrik yang ada dikecamatan Waesama, dengan begitu listrik dapat tersedia sepanjang hari.

- **Meningkatkan daya saing koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelompok.** Pemerintah Buru Selatan ini memiliki program pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah pengembangan kemitraan usaha perikanan tangkap, pengembangan kelompok masyarakat pesisir, dan pemberian kredit lunak melalui koperasi.
- **Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial.** Pemerintah Daerah Buru Selatan memiliki program bedah rumah miskin, dimana pemerintah daerah mendata masyarakat miskin kemudian memberikan santunan dan bantuan dengan memperbaiki rumah mereka agar layak huni. Program ini didukung oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Keberhasilan strategi diatas dalam mewujudkan visi/tujuan pembangunan yakni terwujudnya persaudaraan yang rukun, mandiri, adil, berkualitas dan sejahtera sangat bergantung kepada komitmen dari semua *stakeholders* pembangunan yakni masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Buru Selatan sendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan, jadi apabila pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sebagai mana mestinya, masyarakat dapat menanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Buru Selatan. Peran swasta biasanya sebagai penyedia modal (*investor*) yang membantu pelaksanaan pembangunan daerah, sedangkan peran Pemerintah Daerah adalah mengurus dan mengatur segala urusan dan kepentingan masyarakat, untuk itu pembangunan daerah sangat membutuhkan kapasitas lembaga yang kuat dari unsur birokrasi, dan dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, dapat penulis sampaikan bahwa Pembangunan Kabupaten Buru Selatan hendaknya diprioritaskan pada tiga hal, yakni :

- 1) Pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor penggerak perekonomian daerah guna mendukung distribusi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Pengembangan potensi sumber daya alam secara maksimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah melalui penguatan sektor riil
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik bagi masyarakat di semua wilayah Buru Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan.

4.2.4 Perbandingan Prioritas Pembangunan Buru Selatan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru

Sebelum Kabupaten Buru Selatan memiliki RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, Perencanaan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan Buru Selatan disusun berdasarkan RPJMD milik Kabupaten Buru. Untuk melihat tingkat relevansi antara prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru sebagai kabupaten induknya, penulis akan membandingkan visi dan misi kedua daerah, strategi yang dimiliki oleh kedua daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, dan yang terakhir adalah membandingkan prioritas pembangunan kedua daerah.

4.2.4.1 Visi / Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan Kabupaten Buru selatan seperti yang dirumuskan dalam Visi Pembangunannya adalah “ Terwujudnya Persaudaraan yang Rukun, Mandiri, Adil, Berkualitas dan Sejahtera”. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bupati Buru Selatan, dapat diketahui bahwa perumusan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan didasarkan atas beberapa alasan yakni yang pertama adalah kondisi masyarakat Buru Selatan yang bersifat heterogen, yang rentan dengan terjadinya konflik, untuk menghindari hal tersebut maka hal yang pertama harus dilakukan adalah memupuk rasa persaudaraan yang merupakan modal dasar

pembangunan, hal ini juga terlihat jelas dari moto yang dimiliki Buru Selatan yakni “Lolik Lalen Vedak Vena” yang berarti satukan semangat membangun negeri. Kedua, potensi sumber daya alam yang sangat besar merupakan suatu keunggulan yang dapat dijadikan modal bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi masyarakat.

“kita ini adalah daerah baru ya mbak, jadi pada tahap pertama pembangunan Buru Selatan diupayakan untuk memperkuat ikatan persaudaraan...karena kita-kita ini masyarakat yang heterogen yang terdiri dari suku dan memeluk agama yang berbeda juga...ini potensi konflik toh...jadi kita mau...berbenah diri dululah..kalau kita solid, rukun, damai, insya Allah pembangunan akan berjalan dengan mulus..kalau kita sudah bisa bersatu...tinggal cari jalan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berberkal potensi yang kita punya” (Bupati Buru Selatan)

Tujuan pembangunan Kabupaten Buru seperti yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buru tahun 2007-2012 adalah “ **Terwujudnya Kabupaten Buru Sebagai Kawasan Tumbuh Cepat Berbasis Pertanian Menuju Masyarakat Sejahtera dan Demokratis**” . berdasarkan wawancara dengan staf Bappeda Kabupaten Buru, Bapak Husein Sanaky, dapat diketahui bahwa pemusatan visi Kabupaten Buru dilakukan dengan mempertimbangkan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku.

“ Visi Pembangunan Buru Selatan adalah “Terwujudnya Kabupaten Buru Sebagai Kawasan Tumbuh Cepat Berbasis Pertanian Menuju Masyarakat Sejahtera dan Demokratis. Kenapa basis pertanian?...karena dalam Business Plan Provinsi Maluku, Daerah Buru ditetapkan sebagai kawasan lumbung pangan dan lumbung ternak....nah..kalau sebagai kawasan tumbuh cepat karena...lokasi Buru yang sangat strategis yang berada pada jalur ALKI 3 ...bisa di Bilang Buru ini adalah pintu gerbang Maluku...sehingga ramai dilalui pelayaran dan perdagangan baik nasional maupun internasional”

Sedangkan **Sejahtera** mengandung makna terbebasnya masyarakat Kabupaten Buru dari belenggu kemiskinan, ketidakmampuan, aman dan tentram serta terpenuhinya standar hidup yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan **Demokratis** memiliki arti berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, dalam jangka menengah diharapkan dapat menstimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi dalam

mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan dan mempertahankan Negara serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta mencintai lingkungannya termasuk sumberdaya alam lokal yang ada (hak ulayat).

Dari hasil membandingkan visi/tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh kedua daerah, dapat penulis sampaikan bahwa tujuan pembangunan kedua daerah relevan dalam hal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya, karena pada hakikatnya tujuan pembangunan daerah maupun nasional adalah mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Namun begitu sebagai daerah baru Buru Selatan lebih menekankan pembangunannya bagi terwujudnya persaudaraan yang rukun yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkualitas, sedangkan visi Kabupaten Buru sudah diarahkan kepada pembangunan Buru sebagai kawasan tumbuh cepat dengan basis pertanian. Kedua daerah memiliki cara pandang dan dasar pertimbangan yang berbeda dalam penentuan visi tersebut, penentuan Visi Kabupaten Buru cenderung dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan Provinsi Maluku, sedangkan penentuan visi atau tujuan pembangunan Buru Selatan disusun murni berdasarkan pertimbangan kondisi dan kebutuhan masyarakat Buru Selatan sendiri.

4.2.4.2 Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi atau tujuan pembangunan, masing-masing daerah memiliki strategi yang berbeda. Strategi pembangunan Buru Selatan ditetapkan berdasarkan analisis SWOT dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki dan dihadapi oleh Buru Selatan, sedangkan penentuan strategi Kabupaten Buru dilakukan hanya berdasarkan pengenalan terhadap lingkungan internal dan eksternalnya saja yakni, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan namun tidak dianalisis lebih lanjut, seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel.13 Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Buru

Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik masyarakat yang sadar akan pentingnya kerukunan antar umat beragama; - Potensi sumber daya alam yang besar; - Tersedianya infrastruktur ekonomi, lembaga keuangan perbankan, dan koperasi; - Komitmen besar dari pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan; - Dukungan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan; - Adanya komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha sebagai mitra dalam menginisiasi, mengkreasikan dan menginovasikan akselerasi pembangunan daerah.
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> - Disparitas antar daerah dan antar masyarakat terutama di wilayah pedalaman dan pesisir; - Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; - Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah; - Produk daerah masih belum memiliki daya saing tinggi terhadap produk daerah lain.
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> - Disahkannya undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk mengelola wilayahnya; - Inpres No.7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia; - Keputusan Provinsi Maluku yang menetapkan Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan dan lumbung ternak; - Letak geografis Kabupaten Buru yang berada pada jalur ALKI III, merupakan peluang bagi Kabupaten Buru untuk meningkatkan perekonomiannya karena dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal international yang melewati jalur tersebut.
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya penegakkan supremasi hukum dan HAM - Pengaruh era globalisasi dan teknologi yang secara simultan sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat; - Letak Kabupaten Buru yang berada pada jalur ALKI III sangat terbuka bagi masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya lokal. - Perdagangan bebas AFTA tahun 2003, merupakan tantangan untuk meningkatkan daya

	saing (kompetitif advantage dan komperatife advantage)
--	--

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan pembangunan daerah Buru, Pemerintah Kabupaten Buru menyusun strategi pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan pemerintah dalam melayani masyarakat;
- Memajukan mutu pendidikan yang berbasis kompetensi dan sumber daya lokal serta peningkatan peran pemuda dan olah raga;
- Meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung;
- Revitalisasi pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha ekonomi kecil dan menengah, serta mendorong peran koperasi dan swasta;
- Meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah;
- Menciptakan keterkaitan intra dan antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
- Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Meningkatkan kehidupan politik masyarakat yang demokratis;
- Menegakkan supremasi hukum yang menjiwai tegaknya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan keadilan
- Menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- Memantapkan landasan kehidupan beragama sebagai kekuatan moral spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat;
- Mewujudkan kehidupan sosialbudaya yang berkepribadian dinamis, kreatif serta mengembangkan potensi budaya lokal sebagai asset wisata;

Strategi pembangunan Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan “Persaudaraan yang Rukun, Mandiri, Adil, Berkualitas dan dan Sejahtera” adalah sebagai berikut:

- Melakukan revitalisasi, peningkatan produktivitas, dan inovasi daya cipta hasil prodak hasil pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan investasi;
- Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal;
- Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelompok;
- Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan;
- Pengembangan infrastruktur dan tata ruang;
- Pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial;
- Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
- Pengembangan pendidikan berbasis moral dan keagamaan;
- Peningkatan kesadaran hukum;
- Mengmbangan pertanian yang selaras dengan lingkungan;
- Pemberdayaan kelompok masyarakat;
- Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian dan perikanan kelatan;
- Regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah;
- Peningkatan akses transportasi dan informasi;
- Rehabilitasi lahan dan hutan;
- Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Dari penjabaran mengenai strategi kedua daerah diatas, yakni Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru, apabila dilakukan perbandingan maka, dapat penulis sampaikan bahwa hampir semua strategi pembangunan Kabupaten Buru juga digunakan oleh Kabupaten Buru Selatan khususnya dalam hal

pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang penulis jabarkan dalam Tabel 14 dibawah ini

Tabel.14

Pebandingan Strategi Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru

Kabupaten Buru		Kabupaten Buru Selatan
Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan pemerintah dalam melayani masyarakat	=	Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (<i>good governance</i>)
Memajukan Mutu Pendidikan yang berbasis kompetensi dan sumber daya lokal serta peningkatan peran pemuda dan oleh raga	=	Pengembangan pendidikan berbasis morak dan keagamaan
Meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung	=	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan
Revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan	=	Melakukan revitalisasi, peningkatan produktivitas, dan inovasi daya cipta hasil prodak hasil pertanian dan perikanan
Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha ekonomi kecil dan menengah, serta mendorong peran koperasi dan swasta	=	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelompok
Peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah	=	Meningkatkan investasi Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal
Menciptakan keterkaitan intra dan antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur	=	Pengembangan infrastruktur dan tata ruang
Melestarikan SDA dan LH	=	Rehabilitasi lahan dan hutan Mengembangkan pertanian yang selaras dengan lingkungan
Menegakkan supremasi hukum yang menjiwai tegaknya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan keadilan	=	Peningkatan kesadaran hukum
Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif serta mengembangkan potensi budaya lokal sebagai asset wisata	=	Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Hal ini dapat dipahami karena mereka memiliki permasalahan pembangunan dan potensi daerah yang hampir sama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdurrahman Solissa selaku Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru Selatan

“ yah...memang tidak dapat dipungkiri dan saya yakin pastinya ada strategi pembangunan kabupaten Buru Selatan yang sama dengan strategi pembangunan Kabupaten Buru...karena kita punya karakteristik wilayah dan masalah yang hampir sama...tapi saya berani bilang walaupun strategi pembangunan kita hampir sama tapi itu merupakan hasil dari analisis kita sendiri bukan semata-mata mengadopsi strategi Buru...”

Berdasarkan analisis penulis, perbedaan diantara kedua nya adalah karena Kabupaten Buru Selatan merupakan daerah otonom baru maka permasalahan yang dihadapi lebih kompleks dari Kabupaten Buru yang sudah mekar 13 tahun yang lalu , seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, sarana transportasi yang masih sangat terbatas, dan rendahnya pendapatan asli daerah, oleh karena itu strategi Buru Selatan lebih banyak dari pada strategi Kabupaten Buru karena permasalahan yang dihadapi Buru Selatan juga lebih banyak. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari cara penyusunan strategi pembangunannya. Strategi pembangunan Kabupaten Buru dilakukan hanya satu tahap yakni tahap identifikasi lingkungan internal dan eksternal, sehingga penulis menilai bahwa strategi yang dipilih tidak terlalu tepat dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Buru, khususnya dalam hal mewujudkan Kabupaten Buru Sebagai Kawasan Tumbuh Cepat berbasis pertanian dimana strategi bidang pertanian tidak terlalu di fokuskan. Seperti yang dapat di lihat pada tabel 15.

Berbeda dengan Kabupaten Buru, penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Buru Selatan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama adalah identifikasi lingkungan internal dan eksternal, dan yang kedua adalah analisis SWOT, dengan begitu terlihat jelas keterkaitan antara visi yang ingin dicapai dengan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi/tujuan pembangunan, seperti yang dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel.15
Analisis Kesesuaian Visi dengan Strategi
Pembangunan Kabupaten Buru

Visi Pembangunan	Strategi pembangunan
Tumbuh Cepat	Meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah
	Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha ekonomi kecil dan menengah, serta mendorong peran koperasi dan swasta
	Menciptakan keterkaitan intra dan antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur
	Mewujudkan kehidupan sosialbudaya yang berkepribadian dinamis, kreatif serta mengembangkan potensi budaya lokal sebagai asset wisata
Basis Pertanian	Revitalisasi pertanian, peternakan, dan perikanan
	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Demokratis	Meningkatkan kualitas aparatur lembaga dan pemerintah dalam melayani masyarakat
	Meningkatkan kehidupan politik masyarakat yang demokratis
	Menegakkan supremasi hukum yang menjwai tegaknya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan keadilan
	Menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat
	Memantabkan landasan kehidupan beragama sebagai kekuatan moral spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat
Sejahtera	Memajukan mutu pendidikan yang berbasis kompetensi dan sumber daya lokal serta peningkatan peran pemuda dan olah raga
	Meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung;

Tabel.16
Analisis Kesesuaian Visi dengan Strategi
Pembangunan Kabupaten Buru Selatan

Visi pembangunan	Strategi Pembangunan
Terwujudnya Persaudaraan yang Rukun	Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
	Pengembangan pendidikan berbasis moral dan keagamaan
Mandiri	Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian dan perikanan kelatan
	Mengembangkan pertanian yang selaras dengan lingkungan;
	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
	Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal
	Meningkatkan investasi
	Melakukan revitalisasi, peningkatan produktivitas, dan inovasi daya cipta hasil prodak hasil pertanian dan perikanan
	Rehabilitasi lahan dan hutan
Adil	Peningkatan kesadaran hukum
	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (<i>good governance</i>)
Berkualitas	Peningkatan akses transportasi dan informasi;
	Pengembangan infrastruktur dan tata ruang;
	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan;
	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik
Sejahtera	Regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah;
	Pemberdayaan kelompok masyarakat;
	Pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial
	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelompok
	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Arah kebijakan pembangunan merupakan *guideance* dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Buru sebagai Kawasan Cepat Tumbuh dengan basis pertanian, maka pembangunan Kabupaten Buru diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar guna mengatasi keterisolasian wilayah dan pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis pertanian melalui pengembangan potensi ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan demokratis, kebijakan pembangunan diarahkan pada optimalisasi fungsi organisasi dan manajemen pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan masyarakat, termasuk jangkauan pemenuhan pelayanan di bidang sosial dan ekonomi pada wilayah-wilayah terpencil. Hal ini juga disampaikan oleh staf Bappeda Kabupaten Buru, Bapak Husein Saleky

“ ..untuk mencapai visi pembangunan Kabupeten Buru pembangunan Kabupaten Buru diarahkan pada pengembangan ekonomi keraktyatan, seperti misalnya pengembangan perikanan tangkap dan peningkatan dukungan kepada usaha kecil mikro menengah...selain itu juga ekonomi daerah harus ditingkatkan..misalnya dengan pengembangan kawasan sentra produksi...contoh...pengembangan kawasan budidaya laut, peningkatan hasil pertanian dan peternakan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kalau untuk..dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi dilakukan dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi orpol dan ormas” (Husein Saleky)

Berdasarkan data yang berhasil penulis dapat, kebijakan pembangunan Buru Selatan untuk mewujudkan visi pembangunan Buru Selatan diarahkan untuk *pertama*, melakukan pembinaan dan pengembangan rasa persaudaraan dengan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang inklusif. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat dan potensi daerah secara maksimal dengan memperkuat basis ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, penegakkan supremasi hukum dan penghargaan terhadap HAM. *Keempat*, pembangunan sumber daya manusia secara proporsional dan profesional guna mendukung proses pembangunan.

Setelah dilakukan analisis terhadap arah kebijakan pembangunan kedua daerah, dapat terlihat bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buru lebih di fokuskan pada pengembangan ekonomi daerah, sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan penguatan entitas persaudaraan guna mendukung pengembangan dan pembangunan daerah dalam segala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penentuan prioritas merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan strategik. Setelah permasalahan yang dihadapi berhasil diidentifikasi, maka tahap selanjutnya dilakukan menyusun dan mengurutkan permasalahan tersebut berdasarkan tingkat *Urgency*-. Begitupun halnya dalam melaksanakan pembangunan daerah, setelah kita mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh sebuah daerah maka setelah itu harus ditentukan permasalahan mana yang harus segera di selesaikan, penentuan permasalahan tersebut kemudian dijadikan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawan cara dengan staf Bappeda Kabupaten Buru, Bapak Husein Sanaky, diketahui bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Buru ditetapkan berdasarkan visi/tujuan, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Kabupaten Buru.

“ prioritas pembangunan Buru.....kalau ga salah...ya saya rasa prioritas pembangunan Kabupaten Buru ditetapkan dengan pertimbangan Visi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Buru.....berangkat dari situ kita lihat tujuan yang mau kita capai apa...lalu kita susun strategi utuk mencapai tujuan itu...lalu kemudian disusun arah kebijakan pembangunannya...setelah semua tersusun baru kita tentukan...mana yang harus diprioritaskan atau perlu ditangani secepatnya..” (Husein Saleky)

Keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Buru. Berdasarkan data tersebut dapat penulis sampaikan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Buru dikelompokkan menjadi lima, yaitu :

- 1) Penguatan kapasitas pemerintahan di era otonomi daerah melalui pemantapan otonomi daerah dan peningkatan tata pemerintahan yang baik;
- 2) Meningkatkan kesadaran berpolitik serta mewujudkan rasa aman dan damai di masyarakat melalui upaya peningkatan pemahaman berpolitik

masyarakat, wawasan kebangsaan dan bela negara, dan juga peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

- 3) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi dan daya saing daerah;
- 4) Penataan ruang dan pengembangan wilayah Buru dengan melakukan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- 5) Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan lestari melalui pengembangan potensi dan konservasi sumber daya alam.

Berbeda dengan Kabupaten Buru, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan didasarkan atas hasil analisis isu-isu strategis pembangunan daerah, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ekonomi dan Pembangunan Bapak Abdurrahman Solissa

“ prioritas pembangunan Buru Selatan disusun disesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini...kemudian dipilih mana yang harus diselesaikan dulu...seperti misalnya masalah infrastruktur..itu harus segera diselesaikan...karena infrastruktur sangat penting bagi mobilisasi barang dan jasa pengaruhnya besar sekali, lalu kemiskinan...masalah kemiskinan juga penting...kalau masih banyak rakyat kita yang miskin bagaimana kita bisa maju..nanti di demo masyarakat khan?...trus ada lagi masalah antar suku dan antar agama...banyak sekali terjadi konflik di Maluku...itu kita harus atasi jangan sampai terjadi konflik..apalagi kita bersaudara toh?..” (Abdurrahman Solissa)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan juga data-data yang berhasil penulis kumpulkan, dibawah ini merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan :

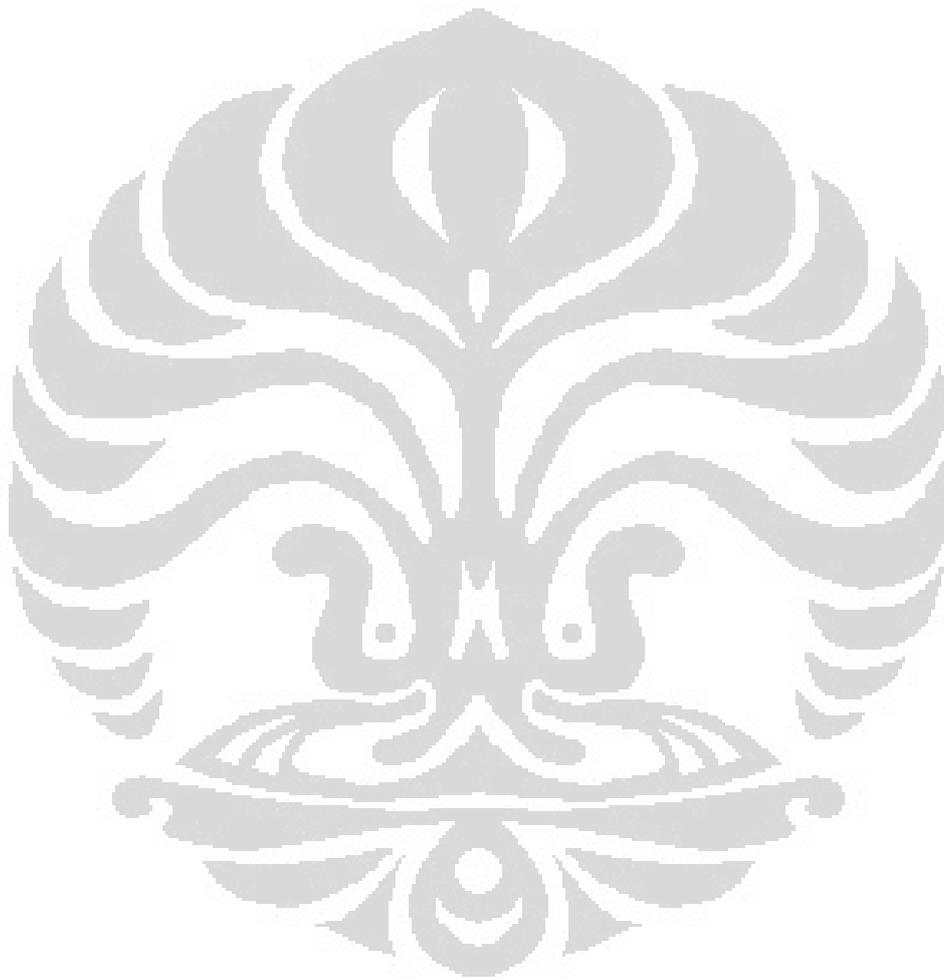
- 1) Masalah Keragaman Sosial Budaya - untuk mengatasi masalah ini maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berusaha mengembangkan dan membina rasa persaudaraan hal ini juga terlihat dari Moto Kabupaten Buru Selatan yakni, *Lolik Lalen Vedak Vena* yang berarti satukan hati membangun negeri;
- 2) Masalah Pendidikan dan Kesehatan – kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat Buru Selatan sampai saat ini masih belum dikatakan baik, oleh karena itu Pemerintah Buru Selatan memprioritaskan pembangunan kedua

bidang ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Buru Selatan;

- 3) Kemiskinan dan Pengangguran – angka kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Buru Selatan masing tinggi yakni mencapai 27 % (kemiskinan) dan 10 % (pengangguran) pada tahun 2011. Oleh karena itu permasalahan ini dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Daerah Selatan;
- 4) Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata – Tiga sektor ini merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi bagi pemasukan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Buru Selatan mengeluarkan kebijakan revitalisasi ketiga sektor tersebut agar bisa dikelola secara optimal;
- 5) Permasalahan Infrastruktur – salah satu yang menyebabkan perekonomian daerah Buru Selatan rendah adalah karena kurangnya infrastruktur daerah guna menunjang distribusi barang dan jasa oleh karena itu sektor ini perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki perekonomian daerah;
- 6) Lingkungan – untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di Buru Selatan, maka Pemerintah Buru Selatan memandang perlu penanganan sektor ini dengan pengesahan undang-undang lingkungan hidup di tingkat daerah;
- 7) Tata Kelola Pemerintahan yang baik – salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kapasitas lembaga dan sumber daya aparatur yang masih rendah sehingga seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Buru Selatan berupaya meningkatkan kualitas aparatur daerah melalui penguatan kapasitas lembaga agar dapat memberikan pelayanan yanbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan perbandingan prioritas pembangunan antara Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru, dapat terlihat perbedaan diantara keduanya. Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Buru dipilih dengan memperhatikan Visi/tujuan, arah kebijakan dan strategi pembangunan, sedangkan Penentuan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru didasarkan atas hasil analisis isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga terlihat jelas tidak ada relevansi antara

prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Buru.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

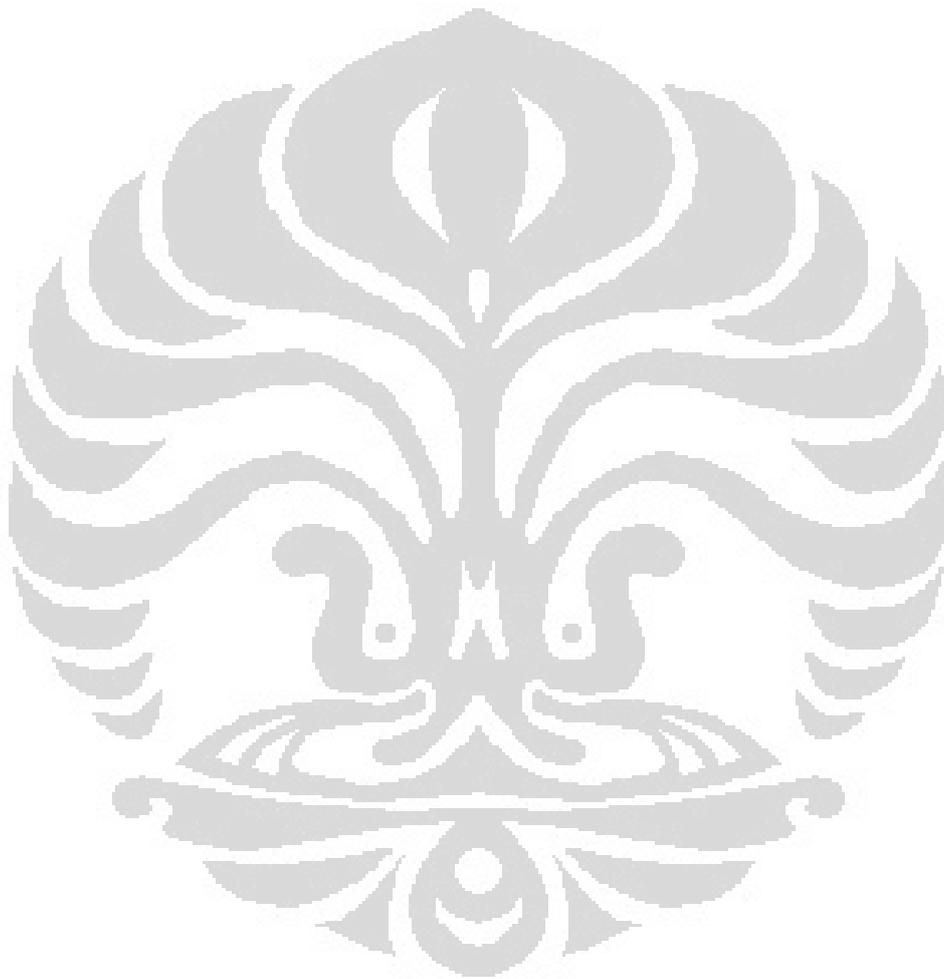
5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai relevansi Prioritas Pembangunan Buru Selatan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru berdasarkan kondisi faktualnya maka dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan terlihat jelas dalam strategi pembangunan yang dimiliki kedua daerah, sedangkan pada tujuan pembangunan, arah dan kebijakan, dan juga prioritas pembangunan kedua daerah sangat berbeda sekali. Alasan yang dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang ada adalah walaupun karakteristik wilayahnya hampir sama, lingkungan dan masyarakat yang hampir sama, cara pandang dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan penetapan tujuan pembangunan sangat berbeda, dengan begitu arah kebijakan prioritas pembangunan kedua daerah tersebut juga berbeda. Dengan Begitu Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Baru tidak selalu mengadopsi perencanaan pembangunan kabupaten induknya, perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut, karena keberhasilan strategi pembangunan satu daerah dalam melaksanakan pembangunan belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang lain.

5.2 Saran

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, hendaknya dibarengi dengan pengembangan kapasitas lembaga pemerintah agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Kasus yang sering dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah kecurangan dalam pengelolaan sumber daya daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya keuangan, akibatnya adalah kerugian bagi negara dan khususnya bagi masyarakat setempat. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan daerah hendaknya memperhatikan keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan permasalahan bagi daerah dikemudian hari, oleh karena itu

perlu dibuat suatu kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan. Paran terakhir yang dapat penulis sampaikan adalah terkait masalah disparitas antar daerah. Pembangunan daerah harusnya dilaksanakan secara menyeluruh sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, hal ini sangat penting dalam rangka menjaga entitas daerah.



Daftar Pustaka

Buku

- Baratakusumah, Dedi Supriyadi & Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005
- Baratakusumah, Dedi Supriyadi, Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2001
- Bryson, John M. *Strategic Planning For Public and Nonprofit Organization*. Jossey-Bass Publishers. San Fransisco, 1995
- Burhan N , *Perencanaan Strategik* (cetakan ke dua). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1989
- Chaston, Ian. *Public Sector Management : Mission Impossible*. Saffron House. London, 2011
- Cheema, Shabbir, Dennis Rondinelli. *Dezentralizing Governance Emerging Concepts and Practice*. Brrokings Institution Press. Washington DC, 2007
- D. Riant Nugroho., *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2002.
- David, Fred R, *Strategic Management : Cases*. Prentice Hall. Pensiylvania, 2004
- Emmerich, Herbert. *Handbook of Public Administration : Current Concept and Practice with Special Reference to Developing Countries*, United Nation. 1961
- Friedman, John, *Regional Development Planning : "The story of Collaboration"*. *International Regional Science Review*. 2001 hal 386-395
- Glasson, John. *"An Introduction of Regional Planning"*. Hutchinson & Co. London, 1975
- Haeruman H, *Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Busines Inovation Center Indonesia, 2001
- Hoessein, Bhenyamin , *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah dari Era Orde Baru ke Era Reformasi* (edisi revisi). Jakarta, 2011.
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA Fisip UI. Depok, 2007
- Jatmiko, Agung, *Perencanaan dan Analisis Pembangunan Daerah*, Universitas Gajah Mada. Jogjakarta, 2010
- Johnson, Gerry, Kevan Scholes, Richard Wittington, *Exploring Corporate Strategy*, 7th ed. FT Prentice Hall. Essex, 2005
- Lembaga Ketahanan Nasional. *Pembangunan Nasional*. PT.Balai Pustaka.Jakarta, 1997
- Meck, Stuart, (2007) *Growing Smart Legislative Guidebook : Model Statues for Planning and the Management of Change* . In Stenberg, Carl & Austin Susan (Ed) *Managing Local Government Service*. ICMA, Washington DC

- Muluk, Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. ITS Press. Surabaya, 2009
- Muslich Masnur. *Bagaimana Menulis Skripsi*. Bumi Aksara. Jakarta, 2009
- Polese, Mario (2006) *From Regional Development to Local Development : On The Life, Death and Rebirth of Regional Science as a Policy Relevant Science*. In Button, Keneth, Peter Nijkamp. *Regional Planning*. Edward Elgar Publishing Ltd. Massachusetts
- Riddle, Robert. *Regional Development Policy*, St.Martin Press. New York, 1985
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Haji Masagung. Jakarta, 1994
- Steiner, George A, John B Miner. *Management Policy and Strategy*, edisi ke dua. Macmillan. Michigan ,1977
- Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 1976
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1993
- , *Manajemen Pembangunan*. CV Haji Mas Agung. Jakarta, 1991
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopadidjadja, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Cetakan ke tujuh, Haji Masagung, Jakarta, 1993
- , *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan*. LP3ES. Jakarta, 1988
- Turner, Mark, David Hulme. *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. Macmillan Press. London, 1997

Jurnal

- Brata, Aloysius Gunadi, “*Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs. Kepentingan Elit*”. *Jurnal Universitas Atmajaya*, 2008
- Iryanto, *Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota melalui Pendekatan Wilayah*, *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 2006
- Nuraini,ida, *Analisis Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang Bagian Timur*. *Jurnal Perencanaan Departemen Sosial*, 2010

Karya Ilmiah

- Octiyarti, Harini, *Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Palembang*, 2002
- Yuliati, Emie, *Evaluasi Pemekaran : Studi Kasus Kabupaten*, 2011

Publikasi Elektronik

Administrator. "Buru Selatan Resmi Dimekarkan Menjadi Kabupaten Baru". *Info Maluku* 07 Februari 2011. 07 Februari 2011 <<http://informasi-maluku.blogspot.com/2011/02/buru-selatan-resmi-dimekarkan-menjadi.html>>

Mahkamah Konstitusi. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. September 2009. 17 September 2009 <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita/txt>>

Pemerintah Kota Sukabumi. *Desentralisasi vs Good governance*. by Erlangga, Yadi M. April 2010. 23 April 2010 <<http://pemkotsukabumi.go.id/detailberita/asp>>

Badan Pengawas Keuangan. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Agustus 2008. 8 Agustus 2008 <www.bpk.go.id>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Kebijakan Umum APBD TA 2012*. 2012 <www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kota Depok . *Layani Masyarakat Lewat Pemekaran Wilayah*. Desember 2009. 29 Desember 2009 <<http://pemkotdepok.go.id/berita>>

"Pemekaran Wilayah Indonesia Terbesar di Dunia". *Tempo.com* 28 April 2011. 28 April 2011 <<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/28/063383242/Pemekaran-wilayah-indonesia-terbesar-didunia>>

"Tagob Unggul Tipis". *Pilkada Ambon.com* 13 April 2008. 3 April 13 April 2008 <<http://www.pilkadaambon.com/2011/04/tagob-unggul-tipis.html>>



Lampiran I Pedoman Wawancara Mendalam

I. Pemerintah daerah Buru Selatan (Bupati dan Bappeda) :

1. Apa alasan dan tujuan pemekaran wilayah Kabupaten Buru ?
2. Bagaimana kondisi faktual Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran (Buru dan Buru Selatan) sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran?
3. Apa saja pertimbangan /faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pembagian wilayah, apakah berdasarkan alasan historis, pembangian sumber daya, letak geografis, atau alasan lainnya? dan bagaimana pengaruh faktor-faktor atau pertimbangan tersebut terhadap skala prioritas dan strategi pembangunan Buru Selatan?
4. Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik yang sudah dirasakan oleh masyarakat setelah adanya pemekaran wilayah Buru? dan Apa saja indikasinya ?
5. Apa saja Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Buru Selatan saat ini?
6. Apa saja potensi yang dimiliki Buru selatan yang dapat dijadikan daya ungkit bagi sektor lain ?
7. Strategi apa yang dimiliki Buru selatan dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan tersebut dan apa alasannya ?
8. Sejauh mana peran kepala daerah dan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ? bagaimana hubungan antara kedua belah pihak dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut ?
9. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana pembangunan daerah Buru Selatan ?
10. Adakah program pembangunan kabupaten induk yang diadopsi kedalam rencana pembangunan kabupaten Buru Selatan?

II. DPRD Buru Selatan

1. Siapa saja anggota DPRD Buru Selatan dan bagaimana komposisinya berdasarkan partai politik ? siapa Pemimpin DPRD Buru Selatan saat ini dan berasal dari partai apa?
2. Kriteria / unsur yang harus dipenuhi dalam membuat suatu rencana pembangunan yang bisa mendapatkan persetujuan para dewan ?
3. Sejauhmana dukungan DPRD dalam pembangunan daerah dan apa bentuknya ?

4. Adakah pengaruh konstelasi politik di DPRD terhadap identifikasi kondisi faktual daerah dan dalam penentuan prioritas pembangunan Buru Selatan?

III. Pemerintah Pusat : Bappenas sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Bagaimana peran bappenas dan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan perencanaan daerah?
2. Apa faktor-faktor yang seringkali menjadi kendala dalam pembangunan di daerah daerah dan bagaimana cara menanganinya?
3. Bagaimana efektifitas Musrenbangda sebagai bentuk partisipasi masyarakat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah?
4. Sejauhmana kesesuaian prioritas pembangunan buru selatan terhadap strategi pembangunan nasional saat ini?

IV. LSM, Masyarakat dan Akademisi

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pemekaran Buru/pembentukan Buru Selatan ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dan OMS terhadap keadaan Buru Selatan setelah Pemekaran?
3. Apa saja manfaat pemekaran yang sdh dapat dirasakan sampai saat ini?
4. Sejauhmana pengetahuan rakyat terhadap prioritas pembangunan Buru Selatan? Dan bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut?
5. Sejauhmana peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan
6. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Daerah Buru Selatan saat ini?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Mendalam

Keterangan :

Q : Pertanyaan

A : Jawaban

Nama : Bapak Tagob S Soulisa

Jabatan : Bupati Buru Selatan

Waktu : Jumat, 8 Juni 2012 pkl. 19.00 WIT

Tempat : Kediaman Dinas Bupati Buru Selatan, di Namrole

Q Apakah alasan yang mendasari pemekaran Kabupaten Buru ?

A Ada dua alasan Utama yakni alasan ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat (spin of control). Kedua alasan tersebut yang menyebabkan tumbuhnya keinginan dari masyarakat untuk membentuk kabupaten baru. Dengan adanya pemekaran diharapkan akan ada perubahan-perubahan kearah yang lebih baik bagi berbagai aspek kehidupan di masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang/jauh guna mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Dari sisi ekonomi pembentukan kabupaten baru dapat mempermudah distribusi barang dan jasa, yang sebelumnya dilakukan melalui Buru sekarang dapat dilakukan secara langsung. Hal tersebut juga membawa peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur dalam rangka mendukung distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Buru Selatan.

Q Adakah Wadah yang menampung Aspirasi masyarakat Buru Selatan sebelum adanya pemekaran wilayah?

A Ada, namanya LPBS (Lembaga Pengembangan Buru Selatan) yang bertugas sebagai motor penggerak pemekaran.

Q Apa saja Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buru Selatan ?

A Ada banyak sekali potensi yang dimiliki Buru Selatan tergantung dilihat dari sektor Apa. Di Sektor perikanan kita memiliki ikan tuna, ikan laut dalam yakni ikan kelabus kecil dan kelabus besar.

Q sejauhmana pemanfaatan potensi perikanan sampai saat ini ? apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar atau sudah mulai dijual ke luar Buru?

A Sampai saat ini ikan-ikan tersebut kebanyakan masih dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat Buru Selatan Sendiri walaupun ada juga yang diekspor keluar

daerah namun jumlahnya tidak banyak (berskala kecil). Hal ini disebabkan belum tersedianya perlengkapan yang memadai dan penangkapan ikan masih dilakukan dengan cara tradisional, belum dikelola secara Industri (berskala besar). Dari Sektor Pertanian kita memiliki cengkeh, coklat, kelapa, dan vanili.

Q Bagaimana dengan Sektor pertambangan? Bukankah Kepulauan Maluku selain karena rempah-rempahnya juga terkenal dengan potensi pertambangannya ?

A Dari Sektor pertambangan kita punya potensi emas, nikel, tembaga, bauksit, dan batu bara. Sedangkan dari sektor kehutanan kita memiliki hutan yang sangat luas, dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Hal ini yang dicari oleh para pengusaha atau para pengguna HPH karena dengan tingkat kesuburan yang tinggi menjamin tersedianya kayu dalam jangka waktu yang lama.

Q Jenis apa kayu yang terdapat di hutan-hutan di Buru Selatan?

A Kayu kelas satu yakni kayu besi dan kayu meranti merah.

Q Untuk sektor pertambangan, apakah sudah dikelola dengan baik atau apakah sudah ada investor yang mengelola sektor tersebut?

A Saat ini belum ada investor namun setelah terpilihnya bupati yang baru kami baru akan merencanakan untuk mencari jalan untuk menarik investor untuk masuk ke Buru Selatan. Masih ada beberapa kendala khususnya dalam menyiapkan perijinan seperti siup dan yang terkait dengan perijinan untuk perijinan pertambangan, sampai saat ini masih dalam proses administrasi.

Q Dalam pembagian wilayah antara kabupaten Buru dan Buru Selatan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan karakteristik masyarakatnya, potensi SDA nya atau krn faktor lain?

A Didasarkan oleh administrasi pemerintahan tapi didalamnya *include* adat, batasan budaya “Regentschaft” yakni *reinchaft* dibagian utara dan *Regent* di bagian Selatan, yang terdiri dari empat *Regent* Fogi, *Regentschaft* Masarete, *Regentschaft* Waesama, dan *Regentschaft* Ambalau.

Q Apa yang dimaksud dengan regentschaft ?

A Regentschaft adalah suatu pemerintahan adat yang dibentuk ketika jaman Belanda. Tetapi pada saat pemerintahan Belanda dulu sudah ada suatu pemerintahan adat yang disebut dengan “Magugu” artinya adalah Raja Tanah...raja tanah ada empat yang dua berkuasa di utara dan yang dua lagi berkuasa di selatan.

Q Apakah pembagian wilayah juga telah memperhitungkan keadilan potensi sumber daya alam bagi kedua daerah?

A Bagi ke dua daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tidak ada permasalahan, karena batas2 alam sudah jelas, hanya saja belum ditetapkan oleh

peraturan pemerintah karena sampai saat ini batas administratif antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan belum dikuatkan kedalam Peraturan Pemerintah. Saat ini kami sedang membentuk tim guna melakukan pembagian batasan wilayah termasuk didalamnya adalah orang dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, bakorsurtanal dan Kabupaten Buru juga.

Q Jadi dapat dikatakan bahwa pembagian wilayah telah memberikan bekal /potensi alam yang cukup bagi Buru Selatan untuk melaksanakan pembangunan.

A Ya, Saya Rasa cukup

Q Apa saja permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Buru Selatan Pada Saat ini?

A ya tentu saja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ingin melakukan percepatan permbangunan di semua sektor namun ada tiga sektor yang dikedepankan yakni sektor Perhubungan, Kesehatan dan pendidikan. Kendala yang dihadapi diseluruh wilayah pemekaran adalah kurangnya pembiayaan. Makanya pemerintah daerah sangat memerlukan dana-dana hibah maupun dana-dana transfer langsung dari pemerintah pusat. Dana tersebut dapat APBD yang sudah ditetapkan dengan DAU dan DAK dalam rangka penguatan pembangunan. Masalah yang kedua adalah masih terbatasnya potensi SDM, dengan jumlah penduduk yang masih sangat terbatas dan dengan cakupan wilayah yang sangat luas, kualitas penduduk yang masih jauh dari yang diharapkan, tentunya menjadi salah satu kendala utama, masalah ketiga (yang paling penting) adalah masalah geografis dimana tingkat curah hujan di Buru Selatan sangat tinggi, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan pembangunan dan perawatan infrastruktur. Kontur wilayah Buru juga sangat variatif (bergelombang) tidak seperti daerah lain seperti Jawa dan Bali, dan pulau2 lain yang datar....terdiri dari pegunungan, bukit. Dan permasalahan yang keempat adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh sebuah wilayah baru yakni "Hak penggunaan lahan". Dimana lahan-lahan yang tersedia sudah dikuasai oleh masyarakat secara adat, hal tersebut mengakibatkan penambahan cost atau beban pemerintah guna melakukan pembebasan lahan...belum lagi infrastruktur Buru Selatan yang terbatas...hal ini menjadi penghambat bagi pengembangan Buru Selatan itu sendiri khususnya dibidang ekonomi dan pelayanan umum

Q apakah permasalahan keterbelakangan dan Kemiskinan juga menjadi permasalahan yang krusial di Buru Selatan?

A bisa ya , bisa juga tidak, karena keseriusan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan keterbelakangan sangat serius sekali. Hal ini didukung juga dengan regulasi dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Saya juga telah melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mempercepat pengentasan permasalahan kemiskinan di daerah Buru Selatan. Salah satunya adalah dengan melakukan "bedah Rumah" bagi rakyat miskin dan juga dengan memberikan bantuan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang tidak memiliki kemampuan secara

ekonomis maupun secara fisik, sehingga harus ada intervensi pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup mereka agar menjadi layak salah satunya dengan membangun rumah mereka. Insya allah tahun ini kami akan menerima bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk membangun perumahan bagi rakyat miskin.

Q Bagaimana dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Buru Selatan?

A Mutu Pendidikan di Buru Selatan masih belum baik, itu sebabnya kita masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Buru Selatan ini....salah satunya karena kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kita masih rendah....secara kualitas maupun kuantitas..kita tidak hanya kekurangan sekolah...kita juga kekurangan guru..belum lagi wilayah Buru Selatan sangat luas dan terpencil...jadi guru-guru tidak tersebar dengan merata sampai kepedalaman.....ini yang mau kita perbaiki. Begitu pun dengan kondisi kesehatan di Buru Selatan....kita masih sangat kekurangan tenaga medis, peralatan kesehatan, obat-obatan.....dan lagi jumlah puskesmas di Buru Selatan sangat terbatas sekali dan penyebarannya tidak merata keseluruh daerah sampai dengan kepedalaman...suku Buru asli banyak tinggal dipegunungan yang jauh dan sangat terpencil...umumnya mereka lebih suka berobat ke tabib dengan ramuan tradisional...kecuali kalau sudah parah sekali mereka baru turun ke bawah....begitu juga dengan masyarakat yang ada diBuru Selatan...karena fasilitas kesehatan kita sangat minim dan tidak lengkap ...umumnya mereka lebih suka berobat ke kota Ambon...karena disana peralatan dan obatnya lebih lengkap.

Q RPJMD merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah, apa Visi dan Misi Bapak dalam Pembangunan Buru Selatan lima tahun ke depan?

A dalam rangka melaksanakan pembangunan di Buru Selatan, saya memiliki fokus terhadap tiga sektor Utama yakni perhubungan, kesehatan dan pendidikan yang ditunjang oleh sektor kemakmuran dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk mandiri sehingga mereka dapat menghasilkan nilai tambah dari produksi ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Mereka memiliki kebun kelapa, namun jauh dari pasar...jadi sekarang kita dekatkan pembelinya/pasarnya sehingga mereka tidak perlu menambah biaya transportasi lagi. Pembeli bisa langsung angkut dengan kapalnya dengan harga yang sama, kedua kita mau membina mereka agar mereka dapat memanfaatkan perkebunan yang mereka miliki seperti cengkeh...yang kita lakukan adalah membuat kelompok-kelompok petani cengkeh sehingga mereka dapat memberikan nilai tambah pada produksi cengkeh seperti misalnya dijadikan minyak siri dan sebagainya. Itulah makanya saya juga saat ini kita sedang menyiapkan tenaga-tenaga yang dapat membina kemampuan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Untuk menunjang sektor kesehatan kami juga telah mengirim tenaga medis untuk melanjutkan sekolah dibidang kedokteran dan keperawatan.

Q Hal tersebut merupakan investasi jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek apa yang Bapak rencanakan bagi masing-masing sektor?

A yang pertama adalah dengan menyelesaikan masalah rentang kendali dengan cara membuka akses khususnya akses darat yang menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di Buru Selatan sampai di pegunungan. Yang kedua kita juga meningkatkan kualitas dan kuantitas alat-alat transportasi yang ke kota Ambon maupun ke Provinsi guna mendukung distribusi barang dan jasa. Dari kesehatan kita memberikan insentif bagi para dokter PTT sehingga ada daya tarik dari dokter-dokter diluar untuk memberikan pelayanan di Buru Selatan, kita juga sudah melakukan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan telah menerima bantuan berupa alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Dan pada tahun ini saya telah mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat. Pada tahun 2011 kita telah membangun beberapa puskesmas baru dan juga peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas, dan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.

Q Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di Pemerintah Pusat?

A Sampai saat ini bantuan yang diberikan pemerintah pusat masih sebatas DAU dan DAK saja, sedang dana-dana lain belum ada kecuali untuk alat-alat kesehatan kami telah menerima bantuan dana TP (tugas Pembantuan) dari Kementerian Kesehatan.

Q Kalau dari Sektor pendidikannya apa yang perlu dilakukan?

A tentunya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah infrastruktur pendidikan, yang kedua Sarana, yang ketiga tenaga didik. Dari segi infrastruktur kita telah menambah ruang kelas baru dan menambah fasilitas ruangan, dimana setiap murid berhak mendapatkan satu kursi dan satu meja, dan rasio antara guru dengan murid juga dirasionalkan agar tidak terjadi ketimpangan. Kemudian guru-guru bidang studi juga harus ditambah dan dibina dengan program-program seperti meningkatkan kualitas guru, saat ini pemerintah daerah Buru Selatan telah memberikan beasiswa kepada seluruh guru yang ada di wilayah Buru Selatan yang akan melanjutkan pendidikannya dari akademi menjadi S1 maupun dari SLTA menjadi S1.

Q Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya pemekaran kondisi Buru Selatan jauh jauh lebih buruk dari pada kondisinya yang sekarang.

A Ya bisa dibilang begitu....jauh sekali dari aspek kesehatan, pendidikan, jauh sekali. Saat ini Buru selatan berada di urutan ke tiga di provinsi Maluku untuk kelulusan SLTA terbaik.

Q sehubungan dengan aspek institutional building, hal tersebut merupakan hal yang paling mendasar dalam rangka menghilangkan praktek KKN

A dalam rangka untuk memperkuat kapasitas institutional building dari aparatur, saya melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan dari unsur pemerintahan

kabupaten sampai dengan desa. Saya bekerjasama dengan BPKP dalam rangka melakukan pengawasan eksternal sebagai konsultan pembinaan administrasi keuangan dan juga BPK. Kemudian saya juga melakukan pengawasan internal diantara para pimpinan SKPD (satuan Kerja Perangkat daerah). Saya sebagai Bupati bersama Wakil Bupati akan melakukan pengawasan secara rutin terhadap seluruh pimpinan SKPD maupun lingkup pemerintah yang paling bawah.

Q Adakah penilaian kinerja yang secara khusus yang dilakukan tahunan?

A Ya...Ada...kita buat rapot tahunan dan juga melakukan pergeseran jabatan/pergantian tugas, hanya saja sebagai daerah baru ada banyak sekali kepentingan politik didalamnya. Banyak orang menganggap bahwa jabatan adalah warisan dan sebagainya, padahal jabatan dinilai dari hasil kinerja seseorang dan ada parameternya. Kita nilai dia secara objektif dan profesional, saya sendiri berupaya untuk melakukan hal itu....namun kepentingan politik cukup kuat juga dalam pemerintahan dan berupaya apa yang mereka inginkan dapat tercapai tapi sampai sekarang kita dapat membendung keinginan-keinginan tersebut.

Q Selama tiga tahun pertama, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan didasarkan atas RPJMD Kab. Buru, lalu apakah ada program prioritas pembangunan yang dirasa cocok dengan kondisi Buru Selatan? Atau memang prioritas pembangunan yang dimiliki Buru Selatan saat ini berbeda sekali dengan prioritas pembangunan Kab. Buru.

A prioritas pembangunan kita hampir sama Cuma kabupaten induk tidak memandang Buru Selatan sebagai pusat pelayanan masyarakat secara luas (regional) , melainkan melihat Buru Selatan sebagai daerah yang khusus melayani wilayahnya saja (spasial). Sehingga infrastruktur yang tersedia terbatas..termasuk juga infrastruktur yang akan dibangun juga terbatas. Prioritas yang dilakukan dalam pembangunan terbatas. Boleh dikatakan bila pada saat itu Buru dapat melihat Buru Selatan sebagai pusat pelayanan secara regional maka dapat dipastikan program prioritas pembangunan Buru Selatan saat ini sama dengan apa yang dimiliki Kab. Buru. Satu hal yang penting adalah karakteristik masyarakat di Utara dan di Selatan hampir sama, tapi ada satu hal yang membedakan bahwa kita di Selatan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya asli setempat. Sedangkan mereka yang di utara kultur/budaya mereka telah terkontaminasi.

Q Jadi dapat dikatakan bahwa prioritas pembangunan Buru Selatan sama dengan milik Kabupaten Buru?

A Kurang lebih sama, namun mereka lebih menekankan pada pengembangan pangan dan pertanian, sedangkan kita diluar dari sektor tadi kita lebih menekankan pada sektor perikanan dan perkebunan.

Q samai saat ini apakah sudah ada investor asing yang datang ke Buru Selatan

A Sudah

Q Dalam Bidang apa pak?

A Bidang energi, listrik, tenaga air, dan perkebunan. Terkait dengan investasi, ada dua hal penting yang dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah, satu investasi pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan dan sebagainya, yang kedua adalah investasi dari sektor swasta. Untuk dapat menarik investor swasta dalam skala besar kita harus menyediakan sumber daya yang besar pula. Untuk investor kecil kita tidak harus kecil. menyediakan sumberdaya alam yang besar dan nilai investasinya juga relatif kecil. Hal tersebut harus didukung oleh pemerintah, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan seperti jalan, dan sebagainya. Lain halnya untuk investor besar seperti minyak ...mereka dapat mendukung upaya pembangunan daerah dengan membangun jalan dan pelayanan umum disekitar tempat mereka beroperasi karena mereka memiliki kemampuan dana. Investor yang sudah masuk ke Buru Selatan saat ini masih sebatas investor kecil dalam bidang pertanian dan kehutanan. Dalam teori perencanaan pembangunan dikatakan bahwa apabila sektor pertanian tidak dimodernisasi maka hasil-hasil pertanian tidak memiliki nilai tambah.

Q Kalau dari sektor industri, apakah buru selatan memiliki potensi yang bisa dikembangkan?

A ada, banyak....kita punya potensi untuk industri tambang, panas bumi (geothermal), minyak kelapa, perikanan dimana produksi ikan laut dalam terbesar berasal dari kepulauan Maluku yang berasal dari Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku....yang ketiganya mengelilingi Buru Selatan.

Q Dari beberapa kasus, potensi daerah dapat dijadikan daya ungkit pemerintah daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dan pengembangan sektor lainnya. Kenapa sektor perikanan tidak masuk kedalam sektor utama.

A Kita memang memiliki 2 Sektor yakni sektor Utama dan Sektor Penunjang. Sektor Utama adalah infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, sektor penunjang terdiri dari pertanian yang didalamnya ada perkebunan dan perikanan. Alasan mengapa kita belum menjadikan perikanan menjadi sektor utama adalah karena infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan merupakan hal yang mendasar dan dengan anggaran yang ada kita belum mampu untuk mengelola sektor tersebut. Lain halnya jika sarana dan prasarana infrastruktur telah tersedia..jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah berbenah diri.

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Mendalam

Keterangan :

Q : Pertanyaan

A : Jawaban

Nama : Bapak Abdurrahman Soulisa
Jabatan : Kepala Dinas Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Waktu : Minggu, 10 Juni 2012 pk1. 11.00 WIT
Tempat : Kediaman

Q Apa yang menyebabkan terjadinya pemekaran Buru Selatan?

A Pemekaran Buru Selatan terjadi karena adanya aspirasi dari masyarakat Buru Selatan sendiri yang merasa kesulitan dalam mengakses pelayanan dari pemerintah, jadi ini terkait dengan masalah rentang kendali....trus ada juga masalah ekonomi..dimana kondisi ekonomi daerah khususnya masyarakat sangat rendah ..hal itu dikarenakan infrastruktur di Buru Selatan bisa dibilang hampir tidak ada....semua wilayah darat Buru Selatan adalah hutan dan tidak ada jalan sama sekali...ini menyulitkan distribusi barang dan jasa juga masyarakat yang ingin pergi ke daerah lain...ini yang menghambat perkembangan ekonomi Buru Selatan selain itu pemekaran Buru Selatan juga dimaksudkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah di Buru Selatan. Biasanya dalam pelaksanaan pembangunan daerah.....pembangunan terkonsentrasi hanya di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan sehingga manfaatnya tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat... nah dengan adanya pemekaran diharapkan disparitas tersebut dapat dikurangi dengan cara meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur agar bisa menunjang pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah. ...jadi otomatis dengan menguatnya perekonomian daerah kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pun dapat ditingkatkan.

Q Bagaimana Kondisi Pembangunan Buru Selatan Saat ini di Berbagai Bidang?

A kondisi pembangunan di Buru Selatan saat ini khususnya setelah pemekaran...cukup *significant* sekalijauh lebih baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan secara fisik...seperti jalan, jembatan, pelabuhan, kantor pemerintahan dan juga fasilitas umum, seperti yang bisa Anda lihat saat ini kami sedang membangun beberapa puskesmas baik puskesmas utama dan puskesmas inap, kita juga sedang bangun sekolah, kantor PLN.....sampai saat ini kita masih memiliki keterbatasan akan ketersediaan listrik..sejak pembakaran kantor PLN pada saat kerusuhan tahun 1999 lalu, makanya sampai sekarang pelayanan listrik hanya terbatas malam hari saja,

khususnya di tiga kecamatan yakni Kepala Madan, Namrole, dan Ambalau...listrik kita masih numpang di Gardu PLN yang ada di Kecamatan Waesama.

Q perubahan apa saja yang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat setelah pemekaran?

A Banyak...seperti yang saya sebutkan diatas, saat ini kami sedang melaksanakan pembangunan secara fisik.....mungkin jika dilihat dari aspek pelayanan umum, hasil pembangunan yang sudah dapat di rasakan oleh rakyat adalah ketersediaan jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Buru Selatan, karena sebelum terjadinya pemekaran...bisa dibilang tidak ada jalan penghubung antar daerah-daerah di Buru Selatan, jadi masyarakat yang ingin pergi ke kecamatan lain harus menempuh jalur laut.....hal ini sangat menyulitkan masyarakat....apalagi armada laut tidak tersedia setiap hari.....tentunya hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal mobilitas dan distribusi barang dan jasa.

Q Selama tiga tahun pertama, Menyusun RKPD berdasarkan RPJMD Kabupaten Buru. Bagaimana menurut bapak, apakah prioritas dan program pembangunan Kabupaten Buru sesuai dengan kondisi faktual /Kebutuhan Pembangunan Buru Selatan?

A iya kita memangsebagai daerah baru kita belum memiliki RPJMD, oleh karena itu penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Buru sebagai kabupaten induk. Saya bisa bilang...Buru dan Buru Selatan memiliki karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang sama.....namun kita juga memiliki perbedaan, contohnya karakteristik masyarakat kita sedikit berbeda penduduk yang ada di Kabupaten Buru umumnya adalah pendatang, sedangkan penduduk yang ada di Kabupaten Buru Selatan adalah penduduk asli Pulau Buru. Para pendatang yang sekarang tinggal di wilayah Kabupaten Buru awalnya adalah para tahanan politik pada masa orde baru, dan juga transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka lah yang pertama-tama menumbuhkan sektor pertanian di Pulau Buru..... saat ini pembangunan daerah Buru sudah difokuskan pada bidang pertanian, sedangkan bagi Buru Selatan....walaupun sektor pertanian merupakan sektor primer yang memberikan sumbangan terbesar bagi PDRB Buru Selatan, namun PR kita masih banyak.....khususnya bagi penyediaan layanan umum dan infrastruktur...jadi walaupun ada beberapa arah dan kebijakan pembangunan yang sama, namun hal tersebut didasarkan pada pertimbangan kita sendiri....bukan semata-mata mengadopsi perencanaan mereka.

Q Sejauhmana dukungan DPRD terhadap program-program pembangunan Buru Selatan & Penentuan Prioritas pembangunannya?

A sejauh yang saya rasakan....mereka selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerahdan tidak ada kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pemerintah daerah yang mendapat hambatan ketika dibahas di DPRD.....yah....pastinya ada argument, pertanyaan, dan debat...namun

sepanjang yang saya ketahui...kebijakan yang diajukan selalu rasional...oleh karena itu selalu didukung oleh dewan.

Q Apa saja tantangan dan hambatan pembangunan yang dihadapi oleh Buru Selatan Saat ini?

A Sebagai daerah baru banyak sekali hambatan yang kami hadapi, yang pertama terkait dengan pendanaan, alokasi dana dari pusat masih sangat terbatas sekali, saat ini kita baru menerima bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan hal yang harus dibenahi banyak sekali. Masalah kemiskinan dan keterbelakangan, masalah disparitas antar kecamatan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas...dan masih banyak lagi...intinya adalah rentang kendali yang terlalu besar sehingga masyarakat belum bisa menikmati pelayanan dengan maksimal.

Q Apakah Buru Selatan mendapatkan dana bantuan dari Kabupaten Buru dan Pusat seperti yang telah diatur dalam undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah sebesar lima miliar pertahun selama tiga tahun?

A Sampai sejauh ini kami belum menerima sesen pun dari Kabupaten Induk, kalau dana dari Pusat kami sudah terima, kami sudah coba menyakan ke pusat, dari pusat bilang dana tersebut akan diambil dari APBD Kabupaten Buru tahun selanjutnya...namun sampai sekarang kami belum menerima sama sekali

Q Strategi apa yang dimiliki Buru Selatan dalam mencapai tujuan

A

Q Kesenjangan ekonomi di Buru Selatan juga harus diperbaiki....karena bisa menjadi masalah dikemudian hari...kesenjangan ekonomi menandakan bahwa pembangunan belum dilaksanakan secara merata...oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar yang serius, disamping itu karena keterbatasan infrastruktur..maka layanan umum yang tersedia di Buru Selatan juga terbatas...fasilitas kesehatan dan pendidikan, juga administrasi juga masih sedikit sekali ...ngak sesuai sama jumlah masyarakat disini.

Keterangan :

Q : Pertanyaan

A : Jawaban

Nama : Bapak Gerson Eliazer Selsily, SE
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Partai Demokrat
Waktu : Sabtu, 9 Juni 2012 pkl. 10.00 WIT
Tempat : Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan di Namrole

Q Bagaimana Proses Pembentukan DPRD Kabupaten Buru Selatan?

A DPRD Kabupaten Buru Selatan dibentuk pada tahun 2009 melalui pemilu legislatif setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Buru Selatan dari Kabupaten Buru. Pada saat Buru Selatan masih menjadi bagian dari Kabupaten induk, Buru Selatan merupakan satu dapil (daerah pemilihan) yang terdiri dari sembilan orang. Jumlah keseluruhan anggota DPRD Buru Selatan ada 20 orang yang mewakili 36.945 penduduk Buru Selatan, jadi setiap anggota mewakili 1.847 orang. Pasca Pemekaran Buru Selatan, kesembilan anggota dewan dalam dapil Buru Selatan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Buru Selatan, sedangkan sisanya yang berjumlah sebelas orang dipilih melalui pemilu legislatif. Para anggota dewan tersebut kemudian dilantik pada tanggal 29 Januari 2010 untuk periode 2009-2013

Q sejauh ini bagaimana dukungan anggota dewan terhadap kepemimpinan dan kebijakan kepala daerah?

A dapat dikatakan bahwa seluruh anggota DPRD Buru Selatan selalu mendukung kebijakan-kebijakan kepala daerah, karena berdasarkan penglihatan saya sejauh ini kebijakan-kebijakan kepala daerah bersifat rasional, namun begitu namanya juga politik ya...ada dinamika, keinginan dari teman-teman koalisi maupun pendukung untuk mendukung semua kebijakan pemerintah daerah...nah yang oposisi juga tidak terlalu signifikan namun cukup berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya Golkar, setiap kebijakan pemerintah selalu dievaluasi kembali tapi secara politik melalui parlemen pengaruhnya tidak signifikan. Contohnya : kita partai pendukung yang tergabung kedalam satu fraksi, ada sebelas kursi dan sebelas partai politik, nah asumsinya jika itu kebijakan politik atas nama lembaga DPRD, misalnya pengambilan suara lewat fraksi, sebenarnya satu fraksi saja sudah cukup karena kebanyakan atau totalitas dari fraksi kerakyatan khan ada sebelas anggota, jumlah itu sudah melebihi setengah dari keseluruhan anggota DPRD.

Q DPRD Kabupaten Buru Selatan terdiri dari Berapa fraksi?

A Fraksi Kerakyatan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Perda. Fraksi kerakyatan terdiri dari sebelas parpol (sebelas Kursi) yakni : Partai Demokrat, PKS, PBR, Patriot, PBB, PDS, PDK, PKB,

P3, GIR, PKP masing-masing memiliki satu kursi. Fraksi Golkar terdiri dari dua parpol (empat kursi) yakni Golkar (3) dan PAN (1). Fraksi Perda terdiri dari empat parpol (lima kursi) yakni : PDIP (2), Hanura, PPRN, PPD.

Q Ada berapa komisi yang ada di DPRD Kabupaten Buru Selatan?

A Ada tiga Juga, Komisi A membidangi Hukum, Komisi B membidangi ekonomi pembangunan, keuangan, kemudian....Komisi C membidangi pendidikan, kesehatan dan pembangunan juga.

Q Kepala Daerah Buru Selatan berasal dari partai yang mana?

A PDIP

Q Partai mana yang merupakan koalisi dan oposisi bagi kepala daerah?

A pada prinsipnya kita semua mendukung kepala daerah, namun pada saat pemilukada, Partai oposisi ka.daerah sekarang adalah partai Golkar. Namun pada putaran kedua, partai golkar gabung menjadi partai koalisi PDIP.

Q Dalam pemilukada Buru Selatan, diikuti oleh enam calon kepala daerah yang diusung oleh parpol, seperti diketahui bahwa golkar merupakan pesaing nomor satu bagi PDIP, calon yang diajukan oleh golkar pada saat pemilukada, apakah sekarang menjadi salah satu dari anggota DPRD Buru Selatan?

A iya, beliau menjabat sebagai ketua DPRD

Q kalau begitu, apakah ada kesan bahwa DPRD berusaha menjatuhkan Kepala Daerah ?

A ga ada, asumsinya politik seperti yang tadi saya sampaikan bahwa DPRD adalah lembaga politik, nah...kebijakan ditentukan oleh seluruh anggota dewan, jadi walaupun partai oposisi sering kali tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, tidak akan berpengaruh apabila kebijakan tersebut didukung oleh partai koalisi, karena jumlah partai koalisi dari partai kerakyatan misalnya jumlahnya sudah melebihi setengah dari total keseluruhan anggota dewan sehingga pengaruhnya lebih kuat. Selain fraksi kerakyatan, fraksi perda pada umumnya juga selalu mendukung kebijakan-kebijakan kepala daerah, dan walaupun PAN tergabung dalam fraksi Golkar namun secara politik PAN bukan partai mendukung kepala daerah....jadi...hanya partai golkar yang berjumlah 3 orang saja yang sering kali tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, namun karena jumlahnya hanya 3 orang, pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap penentuan kebijakan pemerintah. Apapun keputusan politik...selama mendapat dukungan dari fraksi kerakyatan dalam lembaga DPRD, dapat dipastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan. Selama berjalannya pemerintahan sampai saat ini semua kebijakan-kebijakan dapat ditetapkan secara objektif dan tidak ada masalah yang berarti....tapi ya namanya politik ya mbakselalu ada kepentingan-kepentingan golongan tertentu...namun bagi saya selama kepentingan tersebut tidak merugikan rakyat...ya tidak jadi masalah

Q seberapa jauh atau seberapa kuat kepentingan-kepentingan politik yang ada di Buru Selatan dan dari mana asalnya?

A

- Q Tadi bapak menyebutkan bahwa seringkali anggota dewan yang berasal dari Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau perda yang diajukan oleh Kepala daerah. Evaluasi yang dilakukan tersebut bentuknya seperti apa?
- A seperti gini mbak misalnya...ketika pemerintah daerah Buru Selatan mengajukan perda tentang RAPBD...ada banyak hal yang dinilai oleh teman-teman dari partai Golkar menganggap bahwa jumlah yang tertera dalam RAPBD tersebut tidak rasional karena tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik teman-teman di Golkar.
- Q nah...itulah yang saya maksud...hal itu pada akhirnya akan menjadi kendala bagi daerah ke depannya. Apabila setiap kebijakan yang dibuat harus mengakomodir setiap kepentingan dari sebagian golongan...pasti pada akhirnya akan merugikan rakyat...karena kepentingan rakyat sendiri tidak ada yang mengakomodir..
- A iya memang tapi sampai saat ini...seperti yang saya sebutkan sebelumnya hal itu tidak menjadi masalah. Begini misalnya...dari 20 anggota dewan..tentu mereka masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun kita tergabung dalam sebuah lembaga dimana semua keputusan diputuskan secara demokratis sehingga kepentingan-kepentingan masing-masing kelompok tidak muncul kepermukaan...yang ada adalah kepentingan bersama. Dan putusan yang dihasilkan merupakan putusan lembaga secara kolektif, nah kalau asumsinya itu...teman-teman di Golkar tidak bisa berbuat banyak.
- Q kasus yang sering ditemui di daerah adalah, para elite lokal seperti pemuka adat dan pemuka agama seringkali ingin dikutsertakan dan mendapatkan kursi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Apakah hal ini juga menjadi kendala bagi Buru Selatan?
- A Tidak, sejauh saya disana tidak ada kasus seperti itu. Para pemuka adat maupun pemuka agama sejauh ini tidak terlalu berpengaruh dalam pemerintahan di Buru Selatan.
- Q Bagaimana pandangan masyarakat Buru Selatan terhadap politik yang berlangsung pada saat sebelum terjadinya pemekaran dan setelah pemekaran.
- A Masyarakat Buru Selatan pada saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Buru tidak terlalu paham mengenai dinamika politik yang ada di daerah... Menurut saya dinamika politik di Buru Selatan tidak terlalu resisten, dan masyarakat disana belum siap dengan perubahan politik yang terjadi dengan sangat cepat. Seperti misalnya pembentukan Namrole menjadi kecamatan baru terjadi pada tahun 2004/2005, kemudian disusul dengan pembentukan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2008, jarak tersebut terlalu singkat, sedangkan masyarakat yang umumnya merupakan petani belum siap menerima perubahan tersebut. Masyarakat belum "aware" terhadap kedudukan mereka dalam pemerintahan, seharusnya mereka dapat turut serta dalam proses pembangunan dan politik sebagai pengawas berjalannya pembangunan, namun pada saat itu fungsi kontrolnya hanya ada pada DPRD dan belum ada lembaga-lembaga lain seperti LSM...itu belum ada...

Lampiran 5 Transkrip Wawancara Mendalam

Nama : Bapak Antonius Tarigan
Jabatan : Staf Perencana Madya Direktorat Otonomi Daerah, Kementerin PPN /Bappenas
Keterangan : Pertanyaan disampaikan dan dijawab melalui email

1. Bagaimana peran bappenas dan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan perencanaan daerah?

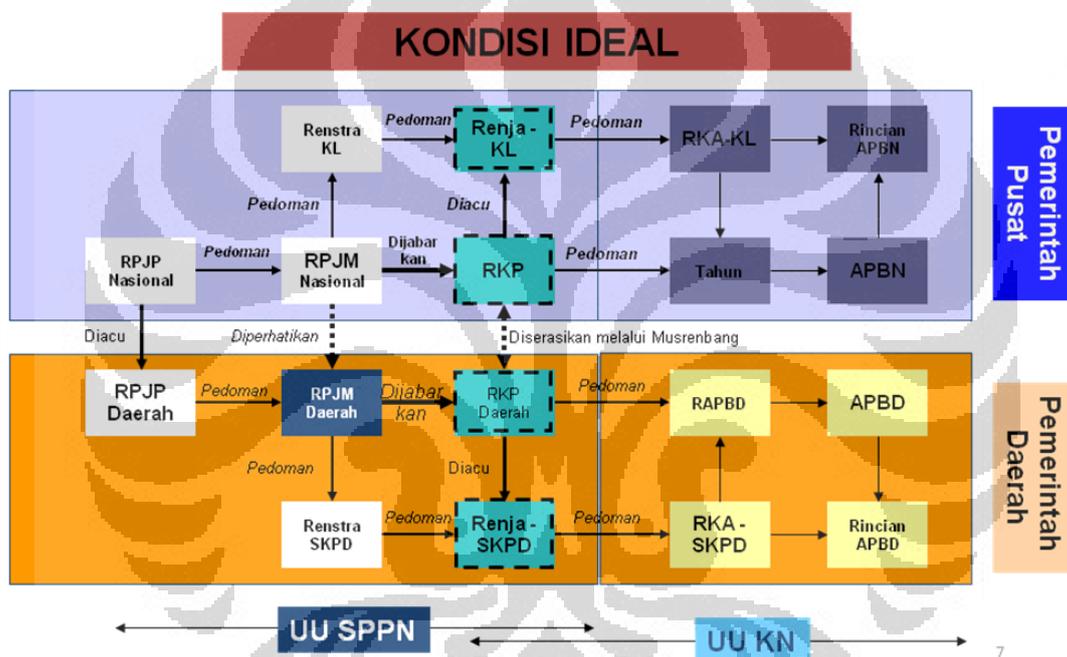
Bappenas melihat bahwa pembangunan di daerah, keberhasilannya ditentukan berdasarkan perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terpadu antar satu sektor-dengan sektor lainnya. Masing-masing sektor mempunyai peran sendiri-sendiri dalam mencapai outcome pembangunan daerah (outcome approach). Manfaat yang didapat adalah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan di daerah karena tidak terjadi duplikasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Untuk itu kementerian/lembaga pelaksanaan/lokasi program/kegiatan di daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu perencanaannya dengan Bappeda pemerintah daerah setempat. Dengan cara ini maka tidak hanya menghindari duplikasi juga akan terwujud sinergi arah kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Sinergi ini adalah wujud dari perencanaan yang mempertemukan top down dan bottom up planning. Jadi perspektif Bappenas adalah perlu adanya perencanaan yang terpadu tentang proyek pembangunan di daerah antara Bappeda dan instansi vertikal kementerian/ lembaga sektor.

Sesuai UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, tujuan dari SPPN adalah (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat UU No.25/2004, maka tugas dan peran Bappenas dalam penyusunan perencanaan daerah adalah sebagai pusat koordinasi untuk mensinkronkan, mensinergikan, dan menselaraskan dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, RKP) dengan perencanaan pembangunan di daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).

Amanat yang mewajibkan adanya keterkaitan dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan adalah antara lain dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN pasal 5 bahwa : (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peran Bappenas dan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan perencanaan daerah dapat terlihat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) yang diikuti oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga sektor terkait dan perwakilan pemerintah daerah. Tujuan dari adanya forum ini adalah sebagai forum puncak untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program di pusat dan daerah sehingga diharapkan program pembangunan antara pusat dan daerah jelas dan tidak adanya tumpang tindih (overlapping) program pembangunan. Proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat daerah dapat dilihat melalui diagram, seperti dibawah ini.



2. Apa faktor-faktor yang seringkali menjadi kendala dalam pembangunan di daerah dan bagaimana cara menanganinya?

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan daerah, antara lain, kapasitas daerah itu sendiri masih rendah, baik dari sisi kapasitas sdm aparatur pemerintah daerah yang masih rendah dan belum merata, kapasitas keuangan daerah yang masih rendah, ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pusat masih sangat dominan dan juga kualitas belanja daerah yang belum baik, sehingga kinerja pembangunan tidak optimal. Selain itu efektifitas kelembagaan pemerintah daerah juga belum optimal menggerakkan pembangunan di daerah. Beberapa faktor yang seringkali menjadi kendala dalam mempercepat pembangunan daerah antara lain adalah:

1. Lemahnya koordinasi diantara para pelaku kepentingan (stakeholder) pembangunan di daerah dan antar sektor di struktur pemerintahan daerah.

2. Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah kepada dana transfer daerah (dana perimbangan dan dana otsus) dari Pusat daripada yang bersumber dari sumber daya daerah itu sendiri (PAD).
3. Postur belanja daerah yang sebagian besar masih lebih besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa daripada belanja modal, yang seharusnya digunakan untuk belanja pelayanan publik di daerahnya.
4. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah, dari mulai penyusunan perencanaan pembangunan di daerahnya, implementasi hingga monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah tersebut hingga kemampuan menggali potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut.
5. Masih tingginya disparitas pembangunan antara wilayah dan daerah di Indonesia, misalnya antara pembangunan di pulau Jawa dengan luar Jawa, pembangunan di KBI dengan KTI.
6. Masih banyaknya regulasi dan kebijakan di tingkat Pusat dan daerah terkait pembangunan daerah yang belum sinkron dan harmonis serta kendala sinergi kebijakannya di tingkat Pusat dan daerah, termasuk terkait kebijakan perencanaan dan penganggarannya.

Faktor lainnya yang seringkali menjadi kendala dalam pembangunan di daerah salah satunya adalah isu terkait dengan rendahnya investasi untuk mempercepat pembangunan daerah dan isu pemerataan pembangunan di daerah. Dari data realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) berdasarkan lokasi Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2011 menunjukkan terdapat ketimpangan transfer daerah yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan infrastruktur yang diindikasikan dari ketimpangan investasi antar pulau. Dari data ini, diketahui bahwa 55,3% investasi penanaman modal asing berada di Pulau Jawa, sedangkan 30% berada di pulau Sumatera dan Kalimantan serta sisanya yang hanya kurang lebih 20% berada di Indonesia Timur.

3. Bagaimana efektifitas Musrenbangda sebagai bentuk partisipasi masyarakat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah?

Sejauh ini forum musyawarah pembangunan daerah cukup efektif dalam proses pembangunan karena melalui forum ini dapat diketahui aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat daerah sehingga diharapkan dapat tercipta pembangunan yang tepat sasaran. Walau demikian masih banyak yang harus ditingkatkan, ke depan forum murenbangda ini harus betul2 ditingkatkan kualitasnya khususnya terkait dengan penguatan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam hal kapasitas baik SDM maupun dukungan pendanaannya serta didukung regulasi yang memadai untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor/SKPD di daerah.

4. Sejauhmana kesesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap strategi pembangunan nasional saat ini?

Amanat untuk menyesuaikan prioritas pembangunan daerah terhadap strategi pembangunan nasional saat ini dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan adalah antara lain dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN pasal 5 bahwa : (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga sudah jelas bahwa penyusunan prioritas-prioritas pembangunan di daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD & RPJMD) tetap mengacu dan memperhatikan dokumen2 perencanaan pembangunan di tingkat nasional.

Dalam forum musrenbangnas dibahas pula dokumen perencanaan daerah agar dapat diketahui kesesuaian dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Oleh karena itu forum musrenbangnas ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah.

5. Adakah hal khusus yang perlu diperhatikan oleh daerah Otonom Baru hasil pemekaran sehubungan dengan perencanaan pembangunan di daerahnya?

Pemekaran daerah ternyata memberikan dampak pembengkakan anggaran ke daerah (DAU, DAK dan DBH) beban APBN semakin berat. Sebagian besar DOB hasil pemekaran kondisi keuangannya memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dana perimbangan berada di atas 70% dari total penerimaan. Penerimaan APBDnya. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh DOB adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas ini untuk peningkatan dan percepatan pembangunan daerah baru tersebut, artinya kualitas belanja harus benar-benar diperhatikan.

Hal khusus yang perlu diperhatikan oleh Daerah Otonom Baru hasil pemekaran sehubungan dengan perencanaan pembangunan di daerahnya adalah terkait dengan tujuan dari pembentukan daerah otonom baru hasil pemekaran. Daerah otonom baru hasil pemekaran dalam membuat perencanaan pembangunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas dilihat dari aspek kuantitas, kualitas dan aksesibilitas. Hal ini dapat terjamin dalam pembuatan strategi pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD maupun renstra daerah.

2. Daerah otonom baru harus dapat mempercepat pertumbuhan demokrasi sehingga tujuan dari pembangunan daerah dapat tepat sasaran.
 3. Daerah otonom baru sebaiknya segera melakukan pemetaan potensi daerah agar dapat meningkatkan kapasitas keuangan dari daerah otonom baru tersebut.
 4. Dalam pembuatan perencanaan pembangunan, daerah otonom baru harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada di tingkat pusat, sehingga sinergi pusat dan daerah dapat tercapai
6. Apa yang seharusnya dilakukan oleh DOB (Daerah Otonom Baru) dalam rangka pembangunan di daerahnya?
1. Memasukkan strategi pembangunan daerah ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah
 2. Membangun unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan SDM apartur pemerintahan yang berkualitas
 3. Pengelolaan potensi daerah yang baik guna meningkatkan kapasitas keuangan pada daerah otonom baru
7. Pada umumnya bagaimana tingkat ketergantungan daerah hasil pemekaran dengan daerah induknya?

Tingkat ketergantungan daerah otonom baru terhadap daerah induk pada tahap awal pembentukan daerah otonom baru adalah sangat besar. Hal ini tercermin dalam alokasi APBN untuk daerah menjadi terbagi kepada daerah otonom baru. Dengan alokasi anggaran kepada daerah yang harus memperhatikan kemampuan anggaran negara, keberadaan daerah otonom baru akan mengurangi alokasi dana perimbangan yang diterima daerah yang telah ada. Selain itu, ketergantungan lainnya juga dapat terlihat dari proses penataan kelembagaan, perlengkapan, ketersediaan sumber daya manusia dan lain-lain, yang dalam beberapa waktu merupakan proses transisi.

8. Apakah sistem dan mekanisme perencanaan yang sekarang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia?

Sejauh ini system dan mekanisme perencanaan yang telah dibangun sebelumnya sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Satu hal yang menjadi kendala dalam proses pembangunan adalah bagaimana system dan mekanisme perencanaan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh aparatur pemerintahan tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai pembangunan. Selain itu, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik, baik di pusat maupun di daerah harus betul-betul diimplementasikan dan ditegakan. Tanpa adanya reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik, sistem pembangunan yang ada saat ini tidak akan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Artinya untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, lebih maju, adil dan sejahtera masih sangat jauh.

9. Paradigma pembangunan apa yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia?

Paradigma pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia adalah paradigma pembangunan yang berlandaskan pada 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan tersebut juga telah dituangkan dalam paradigma pembangunan lima tahun yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia terangkum dalam visi misi RPJPN 2005 - 2025, yaitu terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Selain itu pula, paradigma pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia juga dapat dilihat dalam visi misi RPJMN 2010 – 2014, yaitu terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan juga harus berlandaskan pada asas keadilan, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

10. Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan prioritas pembangunan, selain potensi Sumber Daya yang dimiliki?

Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan salah satunya adalah dengan memperhatikan kondisi serta capaian pembangunan saat ini. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam pembangunan apa saja yang belum terpenuhi serta memperhitungkan dampak pembangunan bagi stakeholder terkait. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan adalah kebutuhan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan yang memiliki dampak pembangunan jangka panjang. Hal lain yang juga diperhatikan adalah:

1. Amanat konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Visi dan misi pembangunan Presiden/Wapres terpilih
3. Ketersediaan dan alokasi anggaran yang tersedia guna menentukan prioritas pembangunan dalam tiap-tiap periode rencana pembangunan
4. Karakteristik suatu daerah/wilayah yang dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional dan daerah
5. Aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah yang dapat ditampung dan dibahas dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di daerah dan nasional, sejak tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
6. Dinamika perubahan nasional, regional, dan internasional yang dapat mempengaruhi sejauhmana pelaksanaan pembangunan berdasarkan prioritas-prioritas yang telah ditentukan. Hal ini juga terkait dengan posisi strategis NKRI dalam geopolitik di dunia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ndaru Mukti Lestari

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Agustus 1981

Alamat : Komp. Bappenas Blok H2
Kel. Jati Sampurna-Kec. Jati Sampurna
Bekasi

Email : au_nyong@ymail.com,
au.saimima@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SDN 011 Pekayon, Jakarta Timur

SMP : SLTPN 184Kalisari, Jakarta Timur

SMA : SMUN 98 Kalisari, Jakarta Timur

Diploma 3 : Universitas Indonesia
Program Administrasi Perkantoran dan
Sekretari

Sarjana : Universitas Indonesia
Program Ekstensi Administrasi Negara

Pekerjaan :

1. 2002 – 2004 Sekretari pada Jakarta International Community Center
2. 2004 – 2005 Sekretari pada PT Priamanaya Djan International
3. 2005 – 2006 Sekretari pada PT Para Bandung Propertindo
4. 2006 – sekarang Sekeretari pada Kantor Sekertaris menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS